

**ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH PESISIR BERBASIS
KONSEP BLUE ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN SDGs DESA**

(Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : Salsabilla Raihan Daulay

NPM : 1805180010

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

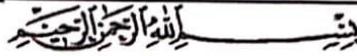
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari , sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUSTUSKAN

Nama : SALSABILLA RAIHAN DAULAY
N.P.M : 1805180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Penelitian : ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH PESISIR BERBASIS KONSEP BLUE ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN SDGs DESA (STUDI KASUS KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dra. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SALSABILLA RAIHAN DAULAY
NPM : 1805180010
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Konsentrasi : RISET EKONOMI DAN BISNIS
Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH PESISIR
BERBASIS KONSEP BLUE ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN
SDGs DESA (STUDI KASUS KECAMATAN BRANDAN BARAT
KABUPATEN LANGKAT)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, September 2022

Pembimbing Skripsi

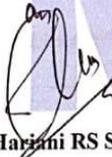

(Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Dr. Prawidya Hariani RS S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU 


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SALSABILLA RAIHAN DAULAY
 NPM : 1805180010
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
 Alamat Rumah : JL. BESAR DELITUA GG. KOLAM NO.59
 Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH PESISIR BERBASIS KONSEP BLUE ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN SDGs DESA (STUDI KASUS KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
07/07/22	Perbaiki gambaran umum, tambahkan potensi sumber daya Alam Kabupaten Langkat		
03/08/22	Perbaiki rumusan masalah pertama, tambahkan PDRB Kab. Langkat, Analisis PDRBnya		
23/08/22	Lampirkan oleh data mengenai uji statistik dan uji hausman.		
26/08/22	Perbaiki blue print, tambahkan peluang-peluang Kab. Langkat.		
31/08/22	Acc sidang meja hijau		

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si

Medan, / September 2022
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi
 Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si



Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALSABILLA RAIHAN DAULAY
Npm : 1805180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisa Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2022
yang menyatakan



SALSABILLA RAIHAN
DAULAY

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH PESISIR DENGAN BERBASIS KONSEP BLUE ECONOMY DALAM MEWUJUDKAN SDGs DESA (STUDI KASUS KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN LANGKAT)

Salsabilla Raihan Daulay

Ekonomi Pembangunan

Salsabilla.raihan01@gmail.com

Blue Economy merupakan sebuah kegiatan model ekonomi masa depan yang mempertimbangkan keunggulan dan strategi inovasi dengan mengikuti kondisi alam pesisir pantai. Blue Economy juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dan menciptakan lebih banyak aktivitas dengan model aktivitas yang harus berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia sangat mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satu bentuk langkahnya adalah konsep Blue Economy.

Sebagai negara maritim (blue economy), maka keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadi sangat besar dan harus dikelola lebih efisien dan efektif, agar ekonomi masyarakat pesisir dimasa depan menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ekonomi sumberdaya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep Blue Economy di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan mengalami peningkatan yang diikuti dengan perkembangan wisata desa berbasis hutan mangrove. Tetapi potensi di kawasan mangrove belum tercapai secara optimal karena pemanfaatan ekonomi hasil dari ekosistem kawasan mangrove belum diusahakan secara ekonomis. Jadi tingkat ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Langkat masih relatif rendah dan belum dapat mengembangkan sektor lain yang berbasis ekosistem pesisir.

Perkembangan teknologi dan industrialisasi dibidang ekonomi saat ini menjadi dua hal yang kontradiksi terhadap kelestarian lingkungan alam di seluruh dunia, karena dorongan meningkatkan ekonomi menghasilkan banyak kerusakan alam yang berkaitan dengan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jadi pengembangan sektor ekonomi menjadi tantangan kuat bagi ekonomi dunia dengan penggunaan sistem yang cenderung eksploitatif. Pola perencanaan dan manajemen sektor kelautan serta perikanan harus tercermin dari RPJMD dan Rencana strategis bagi Kabupaten Langkat.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF COASTAL AREAS
BASED ON THE BLUE ECONOMY CONCEPT IN REALIZING THE
SDGs VILLAGE (CASE STUDY BRANDAN BARAT DISTRICT
LANGKAT REGENCY)
Salsabilla Raihan Daulay
Development Economic
Salsabilla.raihan01@gmail.com**

Blue Economy is a future economic model activity that considers advantages and innovation strategies by following the natural conditions of the coast. Blue Economy is also a tool that can be used to improve unfavorable economic conditions and create more activities with an activity model that must be sustainable. The concept of sustainable development is one of the efforts to preserve the environment. Indonesia strongly supports the implementation of the concept of sustainable development, one of which is the Blue Economy concept.

As a maritime country (blue economy), Indonesia's biodiversity is very large and must be managed more efficiently and effectively, so that the economy of coastal communities in the future will be better. This study aims to analyze the economic potential of coastal marine resources in achieving the Blue Economy concept in Langkat Regency, Sumatra Utara province. The contribution of the fisheries and marine sectors has increased, followed by the development of mangrove forest-based village tourism. However, the potential in the mangrove area has not been achieved optimally because the economic use of the results of the mangrove ecosystem has not been economically exploited. Therefore the economic level of the community in the coastal area of Langkat Regency is still relatively low and has not been able to develop other sectors based on coastal ecosystems.

The development of technology and industrialization in the economy today are two things that are contradictory to the preservation of the natural environment around the world because the drive to improve the economy produces a lot of natural damage associated with unsustainable development. Consequently, the development of the economic sector becomes a strong challenge for the world economy by using a system that tends to be exploitative. The pattern of planning and management of the marine and fisheries sector must be reflected in the RPJMD and the strategic plan for Langkat Regency.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, kesabaran, serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penelitian skripsi ini penulis berusaha menyajikan yang terbaik dengan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh penulis, namun demikian penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam proposal ini belum sempurna karena kurangnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam merangkai kata-kata menjadi suatu karya tulis yang baik. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik untuk menyempurnakan mini riset ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat serta rezeki-nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis dan atas izin-

nya memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua saya tercinta dan sangat saya sayangi ayahanda Ir. M. Ichsan Daulay dan Ibunda Nurhayati Nasution yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan dan mendidik, memberikan doa yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Terima kasih atas motivasi, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbanan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan kelak bisa menjadi orang yang sukses.
3. Untuk adik saya yang saya sayangi Shaqira Amaryllis Daulay dan Nenek saya Hj. Zunaidah yang selama ini telah memberikan penulis dukungan yang tiada hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk abang Sukur Siregar S.E yang telah membantu, mendukung dan menemani saya dalam hal apapun, saya mengucapkan terima kasih.
5. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan. S.E., M.Si yang merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung. S.E, M.Si yang merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Program Studi di Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.

10. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh dosen mata kuliah Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
12. Untuk seperjuangan skripsi dan juga sahabat saya Rizana Rizky Amalia Nasution, Fildzah Syafira Al-hamid, M. Fariz Al-Azhari Rokan dan Alfira Israfia yang tetap setia menunggu kedatangan saya dan sabar menghadapi saya. Terimakasih atas sedih, kesal, tawa dan canda yang telah kita lalui selama perkuliahan ini.
13. Kepada teman saya Novita Fadlia Harahap, Elfira Shenita Damanik, Paras Amanda Putri, dan Rizki Fausan yang telah membantu dan memberi semangat agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada senior saya abangda Shihabuddin Fuady Rangkuti, S.E dan abangda Ridho Irawan, S.E yang telah membantu dan memberikan masukan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini
15. Untuk semua pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work and for never quitting.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Identifikasi Masalah	34
1.3	Batasan Masalah.....	32
1.4	Rumusan Masalah	32
1.5	Tujuan Penelitian.....	32
1.6	Manfaat Penelitian.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori	34
2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	34
A.	Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	39
B.	Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes	41
C.	Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik	44
2.1.2	Teori Pembangunan Ekonomi	48
A.	Teori Pembangunan Ekonomi Klasik.....	49
B.	Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis	53
C.	Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery.....	55
D.	Teori Pembangunan Ekonomi Malthus	56
2.1.3	Ekonomi Regional.....	58
2.2	Regulasi	71
2.2.1	Blue Economy	71
2.2.2	Blue Economy Development Framework	72
2.3	Penelitian Terdahulu	80
2.4	Tahapan Penelitian	83
2.4.1	Kerangka Analisis Penelitian	83
2.4.2	Kerangka Konseptual	84
2.5	Hipotesis	84

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Pendekatan Penelitian	85
-----	-----------------------------	----

3.2	Definisi Operasional.....	85
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian	86
	3.3.1 Tempat Penelitian	86
	3.3.2 Waktu Penelitian	86
3.4	Jenis dan Sumber Data	87
	3.4.1 Jenis Data	87
	3.4.2 Sumber Data	87
3.5	Teknik Pengumpulan Data	87
3.6	Teknik Analisis Tujuan Penelitian	88
	3.6.1 Analisis Deskriptif.....	88
	3.6.2 Analisis Model Ekonometrika	88
	A. Model Estimasi.....	88
	B. Metode Estimasi	89
	C. Tahapan Analisis	90
	1. Penaksiran	90
	2. Pengujian.....	91

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Langkat	97
	4.1.1 Kondisi Geografis	97
	4.1.2 Kondisi Pemerintahan	99
	4.1.3 Kondisi Demografi	101
	4.1.4 Kondisi Sosial	104
	4.1.5 Kondisi Ekonomi	108
	4.1.6 Kondisi Sumber Daya Alam (SDA)	112
4.2	Melakukan Analisis Deskriptif Tentang Perekembangan Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Dalam Mencapai Konsep <i>Blue Economy</i> di Kabupaten Langkat.....	114
4.3	Melakukan Estimasi Terhadap Indikator-Indikator yang Berpengaruh pada Indeks Desa Membangun (IDM)	120
	4.3.1 Hasil Analisis Regresi	131
4.4	Mengidentifikasi dan Membuat Blue Print Sebagai Landasan Dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan Desa Agar Tepat Sasaran Sebagai Waterfront Village Untuk Desa Perlis dan Kelantan	138

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	149
5.2	Saran.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produksi Ikan Menurut Hasil Tangkapan Kabupaten/Kota (Ton) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.....	18
Tabel 1.2 Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatera Utara,2019	24
Tabel 2.1 Komponen Ekonomi Biru	73
Tabel 2.3.1 Penelitian Terdahulu	80
Tabel 3.1 Definisi Operasional	86
Tabel 3.7.1 Kerangka Blue Print Dalam Mencapai Blue Economy.....	96
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Langkat	98
Tabel 4.2 Statistik Pemerataan Kabupaten Langkat	99
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021	101
Tabel 4.4 Indikator Kependudukan Kabupaten Langkat	102
Tabel 4.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat	103
Tabel 4.6 APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Langkat Tahun 2021	104
Tabel 4.7 Statistik Tenaga Kesehatan Kabupaten Langkat	105
Tabel 4.8 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Langkat Tahun 2020-2021...	106
Tabel 4.9 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021	107
Tabel 4.10 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021	107
Tabel 4.11 Jumlah Nilai PDRB di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021.....	108
Tabel 4.12 Peranan PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2021	109
Tabel 4.13 Statistik Gini ratio per-Kapita Kabupaten Langkat	113
Tabel 4.14 Populasi Peternakan (ekor) di Kabupaten Langkat Tahun 2019-2021.....	114
Tabel 4.15 Luas Kawasan Hutan Mangrove dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	117
Tabel 4.16 Produksi Ikan Menurut Jenis Penangkapan dan Produksi Benih Ikan/Udang di Kabupaten Langkat	119
Tabel 4.17 PDRB,Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2019-2021	121

Tabel 4.18 Peranan Sub Lapangan Usaha Terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Jasa Pertanian	123
Tabel 4.19 Produksi Perikanan Tambak Kabupaten Langkat Tahun 2020	123
Tabel 4.20 Jumlah Luas Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat Tahun 1989-2019.....	124
Tabel 4.21 Hasil Pengolahan Data Model Regresi	131
Tabel 4.2.2 Uji Hausman Test	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Statistik Development Goals	4
Gambar 1.2 Produk Domestik Bruto Maritim Indonesia Tahun 2016	13
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021	14
Gambar 1.4 Nilai Tukar Rata-Rata di Sektor Perikanan Tahun 2018	16
Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Desa di Pulau Sumatera Tahun 2018.....	22
Gambar 1.6 IPD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2018.....	23
Gambar 1.7 Kondisi Mangrove Indonesia Tahun 2021	26
Gambar 1.8 Luas Ekosistem Mangrove Berdasarkan Pulau di Indonesia Tahun 2021.....	27
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Langkat	98
Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Langkat (%) Tahun 2021.....	100
Gambar 4.3 Piramida Penduduk Kabupaten Langkat (Jiwa) Tahun 2021.....	102
Gambar 4.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat	107
Gambar 4.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Langkat Tahun 2017-2021	111
Gambar 4.6 PDRB Per-Kapita Kabupaten Langkat ADHB dan ADHK Tahun 2017-2021	112
Gambar 4.7 Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2020 ...	114
Gambar 4.8 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2021.....	115
Gambar 4.9 Persentase Nelayan di Kabupaten Langkat	118
Gambar 4.10 Laju Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian Tahun 2017-2021 (%).....	123
Gambar 4.11 Scatterplot Model	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara dan terkenal di seluruh dunia karena pulau dan pemandangannya yang indah. Luas Indonesia adalah 1.919.440 km² dengan luas daratan 1.826.440 km² dan luas 93.000 km² terbentang dari Sabang sampai Merauke, dimana Indonesia memiliki 17.499 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah baik itu darat dan perairan mencapai 8.300.000 km² yang dilansir dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dari total luas wilayah Indonesia tersebut 3,25 juta km² merupakan lautan dan 2,55 km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hanya sekitar 2,01 juta km² wilayah Indonesia yang berupa daratan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km²

Melalui deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan pada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, diantara dan didalam Kepulauan Indonesia) menjadi satu NKRI. Indonesia sebagai negara kepulauan juga telah diakui dunia Internasional melalui sidang PBB ke-3 yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)*. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas memiliki sumber daya alam yang besar dan letak geografisnya yang strategis, Indonesia memang sudah seharusnya menjadi poros maritim dunia. Indonesia sebagai negara maritim harus mampu memanfaatkan semua unsur kelautan disekelilingnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, juga

harus mampu menghadirkan kekuatan keamanan laut yang memadai, semacam *sea and coast guard*, guna menjaga keamanan perairan Indonesia dari berbagai pelanggaran hukum. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, hal ini dikonfirmasi oleh data KKP. Luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km² sedangkan luas wilayah perairan 6,32 juta km², dengan lanskap seperti itu tak pelak Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Kekayaan sumber daya laut tersebut diduga mendorong negara lain untuk masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia, seperti konflik Indonesia dengan China di Laut Natuna. Laut Natuna menyimpan banyak potensi yang menjadi daya tarik untuk diperebutkan oleh negara lain, salah satunya potensi ikan yang mencapai 504.212,85 ton tiap tahunnya. Jumlah ini hampir menjangkau 50% potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP RI) dari total jumlah 1.143.341 ton per tahunnya.

Indonesia memiliki potensi menjadi poros maritim dunia karena memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang berlimpah. Untuk menuju poros maritim, Indonesia harus mampu memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kepentingan nasional. Indonesia juga harus peduli dan merespons berbagai permasalahan keamanan maritim yang mengancam kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Diplomasi ekonomi maritim juga menjadi perhatian dalam upaya mendukung pencapaian Indonesia sebagai negara maritim dunia. Indonesia juga masih jauh tertinggal di bidang maritim di bandingkan dengan Negara Filipina dan Jepang, padahal luas lautan dan Panjang garis pantai Indonesia jauh lebih besar. Dari sisi pendapatan, sektor maritim hanya mampu berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sedangkan Filipina mampu berkontribusi

sebesar 21% dan Jepang 28% (LIPI,2016). Banyak sekali potensi maritim Indonesia yang belum dikembangkan, padahal sebanyak 14% terumbu karang di dunia berada di Indonesia. Indonesia juga menguasai 27% hutan bakau dunia dan 25% populasi ikan dunia. Indonesia bahkan masuk kategori Marine Mega Biodiversity dengan 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies terumbu karang menurut *United Development Programme (UNDP)*. Keberadaan laut juga menjadi penopang ekonomi masyarakat, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya di dari laut. Maka tersebar 10.666 desa pesisir yang berada di 52 Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Menurut UNDP, sebanyak 54% kebutuhan protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya. Selain itu, hasil laut Indonesia menyumbang 10% kebutuhan perikanan global.

Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai dan sumber daya laut yang telah menyumbang sekitar \$28 Triliun bagi ekonomi global setiap tahun (UN,2019). Selain itu, lautan juga menyerab 30% karbon dioksida yang di produksi manusia. Namun yang terjadi saat ini adalah kerusakan perairan pesisir yang terus menerus karena polusi dengan rata-rata 13.000 keping sampah plastik/km² lautan, pengamanan laut, dan 30% simpanan ikan dunia mengalami eksploitasi berlebih, jauh dibawah level dimana mereka bisa memproduksi hasil yng berkelanjutan (Bappenas,2019).

Millenium Development Goals (MDGs) hadir yang telah disetujui oleh 189 anggota PBB pada bulan September 2000. MDGs merupakan yang paling kuat untuk menunjukkan komitmen Internasional untuk kemiskinan global. Ada 8 (delapan) tujuan yang telah disepakati oleh PBB yaitu: menanggulangi kemiskinan

dan kelaparan; mencapai pendidikan dasar untuk semua kalangan; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan-tujuan tersebut dicanangkan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015 (Todaro & Smith, 2011).

Pada tanggal 25 September 2015, PBB melakukan perubahan dan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals (MDGs)* menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. SDGs terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 target yang dijadikan tuntutan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan di harapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, social dan ekonomi (www.id.UNDP.org).



Gambar 1.1 Sustainable Development Goals
Sumber : (google.com)

Berdasarkan gambar 1.1, agenda 2030 terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) atau tujuan global yang akan menjadi tuntutan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan, yang dimulai dengan pernyataan bersejarah untuk mengakhiri kemiskinan di semua tempat secara permanen. Dalam tujuan SDGs di pilar ekonomi yakni mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkesinambungan dan mendorong inovasi, membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, ulet, dan berkelanjutan (www.id.UNDP.org)

United Nations mendorong Indonesia untuk bisa menghasilkan pencapaian yang signifikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* melalui pemanfaatan konsep *Blue Economy*. Indonesia adalah negara yang menjadikan sektor kelautan sebagai tulang punggung perekonomiannya. Meski demikian, masih perlu peningkatan terkait pembiayaan yang inovatif, pemberdayaan perempuan pesisir, pemberdayaan generasi muda di pesisir, dan pengembangan pemerintahan yang baik. *Blue Economy* merupakan paradigma yang memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja dengan menjaga kelestarian ekosistem perairannya.

Kerangka pembangunan *Blue Economy* juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian agenda 2030 pada *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya Tujuan 14 : (*Life Below Water*) melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan serta mendukung Tujuan 7 : (*Renewable Energy*) akses energi yang

terjangkau, berkelanjutan, dan modern untuk semua, Tujuan 8 : (*Good Jobs and Economics Growth*) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, Tujuan 9 : (*Innovation and Infrastructure*) infrastruktur dan industry inklusif yang berkelanjutan, serta inovasi dan Tujuan 17 : (*Partnership for the Goals*) kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia akan sangat diuntungkan oleh *Blue Economy* dengan pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan dengan mempertahankan ekosistem laut yang sehat. Pengalihan sasaran pembangunan ke wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu alternatif pembangunan yang selama ini hanya bertumpu pada sektor pertanian dengan tingkat kejenuhan yang sudah semakin tinggi. Hal tersebut tetap untuk memadukan 3 kepentingan pembangunan yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kualitas sumber daya dan lingkungan. Upaya memadukan ketiga kepentingan tersebut dapat ditempuh melalui penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam konsep *Blue Economy* (Pauli,2010). Hal ini merupakan salah satu yang mendasari peralihan pembangunan dari teresterial ke maritim, juga karena pertimbangan potensi di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, menerapkan ekonomi hijau saja tidak cukup perlu dibarengi dengan konsep ekonomi biru. Oleh karena itu, pemerintah terus mengusung prinsip *Blue Economy* di dalam setiap perencanaan pembangunannya.

Konsep *Blue Economy* relevan untuk diterapkan pada sektor perikanan, melalui pengembangan bisnis yang inovatif dan kreatif berdasarkan prinsi efisiensi di alam,

tanpa adanya limbah yang terbuang, memunculkan kesempatan wirausaha serta menciptakan lapangan kerja dengan kreativitas dan inovasi. Konsep *Blue Economy* ini dimunculkan berdasarkan pengalaman empiris bahwa melalui kreativitas dan inovasi kegiatan ekonomi akan dapat dikelola tanpa merusak lingkungan, sebaliknya dapat menghasilkan suatu manfaat ekonomi serta menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Konsep tersebut diperkenalkan untuk menjawab tantangan, bahwa sistem ekonomi dunia saat ini cenderung eksploitatif dan cenderung merusak lingkungan akibat keserakahan manusia. Kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh limbah dari sumber industri ataupun ibu rumah tangga, tetapi ini juga disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung alam. Melalui pemahaman ini, sumber ekonomi nasional sebaiknya dikelola secara berkelanjutan. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan untuk menerapkan konsep Blue Economy dan membangun perikanan bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam institusi (Arizona, Riniwati, & Harahap, 2013).

Pembangunan yang terus berjalan di ikuti dengan pertumbuhan dan pendirian industri yang semakin meningkat jumlah serta jangkauan di pelosok negeri. Selain berdampak positif pembangunan juga menimbulkan masalah terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan industri yang memanfaatkan sumber daya alam saat ini Sebagian besar tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan, walaupun sektor industri tersebut menjadi penyumbang devisa dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Permasalahan ini dapat diatasi dengan pembangunan industri yang berkelanjutan dengan keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi, ekuitas dan lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan melalui tata kelola industri yang baik, penggantian bahan baku ramah lingkungan, perbaikan proses dan teknologi, pemakaian teknologi bersih dan modifikasi produk yang ramah lingkungan (Hadiwijoyo, Purwanto & Hadi,2013).

Suatu model pendekatan ekonomi yang dihasilkan oleh konsep *Blue Economy* tidak lagi mengandalkan pembangunan yang bersifat kerusakan atau eksploitasi sumber daya berlebihan. *Blue Economy* merupakan pemahaman baru yang mendorong perubahan pola dan struktur pembangunan melalui pemanfaatan lingkungan, sehingga ini merupakan sepak terjal bagi pembangunan dan lompatan baru untuk memahami kondisi ekonomi masyarakat. Melalui rencana meninggalkan praktek ekonomi dengan keuntungan jangka pendek dan menggunakan *low carbon economy* atau ekonomi yang rendah karbon sehingga model dan konsep pendekatan *Blue Economy* ini diharapkan mampu meminimalisir interpendensi antara ekosistem dan ekonomi serta mengatasi dampak negatif seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang merupakan akibat dari aktivitas ekonomi. Sebagai konsep baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan. *Blue Economy* akan mengarahkan pembangunan ekonomi yang seimbang antara upaya pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang sustain dan optimal.

Dalam pembangunan berkelanjutan perlu dikhawatirkan akan munculnya tantangan-tantangan global baru terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan yang menjadi salah satu isu-isu yang tidak ada habisnya. Terlebih bahwa Indonesia dewasa ini sedang dihadap pada sebuah tantangan yang cukup berpotensi dan besar yakni terkait persaingan perdagangan bebas di level wilayah

regional pula *ASEAN Economic Community (AEC)* atau masyarakat ASEAN (MEA). Contohnya adalah : (1) ketidakmampuan Indonesia untuk bersaing akibat kurangnya SDM yang berkualitas di bidang maritim, (2) eksploitasi yang berlebihan sehingga dapat merusak ekosistem alam, (3) kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung sehingga peningkatan ekonomi nasional menurun, (4) ketidaksinkronan antara masyarakat dan pemerintah sehingga menimbulkan ketimpangan kebijakan. Berdasarkan hal itu maka mendasari konsep pembangunan berkelanjutan tersebut memberikan suatu arahan mengenai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang bersinergi dimana merupakan poin penting dari 3 dimensi *sustainable development* dalam aspek pembangunan global ke depan untuk mengatasi kesenjangan masyarakat nasional sekaligus menjawab apakah Indonesia mampu bersaing di kancah regional dan terlibat langsung dengan pasar bebas yang disebut dengan (AEC).

Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo yang berfokus pada pengembangan wilayah maritim sebagai salah satu tujuan negara poros maritim dunia, maka pengembangan terhadap wilayah pesisir perbatasan menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan maritim tersebut. Dengan poros maritim dunia, Indonesia akan menjadi negara dengan identitas maritim yang kuat. Pemberdayaan seluruh masyarakat pesisir dalam sektor poros maritim dapat menjadi faktor pemerataan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan konsep Blue Economy tentu saja dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.

Program Indonesia *Sustainable Oceans (ISOP)* juga mendukung transisi Indonesia ke ekonomi biru (*blue economy*) dengan meningkatkan manfaat

ekonomi, sosial dan lingkungan yang diperoleh dari ekosistem pesisir lautan yang sehat. Program ISOP merupakan kumpulan proyek terkait yang di dukung oleh Bank Dunia (*world bank*). Proyek ini mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan dan adil untuk membangun ekonomi, mata pencaharian pesisir dan kesehatan ekosistem. Sebanyak 70% penduduk Indonesia tinggal di daerah pesisir dan mengandalkan laut untuk pendapatan dan nutrisi (lebih dari 50% protein makanan berasal dari makanan laut) tetapi komunitas ini termasuk yang termiskin. Ekonomi kelautan Indonesia (jumlah dari semua kegiatan yang mengandalkan lautan) bernilai lebih dari \$256 miliar per tahun atau lebih dari seperempat perekonomian nasional. Sumber daya berharga ini membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan penelitian lebih lanjut. Blue Economy juga bertujuan untuk mengurangi polusi kelautan, karena Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, antara 490-860 ribu ton kebocoran plastik ke laut setiap tahunnya. Ekosistem laut membuat kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan, terumbu karang menghasilkan lebih dari \$3 miliar per tahun dalam pendapatan pariwisata serta habitat seperti hutan bakau dan padang lamun menyediakan pembibitan ikan, perlindungan garis pantai dan lainnya. Proyek ini juga memberikan infrastruktur yang cukup baik sehingga dapat mengurangi kehilangan pasca panen (hingga 30% dari total tangkapan) dan mengurangi limbah. Memanajemen panen perikanan menjadi lebih baik dapat menambah 3-5 miliar untuk keuntungan sektor perikanan tahunan.

Tidak diragukan lagi, fungsi sistem bumi yang stabil merupakan prasyarat bagi masyarakat yang berkembang dan pembangunan berkelanjutan. Di Eropa, inisiatif penelitian besar mendukung proyek investasi kelautan untuk *Blue Economy* dan

H2Ocean. Proyek-proyek ini berfokus pada pengembangan platform multi guna dan teknik produksi baru untuk berbagai industri termasuk akuakultur, energi terbarukan laut, pariwisata, rekreasi, dan transportasi laut. Melalui skema dukungan *Blue Economy*, Irlandia telah menjadi yang terdepan dalam hal ini, China juga telah mengidentifikasi kebutuhan untuk mengubah sistem produksi lepas pantai dan lembaga penelitian perikanan Laut China Timur ditugaskan dengan pengembangan budidaya lepas pantai serta Selandia Baru dan Chili sama-sama memulai budidaya perairan lepas pantai dibawah *Blue Economy* (FAQ,2018, Potts et al,2016). Penguatan kerja sama perdagangan maritim antara negara-negara kepulauan, termasuk melalui promosi *Blue Economy* tidak hanya penting untuk menerapkan strategi pembangunan kelautan individu negara-negara kawasan, tetapi juga menguntungkan bagi kemakmuran ekonomi regional. Secara ekologis, kunci pengembangan ekonomi biru adalah bahwa negara-negara harus memanfaatkan sepenuhnya laut sambil menghindari eksploitasi kehidupan akuatik, mencemari ekosistem laut atau terlibat dalam praktik berbahaya lainnya. Untuk itu mereka harus menemukan kompromi antara keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa menguras sumber daya alam.

Ekonomi Biru (*blue economy*) berada dalam dua acara yang saling bersaing yaitu, peluang pertumbuhan dan pembangunan serta ruang-ruang yang terancam dan rentan yang membutuhkan perlindungan (Voyer, dkk,2018). Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi bersifat inklusif dan berwawasan lingkungan, dan menyoroti kebutuhan untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan

berkelanjutan dalam kaitan kelautan (Griggs et al,2013). PBB telah mendeklarasi 2021 hingga 2030 sebagai “Dekade Ilmu Kelautan untuk Pembangunan Berkelanjutan” untuk mendukung upaya membalikkan siklus penurunan kesehatan laut dan mengumpulkan pemangku kepentingan laut di seluruh dunia di belakang kerangka kerja sama. Kerangka kerja ini bertujuan agar ilmu kelautan dapat sepenuhnya mendukung negara-negara dalam menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan laut.

Bank dunia (*world bank*) mengidentifikasi *Blue Economy* sebagai penggunaan berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan dengan menjaga kesehatan ekosistem laut. Kegiatan ini mencakup perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi laut, pengelolaan limbah dan mitigasi perubahan iklim. Jika dikelola secara berkelanjutan, setiap sektor dapat berkontribusi untuk kemakmuran Indonesia. Pesisir Indonesia terdiri dari berbagai bentang alam, mulai dari hutan bakau alami hingga tambak buatan. Dengan demikian, pulau-pulau kecil di kawasan ini juga rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tsunami. Oleh karena itu, bakau sangat berharga untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ekosistemnya yang subur serta rapuh ini membutuhkan perencanaan yang matang dan disitulah konsep *Blue Economy* berguna. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat menyadari potensi tersebut, bahkan pemerintah Indonesia telah bekerja menuju strategi ekonomi biru untuk meningkatkan tata kelola ekosistem laut dan pesisir agar mencapai peluang ekonomi yang sama dan meningkatkan mata pencaharian, termasuk dengan menetapkan target untuk mengurangi sampah laut serta memulihkan dan melestarikan hutan bakau dan lainnya serta bekerja sama

dengan mitra lain untuk lebih memperkuat dan menerapkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. KKP optimis investasi ekonomi biru Indonesia memegang kunci menuju kemakmuran yang berkelanjutan.



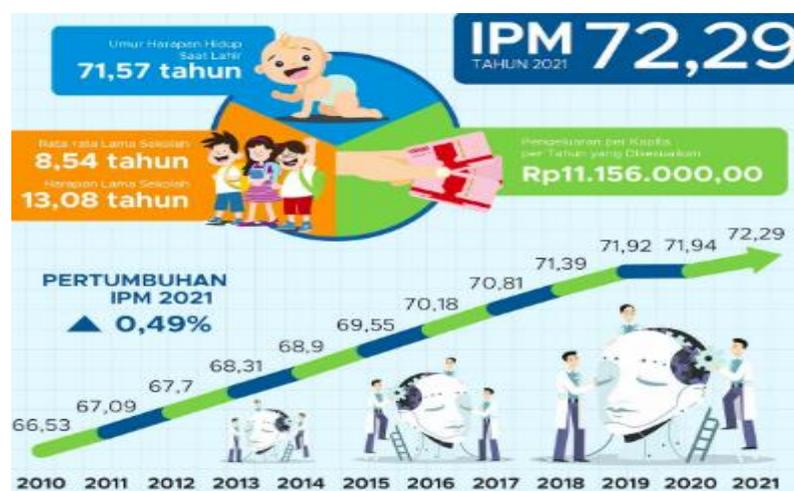
Gambar 1.2 Produk Domestik Bruto Maritim Indonesia, 2016

Sumber: Publikasi Bps (www.bps.go.id)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan di Indonesia terhadap ekonomi bangsa masih sangat jauh dari harapan, yaitu hanya sekitar 6% dari produk domestik bruto Indonesia, semena-mena itu perikanan laut menyumbang sebesar 41,72% pada PDB maritim Indonesia. Potensi nilai total ekonomi sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi nasional maka diplomasi ekonomi perlu ditekankan pada upaya peningkatan nilai tambah sektor perikanan Indonesia, antara lain dengan merumuskan suatu strategi khusus untuk menembus pasar internasional bagi ekspor perikanan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menempati urutan kedua setelah China sebagai negara nelayan terbesar di dunia. Industri komoditas kelautan Indonesia secara langsung melibatkan 2,8 juta rumah tangga, tak heran 54% protein hewani Indonesia berasal dari ikan dan *seafood*. 10% komoditas laut dunia dipasok oleh Indonesia dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan

meningkatnya permintaan akan makanan laut di seluruh dunia. Saat ini sektor perikanan menyumbang 29,6 miliar dalam PDB negara, belum lagi kontribusinya untuk sektor pariwisata dan perlindungan yang tak ternilai harganya.

United Nations Development Programme (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM merupakan salah satu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan 3 dimensi yaitu angka harapan hidup (*life expectancy birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*) dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu faktor-faktor lain seperti ketersediaan lapangan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga indeks pembangunan manusia akan meningkat dan menandakan keberhasilan ekonomi suatu negara.



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, 2010-2021

Sumber: BPS (www.bps.go.id)

Menurut gambar 1.3 indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 mencapai 72,29 meningkat 0,35 poin (0,49%) dibandingkan capaian tahun sebelumnya 71,94.

Selama 2010-2021 IPM Indonesia rata-rata meningkat 0,76% dari 66,53% pada tahun 2010 menjadi 72,29% pada tahun 2021. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan, sejak tahun 2016, status pembangunan manusia di Indonesia meningkat dari level sedang menjadi tinggi setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena COVID-19. Peningkatan IPM Indonesia sudah kembali membaik pada tahun 2021 sehingga dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap konsumsi riil perkapita.

Subsektor perikanan memberi sumbangan terhadap terjadinya kenaikan NTP sebesar 1,69%. Sedangkan peningkatannya NTP terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan yaitu sebesar 4,79%. Sementara indeks harga yang diterima petani ikan (penangkapan) pada tahun 2017 sebesar 125,07 ton. Secara nasional, nilai tukar petani selama Desember 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 1,55%. NTP ini merupakan salah satu komponen mengukur tingkat kesejahteraan petani (BPS, 2018).

Kendala utama pada jasa perikanan ini adalah tingginya angka kemiskinan dan kurangnya pengetahuan dari para nelayan sehingga mereka kurang memanfaatkan IPTEK untuk mengeksplorasi besarnya potensi perikanan. Maka dari itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadikan *sustainable development* yang terkandung di dalam paradigma *Blue Economy* menjadi orientasi baru di dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia serta pembangunan kelautan dan perikanan. Masalah lainnya yaitu penangkapan ikan secara berlebihan

(overfishing) yang terjadi di laut Jawa dan Selat Malaka, kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masalah pendangkalan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan tradisional. Secara sosial ekonomi, kondisi nelayan di Indonesia yang tergolong miskin menjadi realitas yang tak terbantahkan.



Gambar 1.4 Nilai Tukar Rata-rata di Sektor Perikanan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (www.bps.go.id)

Gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa sejumlah indikator kesejahteraan pelaku perikanan termasuk nelayan kembali meningkat dan terus melaju. Nilai rata-rata NTUN sepanjang 2018 mencapai 126,68. Sementara itu, NTN pada waktu yang sama mencapai nilai rata-rata sebesar 113,28. Tak hanya kesejahteraan para nelayan perikanan tangkap, KKP juga berupaya meningkatkan kesejahteraan para pelaut budidaya perikanan, hal ini tampak dari peningkatan NTPi mencapai angka 100,80 dan NTUPi mencapai 113,27 pada 2018.

Pada tahun 2017 volume produksi perikanan tangkap berjumlah sebanyak 7.071.452 ton/tahun dan jumlah produksi perikanan dari perikanan budidaya berjumlah 16.114.991 ton/tahun dalam skala nasional. Padahal dalam perhitungan skala statistik, Indonesia dapat memproduksi hasil perikanan mencapai 65 juta

ton/tahunnya. Potensi perikanan inilah yang selayaknya terus ditingkatkan melihat besarnya potensi sumber daya ikan yang tersedia. Agar masyarakat pesisir menjadi semakin sejahtera (khususnya nelayan) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Disisi lain, guna menjaga ekosistem laut dan menjamin berlangsungnya pasokan perikanan, KKP Bersama pihak terkait telah berhasil menambah capaian luas kawasan konservasi perairan yang sampai tahun 2018 sebesar 20,87 juta Ha atau 6,42% dari total luas perairan Indonesia seluas 325 juta Ha. KKP juga melaksanakan program Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang diluncurkan pada 2017. Pada Maret 2018 tercatat 13 peserta asuransi yang telah melakukan klaim dengan total nilai mencapai Rp346 juta untuk meng-cover setidaknya 69,2 Ha tambak udang yang terbesar di 9 Kabupaten/Kota yang disebabkan kegagalan produksi akibat wabah virus udang dan banjir. Dengan adanya asuransi ini, para pembudidaya diharapkan tidak akan lagi khawatir untuk terus melanjutkan usahanya kala mengalami kegagalan. KKP juga meluncurkan program Gemarikan (Gerakan masyarakat makan ikan) yang menjadi senjata KKP untuk mendorong konsumsi ikan dalam negeri. Alhasil, angka konsumsi ikan nasional secara konstan meningkat, pada 2015, konsumsi ikan nasional tercatat hanya mencapai 41,11 kg perkapita per tahun, pada 2018 prognosis konsumsi itu mencapai 50,69 kg perkapita per tahun. Peningkatan konsumsi ikan yang diketahui sebagai sumber protein dengan harga lebih terjangkau bila dibandingkan dengan daging juga menjadi salah satu senjata pemerintah dalam memerangi *stunting* atau gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak lantaran kekurangan gizi.

Kawasan pesisir Provinsi Sumatera Utara mempunyai panjang pantai 1300 km² yang terdiri dari panjang pantai barat 375 km² dan kepulauan Nias serta pulau-pulau baru sepanjang 350 km². potensi perikanan dan kelautan di Sumatera Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. produk yang dihasilkan dari subsektor ini merupakan sumber pangan alternatif yang kaya akan gizi untuk pemenuhan konsumsi masyarakat di Indonesia. Peranan subsektor perikanan terhadap PDRB Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 2,12% atau sekitar 917.186.756,6 juta.

Tabel 1.1 Produksi Ikan Menurut Hasil Tangkapan Kabupaten/Kota (ton) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Laut	Perairan Umum	Total
Nias	12	0	12
Mandailing Natal	8 495	0	8 495
Tapanuli Selatan	0	34	34
Tapanuli Tengah	297 434	2 065	299 499
Tapanuli Utara	0	34	34
Toba Samosir	0	1 001	1 001
Labuhan Batu	17 361	14	17 375
Asahan	63 176	7 176	70 892
Simalungun	0	693	693
Dairi	0	99	99
Karo	0	11	11
Deli Serdang	39 127	207	39 334
Langkat	8 593	14	8 607
Nias Selatan	62	0	62
Humbang Hasundutan	0	0	0
Pakpak Barat	0	0	0
Samosir	0	4 444	4 444
Serdang Bedagai	28 518	151	28 669
Batu Bara	18 036	2 732	20 768
Padang Lawas Utara	0	207	207
Padang Lawas	0	219	219
Labuhan Batu Selatan	0	122	122
Labuhan Batu Utara	903	0	903

Nias Utara	11 606	0	11 606
Nias Barat	12	0	12
Sibolga	51 977	0	51 977
Tanjung Balai	168 154	0	168 154
Pematang Siantar	0	4	4
Tebing Tinggi	0	2	2
Medan	58 933	56	58 989
Binjai	0	3 289	3 289
Padang Sidempuan	0	19	19
Gunung Sitoli	1 125	0	1 125
Total	764 064	24 154	788 218

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.sumut.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas produksi ikan menurut hasil tangkapan di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 788,218 ton. Kabupaten yang memproduksi ikan dengan jumlah terbesar yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 299, 499 ton, sedangkan Kabupaten yang memproduksi ikan dengan jumlah kecil adalah Tebing Tinggi. Kabupaten LANGkat memproduksi ikan sebanyak 8, 607 ton, Sebagian besar nelayan di Sumatera Utara masih merupakan nelayan tradisional yang memang belum kondusif untuk suatu kemajuan. Sekitar 60% dari 3,7 juta nelayan tergolong miskin dan lebih dari 85% nelayan hanya berpendidikan SD, tidak tamat SD dan buta huruf (Biro Pusat Statistik,2009).

Kabupaten Langkat mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Langkat pada tahun 2017 tercatat sebanyak 55.618,48 ton yang berasal dari 29.559,92 ton perikanan tangkap dan 26.058,56 ton perikanan budidaya (BPS,2019). Kecamatan Brandan Barat merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah nelayan dan pengolahan ikan yang cukup banyak di Kabupaten Langkat karena daerahnya yang dekat dengan wilayah pesisir. Perekonomian masyarakat pesisir terus mengalami tekanan akibat kemiskinan,

ketidakmerataan kesejahteraan, minimnya fasilitas dan adanya kriminalitas. Kondisi lingkungan yang terus mengalami penurunan berdampak pada keberlangsungan kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan di wilayah pesisir akibat pencemaran air, sampah, dan bencana menyebabkan penurunan kualitas lingkungan untuk daya dukung kehidupan. Upaya peningkatan kondisi lingkungan dan ekonomi dapat dilakukan secara bersama-sama oleh umat manusia dengan mengubah perilaku kita dalam mengelola dan merespon terhadap kondisi alam. Kemajuan teknologi dapat membantu manusia untuk menyelaraskan pembangunan yang seimbang dengan karakteristik ekosistem lingkungan serta didukung oleh perilaku dalam perencanaan kehidupan yang berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian alam.

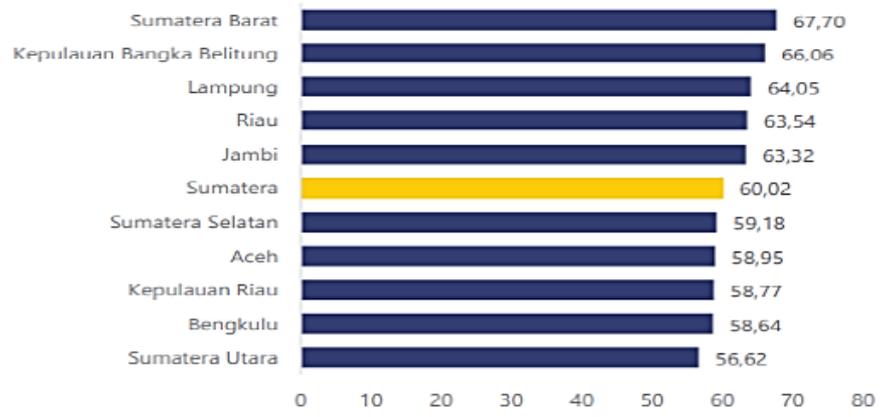
Pengurangan kemiskinan pada masyarakat pesisir memerlukan perubahan paradigma pembangunan dari yang berorientasi teresterial menjadi berwawasan maritim (revolusi biru). Potensi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir cukup besar, dengan potensi tersebut seharusnya dapat mensejahterakan dan menguntungkan kehidupan masyarakat pesisir. Lingkungan pemukiman masyarakat pesisir belum tertata dan terkesan kumuh, melihat kondisi tersebut maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumber daya pesisir kian bertambah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pencemaran lingkungan yang merusak habitat dan ekosistem pesisir berimbas pada matinya biota laut hingga mengurangi kelimpahan sumber daya ikan. Negara belum memiliki instrumen dan proteksi perlindungan bagi nelayan kala mengalami kasus perampasan laut, bencana pencemaran, dan kecelakaan laut. Sektor kelautan dan perikanan juga menimbulkan *multiple effect* yang terbukti mampu menggerakkan sektor lain seperti perdagangan,

industri, bahkan pendidikan yang terkait dengan berbagai riset penelitian dari perguruan tinggi.

Dalam menggambarkan hasil pembangunan dari pinggiran terdapat beberapaindeks yang digunakan diantaranya Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diterbitkan oleh BadanPusat Statistik dan Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Pengukuran IPD terakhir dibangun dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Mei 2018 dan digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks. Sementara IDM adalah indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Indeks ini disusun mulai tahun 2015 dengan memberdayakan seluruh desadi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam menghasilkan data yang akurat.

Melalui IPD, pembangunan desa yang ditargetkan RPJMN 2015-2019, mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Dengan amanat tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi desa mandiri, desa berkembang dan desatertinggal. Pembangunan desa di Indonesia terjadi secara nasional, desa yang tergolong dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan adatiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional, ketiga pulau tersebut adalah Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali.

Sementara empat pulau lainnya berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.



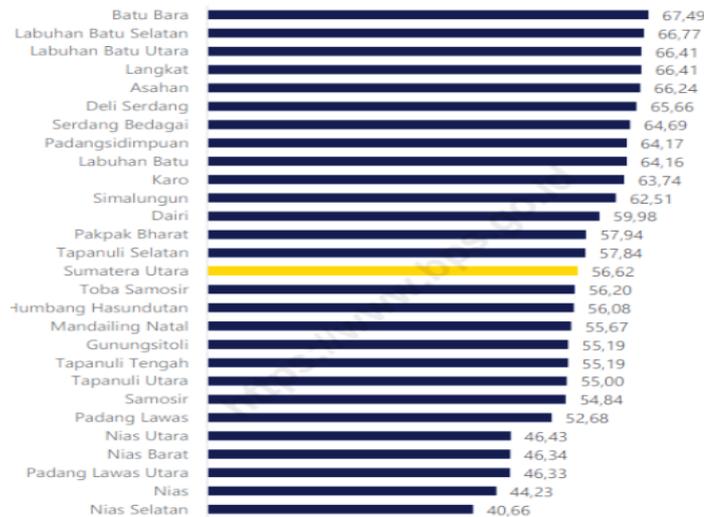
Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Desa di Pulau Sumatera, 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui kondisi perkembangan desa di Pulau Sumatera memiliki nilai IPD tertinggi adalah Provinsi Sumatera Barat dengan nilai indeks 67,70, di ikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 66,06 serta Provinsi Lampung dengan nilai 64,05. Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Desa terendah beradadi Provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 56,62.

Kondisi perkembangan desa di Sumatera Utara memiliki rata-rata nilai Indeks Pembangunan Desa sebesar 56,62437 desa, angka ini masih dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 59,36. Dari 5.437 desa, terdapat 3.768 desa dalam kategori berkembang (69,30%), sebanyak 200 desa mandiri (3,68%) dan sisanya sebanyak 1.469 desa (27,02%) dalam kategori tertinggal. Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Sumatera Utara memiliki nilai rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastuktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 41,71, untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks adalah sebesar 54,94, dimensi

pelayanan umum sebesar 49,67 dan dimensi penyelenggaraan pemerintah sebesar 62,43.



Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Menurut gambar 1.6 diatas rata-rata Indeks Pembangunan Desa tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terdapat pada Kabupaten Batu Bara dengan angka 67,49. Sedangkan kabupaten Langkat berada di posisi ke-empat dengan angka 66,41 sama seperti Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rata-rata nilai indeks terendah di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Nias Selatan dengan rata-rata nilai indeks sebesar 40,66.

Indeks Desa Membangun yang dibuat oleh PDTT merupakan indeks yang memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Perangkat indikator dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju menjadi desa yang maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan

dimana aspek sosial,ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Tabel 1.2 Nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sumatera Utara

Provinsi/Kabupaten	Average of IKS 2019	Average of IKE 2019	Average of IKL 2019	Average of Nilai IDM	Jumlah Desa	Status Kabupaten
Sumatera Utara	0.6581	0.4639	0.6373	0.5864	5.417	Tertinggal
Kota Padang Sidempuan	0.7480	0.5738	0.6429	0.6549	42	Berkembang
Labuhan Batu Selatan	0.7897	0.5609	0.6051	0.6519	52	Berkembang
Deli Serdang	0.7425	0.5440	0.6535	0.6467	380	Berkembang
Langkat	0.7546	0.5215	0.6531	0.6430	240	Berkembang
Asahan	0.7401	0.5250	0.6512	0.6388	177	Berkembang
Karo	0.7042	0.5382	0.6674	0.6366	259	Berkembang
Serdang Bedagai	0.7399	0.5175	0.6523	0.6366	237	Berkembang
Batu Bara	0.7450	0.4991	0.6653	0.6364	141	Berkembang
Pakpak Barat	0.7304	0.5010	0.6757	0.6357	52	Berkembang
Simalungun	0.7116	0.5347	0.6561	0.6342	386	Berkembang
Labuhan Batu	0.7720	0.5096	0.6196	0.6357	75	Berkembang
Labuhan Batu Utara	0.7443	0.4876	0.6016	0.6112	82	Berkembang
Samosir	0.6899	0.4870	0.6417	0.6062	128	Berkembang
Humbang Hasundutan	0.6635	0.4832	0.6580	0.6016	153	Berkembang
Tapanuli Selatan	0.6761	0.4933	0.6123	0.5939	211	Tertinggal
Toba Samosir	0.6588	0.4841	0.6251	0.5893	231	Tertinggal
Dairi	0.6328	0.4870	0.6257	0.5818	161	Tertinggal
Padang Lawas	0.6122	0.4603	0.6506	0.5744	303	Tertinggal
Kota Gunung Sitoli	0.6107	0.4298	0.6783	0.5729	98	Tertinggal
Tapanuli Tengah	0.6175	0.4463	0.6302	0.5647	159	Tertinggal
Tapanuli Utara	0.6355	0.4453	0.6072	0.5627	241	Tertinggal
Mandailing Natal	0.6159	0.4539	0.6122	0.5607	377	Tertinggal
Padang Lawas Utara	0.5851	0.4008	0.6358	0.5406	386	Tertinggal
Nias	0.5756	0.3287	0.6298	0.5114	170	Tertinggal
Nias Utara	0.5637	0.3281	0.6333	0.5084	112	Tertinggal
Nias Selatan	0.5321	0.3249	0.6311	0.4960	459	Tertinggal
Nias Barat	0.5439	0.3217	0.5416	0.4691	105	Sangat Tertinggal

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Menurut tabel 1.2 pada tahun 2019 IDM Provinsi Sumatera Utara memiliki 14 kategori kabupaten berkembang, 12 kategori tertinggal dan 1 kabupaten yang sangat tertinggal. Nilai IDM tertinggi dipegang oleh Kabupaten Padang Sidempuan dengan nilai 0.6549 yang termasuk kategori berkembang. Sedangkan kabupaten Langkat berada di peringkat ke-empat dengan memiliki nilai 0.6430 yang juga termasuk kategori berkembang. IDM dengan kategori sangat tertinggal terdapat pada Kabupaten Nias Barat dengan nilai 0.4691.

Selain potensi perikanan, Indonesia juga mempunyai hutan mangrove yang harus dikembangkan. Hutan mangrove merupakan ekosistem pendukung utama kehidupan yang penting pada sektor kelautan di wilayah pesisir, mangrove mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrient bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, penahan amukan angin topan dan tsunami. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang penting seperti penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahanbaku obat-obatan dan lainnya (Dahuri, Rais, Ginting & Sitepu, 1996). Mangrove juga menjadi salahs itu solusi yang sangat penting untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh rusaknya habitat untuk hewan dan manusia, mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar (Ana, 2015). Sekitar 80% hasil ikan tangkap di dunia bergantung pada hutan mangrove baik secara langsung ataupun tidak, akarnya yang rapat dan lingkungan vegetasi di sekitarnya bereperan penting untuk meyaring air kotoran dan polutan lainnya untuk menghasilkan air bersih. Hutan mangrove mampu menyimpan karbon 3-5 kali lebih banyak.



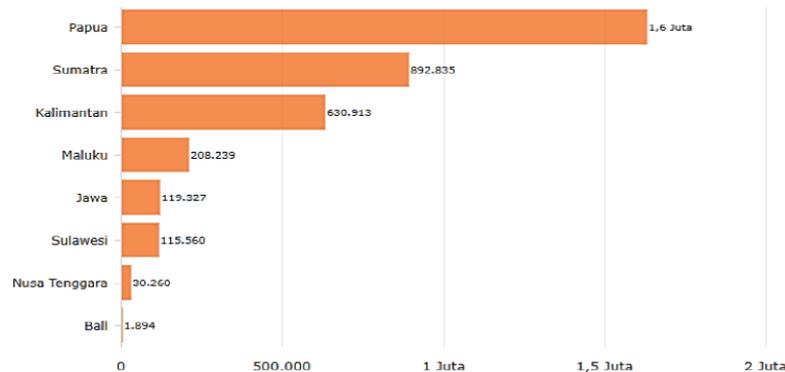
Gambar 1.7 Kondisi Mangrove Indonesia, 2021

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (www.KKP.go.id)

Berdasarkan gambar 1.7 diatas total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, dengan kondisi mangrove lebat seluas 3.121.239 (93%), mangrove sedang seluas 188.363 Ha (5%) dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (2%). Adapun focus pemerintah dalam melakukan rehabilitasi kawasan mangrove berada pada mangrove dengan kondisi tutupan yang jarang. Namun, pada saat ini kondisi mangrove tidak begitu baik, di Indonesia dalam kurun waktu 3 dekade terakhir adalebih dari 50% wilayah hutan mangrove yang hilang.

Hal ini cukup menyedihkan karena Indonesia pernah di kenal sebagai negara dengan lahan mangrove terbesar di dunia dengan luas 3,5 juta Ha atau sekitar 20% dari total dunia. Penyebab kerusakan mangrove sebagian berasal dari manusia, terutama akibat konversi lahan untuk budidaya perikanan dan pertambakan yang merugikan lingkungan. Hutan mangrove di Indonesia mulai lenyap sekitar 1 juta Ha antara tahun 1969-1980 (Bappenas, 1993). Konversi hutan mangrove di Jawa Timur banyak digunakan sebagai kawasan berbasis komersial, keadaan tersebut memicu kerusakan hutan mangrove sebesar 40%. Fenomena ini memicu turunnya kualitas lingkungan pesisir sehingga berdampakpada terganggunya ekosistem dan lebih dari 50% kawasan tidak berfungsi dengan optimal. Hilangnya hutan

mangrove juga disebabkan oleh konversi lahan ke tambak sawah dan pelabuhan serta aktivitas pengembangan lainnya seperti perumahan, hotel, dan sebagainya



Gambar 1.8 Luas Ekosistem Mangrove Berdasarkan Pulau di Indonesia Tahun 2021

Sumber: Kata Data (www.katadata.com)

Berdasarkan gambar 1.8 diatas, luas ekosistem mangrove di Pulau Papua merupakan mangrove terluas di Indonesia dengan luas ekosistem 1,63 juta Ha. Sementara itu, Pulau Sumatera berada di peringkat ke dua dengan luas ekosistem 630.913 Ha. Sementara itu, Pulau Bali menjadi pulau dengan luas ekosistem mangrove terkecil yaitu seluas 1.849 Ha. Sekitar 3 juta hektar hutan mangrove tumbuh di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia, jumlah ini mewakili 23% dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia (giri et al, 2011).

Degradasi hutan mangrove disebabkan karena nilai ekonomi hutan mangrove yang sangat penting, sehingga terjadi perubahan komposisi tumbuhan dalam hutan mangrove. Pengembangan ekowisata pada hutan mangrove sebaliknya merusak ekosistem mangrove, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; (1) penebangan banyak dilakukan pada jenis mangrove yang memiliki akar yang kuat dan tahan terhadap terjangan air laut, (2) minimnya control penanaman mangrove pada kawasan ekowisata, (3) sarana dan prasarana yang dikembangkan seperti suara mesin perahu yang dikembangkan untuk wisatawan mengganggu habitat burung

pemakan serangga di pantai timur, (4) desain pengembangan ekowisata yang tidak berpihak pada petani lokal. Upaya pengembangan ekowisata seakan menjadi bentuk tindakan pemusnahan ekosistem mangrove, hal ini berdampak negatif bukan hanya pada ekosistem mangrove namun juga berimbas pada rusaknya ekosistem lainnya yang bergantung pada keberadaan mangrove, seperti ekosistem ikan dan udang yang menjadikan mangrove sebagai tempat reproduksi, ekosistem burung-burung yang bermigrasi pada pohon mangrove. Sedangkan permasalahan lainnya yang akan timbul yaitu meluasnya tindakan ilegal masyarakat yang menjadikan kawasan tambak ikan dan udang.

Kawasan hutan bakau di pantai timur Provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami penyusutan, mirisnya dalam kurun waktu tiga dekade hutan bakau di pantai timur Sumatera Utara mengalami penyusutan hingga 60%. Hutan bakau dikawasan tersebut terus terdegradasi dan hialng karena beralih fungsi menjadi tambak ikan serta udang dan perkebunan kelapa sawit hingga semak belukar lantaran penebangan liar terhadap tumbuhan mangrove untuk dijadikan arang. Mulai dari Aceh Timur sampai ke Deli Serdang kawasan ini sudah kehilangan mangrove dalam kurun waktu 30 tahun terakhir sebesar 60%. Penebangan liar dengan intensitas yang tinggi terjadi di sekitar Kabupaten Langkat, kawasan ini menjadi daerah di Sumatera Utara yang paling besar menyumbang hilangnya hutan bakau dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Kerusakan hutan bakau tidak sebanding degan program rehabilitasi yang selama ini dilakukan, kehilangan hutan bakau jauh lebih besar daripada program memulihkannya. Hal ini membuat tren Sumatera Utara baik di luar atau dalam kawasan konservasi luas hutan bakau terus berkurang, kerusakan hutan mangrove juga menyebabkan 66% jenis ikan jadi sulit

tertangkap. Akibatnya dari sisi pendapatan nelayan berkurang lebih dari 40% , sejak 20 tahun terakhir penurunan luas tutupan hutan di pantai timur Sumatera Utara dapat diklasifikasi yaitu perkebunan kelapa sawit berperan sebanyak 45% dalam penurunan status kawasan hutan bakau, lalu tambak sebesar 35%, pertanian sebanyak 25% dan hal lain seperti abrasi, dapur arang, reklamasi tambang pasir itu 5% (WALHI,2020).

Hutan mangrove terluas di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat dengan luas 11.709,16 Ha pada tahun 2010 dan terjadi perubahan luasan hutan mangrove pada seluas 25.816,01 (Restu, 2012). Perubahan luasan hutan mangrove terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Langkat dengan luas perubahan yang berbeda-beda. Keadaan mangrove yang mengalami kerusakan yang cukup parah berdampak pada kelompok nelayan yang kesulitan dalam berusaha mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum kerusakan hutan mangrove (Purwoko, 2005). Pembangunan wilayah pesisir harus mengintegrasikan keberlanjutan fungsi ekologi dan fungsi ekonomi. *Blue Economy* merupakan model ekonomi strategis yang dapat di implementasikan pada kawasan wilayah pesisir, konsep *Blue Economy* berorientasi pada empat prinsip yaitu; (1) kekuatan dan potensi wilayah tersebut, (2) nilai tambah ekosistem mangrove dapat menunjang pembangunan wilayah pesisir, sehingga industri yang dikembangkan pada kawasan konservasi mangrove berbasis pada perikanan, perairan dan produk olahan mangrove, (3) pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat secara mikro, (4) prinsip berkelanjutan, konsep pembangunan kawasan wilayah pesisir pantai timur khususnya Kabupaten Langkat harus mengintegrasikan komponen ekonomi,

ekologi,dan sosial secara adil sehingga terjamin pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sumber daya kelautan di pesisir Kabuapten Langkat Kecamatan Brandan Barat menguji terkait faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi konsep *Blue Economy* dalam mensinergikan kebijakan ekonomi sebagai implementasi SDGs untuk meraih target global Indonesia dan memajukan ekonomi masyarakat pesisir yang diharapkan terintegrasi dengan prinsip pengolahan serta tata kelola lembaga pengelolaan sumber daya yang baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan serta perbaikan sumber daya bagi masyarakat pesisir. *Blue Economy* di harapkan mampu menjadi referensi atas model pembangunan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat yang meinitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan, namun menghasilkan produk dengan nilai yang lebih besar, kepedulian sosial dan tanpa limbah. Sehingga dengan hal ini Indonesia mampu menjadikan konsep Blue Economy menjadi landasan paradigma untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan mampu mengolahnya sehingga dapat dijadikan aspek yang mendukung tingkatan ekonomi ASEAN.

Dengan potensi perikanan dan kelautan di Indonesia dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep *Blue Economy* dalam mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara baik dan benar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2. Tingkat kesejahteraan pelaku perikanan (nelayan), masih dibawah sektor-sektor lain padahal menurut data statistik Indonesia mampu memproduksi ikan sebanyak 65 juta ton/tahun.
3. Tingginya angka kemiskinan dan kurangnya pengetahuan dari para nelayan sehingga para nelayan kurang memanfaatkan IPTEK untuk mengeksplorasikan besarnya potensi perikanan dan kelautan.
4. Banyaknya pencemaran lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan yang terjadi di pesisir pantai yang berdampak pada matinya biota laut serta mengurangi kelimpahan sumber daya kelautan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga dan melestarikan hutan bakau (mangrove) dan menyebabkan hilangnya sumber daya mangrove
6. Konsep SDGs dan *Blue Economy* yang diberikan pemerintah tidak dilakukan atau kurang diperhatikan sebagai landasan untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan tanpa merusak ekosistemnya.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada potensi sumber daya alam daerah pesisir pada sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat di Desa Perlis dan Desa Kelantan serta mengidentifikasinya dengan konsep *Blue Economy*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka dapat diuraikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan potensi ekonomi sumber daya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep *Blue Economy* Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja indikator yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun di Kab. Langkat?
3. Bagaimana tahapan pembuatan *Blue Print* pembangunan ekonomi *Waterfront Village* di Desa Perlis dan Kelantan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis potensi ekonomi sumber daya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep *Blue Economy* di Kabupaten Langkat
2. Melakukan estimasi model ekonometrika terhadap indikator-indikator yang berpengaruh terhadap Indeks Desa Memabangun (IDM)
3. Mengidentifikasi dan membuat *Blue Print* sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan agar tepat sasaran menuju *Smart Village*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi bahan acuan dengan pembahasan potensi ekonomi wilayah pesisir.

1. Manfaat Akademik

- a. Bagi peneliti, sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut tema yang sama dan sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.
- b. Bagi mahasiswa, melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis dan sistematis. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait, serta hasil penelitian ini dijadikan untuk memenuhi syarat mendapat gelar sarjana ekonomi pada jurusan ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Non-akademik

- a. Sebagai bahan masukan dan penetapan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006)

Sedangkan menurut Kuznets (Jhingan, 2010) pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis-jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian lembaga dan ideologis yang diperlukan

Menurut Hollis B.Chenery (Todaro & Smith, 2011), pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, dimana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi dinegara berkembang adalah transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern, secara umum dapat didefinisiakn

sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan per kapita.

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of the Nation* ditandai oleh 2 faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

- a. Pertumbuhan output, sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu:
 1. Sumber daya alam
 2. Sumber daya manusia
 3. Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun. Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan

sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini dicapai.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output. Unsur ini di anggap mempunyai peranan pasif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan output. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi dalam proses pertumbuhan output. Apa yang terjadi dengan tingkat output juga tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan output juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

b. Pertumbuhan Penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam membangun ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan

spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan utama terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Richard yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan (Kuncoro, 2000). Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah tanah yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat

- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi
 - e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan
3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikan masalah pertambahan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus, secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat daripada suplai makanan. Produksi makanan per kapita tentu saja akan mengalami penurunan, sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus membeberkan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan, seperti bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan riilnya akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) masyarakat secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan yang demikian akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*Theory of underconsumption*) (Boediono, 2009).

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masing relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara

berkembang ialah segi intuisi yang bersifat sosiologis-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi dibelahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia (Boediono, 2009).

Pandangan yang dangkal tetapi popular itu kebenarannya dibantah oleh Malthus. Malthus menunjukkan kepada kenyataan institusional dalam tata susunan ekonomi masyarakat yang menjadi kendala besar bagi kemajuan ekonomi rakyat. Keterbelakangan dan kemiskinan penduduk di negara-negara yang dimaksud bukanlah disebabkan oleh terbatasnya tanah subur atau semakin kecilnya luas tanah karena penduduk bertambah, bukan pula oleh “kemalasan” penduduk. Kemiskinan itu ada sangku-pautnya pada kenyataan bahwa tanah yang sangat luas dikuasai oleh segelintir kalangan atas dalam masyarakat yang terdiri dari sejumlah keluarga tuan tanah. Konsentrasi kepemilikan dan penguasaan tanah serupa itu tidak memberikan dorongan dan sama sekali tidak mengandung perangsang bagi petani penggarap tanah untuk mencari kemajuan dengan cara meningkatkan hasil produksinya, apalagi dengan cara melakukan investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar hasil produksi tanah dinikmati oleh tuan tanah, sedangkan hasil produksi masyarakat kecil (golongan lemah) lebih diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan hanya sebagian kecil yang di investasikan (Boediono, 2009)

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung dalam gagasan-gagasan para pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam pemikiran Karl Max, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang-kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang terkenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dari polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut (Boediono, 2009).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian pula sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi, yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat di jembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat turun lebih rendah dari pada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung terhadap investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bila mana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasikannya lebih besar. Suku

bunga yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun.

Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat menyebabkan kenaikan pada pekerjaan dan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan dan karena pendapatan meningkat muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (Kumulatif). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi (Jhingan, 2010).

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali, ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K dikali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya adalah

$$\Delta Y = K \Delta I \text{ dan } 1-1/K \dots\dots\dots(2-1)$$

Mewakili kecenderungan marginal konsumsi, jadi pengali

$$K= 1/1-MPC \dots\dots\dots(2-2)$$

Karena kecenderungan marginal berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan (Jhingan, 2010).

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam "*General Theory*"-nya. Pembuatan model diserahkan pada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson danlainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul "*Economic Possibilities for Our Grand Children*" Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (1) kemampuan kita mengendalikan penduduk, (2) kebulatan tekad menghindari perang perselisihan sipil, (3) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan (4) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan dan kapitalisme, Keynes bersifat optimis bahwa kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan daya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan (Jhingan, 2010).

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

1. W.W. Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan W.W.Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal* pada maret 1956 berjudul *The Take-Off Into Self Sustained Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap, yaitu tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus menerus (Boediono, 2009).

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminology "*less develop*" untuk menyebutkan kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminology "*more develop*" untuk menyebut kondisi suatu negara yang telah mencapai tahap industrialisasi dengan menandalkan sektor kapitalis modern. Dalam hal prekondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses dimana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap lainnya. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat *unilinier* dan *universal*, serta dianggap bersifat permanen. Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan barat. Para pakar ekono

menganggap bahwa teori pertumbuhan ekonomi ini merupakan contoh terbaik dari apa yang diistilahkan sebagai “teori modernisasi” (Kuncoro M, 2000)

Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap:

1. Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*)
 2. Masyarakat prekondisi untuk periode lepas landas (*The preconditions for Take Off*)
 3. Proses lepas landas (*The Take-Off*)
 4. Gerak menuju kedewasaan (*Maturity*)
 5. Tingkat konsumsi tinggi (*High Mass Consumption*)
2. Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis) (Boediono, 2009). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi:

- a. Perekonomian bersifat tertutup
- b. Hasrat menabung ($MPS=s$) adalah konstan
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*Constant return to scale*)

- d. Tingkat pertumbuhan Angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud ini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari 2 sektor ($Y = C + I$). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut:

$$G = K = n \dots\dots\dots(2-3)$$

Dimana : $G = Growth$ (tingkat pertumbuhan output)

$K = Capital$ (tingkat pertumbuhan modal)

$n =$ tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campuran tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

D. Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam

menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP).

Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang di produksi dalam sebuah negara pada suatu periode. Dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur 2 hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil perekonomian (Mankiw, 2007). Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

a. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung pendapatan domestik bruto yang mengukur pendapatan seperti sewa, upah, bunga, dan laba, yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung pendapatan domestik bruto yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c. Pendekatan produksi

Pendekatan produksi adalah metode menghitung pendapatan domestik bruto yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

2.1.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan bisa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (income per kapita) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (Gross National Income, GNI) per kapita “riil” (pertumbuhan moneter dari GNI per kapita di kurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan, seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakatan dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011). Menurut Sumitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu

perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Sanusi, 2004).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan dan pengumpulan modal, pembentukan modal meliputi modal materil maupun modal manusia. Agar berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka, karyanya yang sangat terkenal adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* yang diterbitkan pada tahun

1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis, namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a. Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan, (1) meningkatnya keterampilan pekerja, (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang, (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu

kecenderungan tukar menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya, akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan bahwa pemupukan modal harus dilakukan lebih dulu daripada pembagian tenaga kerja. Ia menulis “karena kemampuan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan”. Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The*

Principles of Political Economy and Taxation, buku ini diterbitkan pada tahun 1917, edisi ke tiga tahun 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide-ide Ricardo menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu analisa Ricardo merupakan analisa yang memutar, asumsi Ricardo yaitu teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa:

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
2. “*Law of Diminishin Return*” berlaku bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap
4. Permintaan akan gandum benar-benar elastis
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variable
6. Keadaan pengetahuan teknik adalah teretntu (given)
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal dan harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja
10. Terdapat persaingan sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian yaitu, tuan tanah,

kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi-bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam pendahuluan bukunya, “hasil bumi (yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisme dan modal) dibagi-bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah dan para buruh yang mengerjakannya”. Keseluruhan pendapatan nasional dibagi-bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing-masing sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah (Jhingan, 2010)

B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori pembangunan ekonomi Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan bahwa upah yang berlaku di sektor modern, yaitu pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya, fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*, kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu

besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama, dengan demikian nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, dimana sektor yang berperan penting adalah sektor industri, ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dan input yang digunakan termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif, dengan demikian perekonomian di perkotaan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri perkotaan masih menyediakan lapangan kerja dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan urbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan

sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut.

C. Teori pembangunan Ekonomi Hollis B.Chenery

Analisa teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B.Chenery tentang transformasi sektor produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan pendapatan perkapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan dengan akumulasi capital dan peningkatan sumber daya manusia (Human Capital) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan

tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir proses transformasi struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun mulai meningkat dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa transisi. Dengan demikian, produktivitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan (Todaro & Smith, 2011).

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, dimana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu, sektor pedesaan yang di tinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika di ikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk dan penurunan derajat dualism ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan yang terjadi secara simultan (Todaro & Smith, 2011)

D. Teori Pembangunan Ekonomi Rei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Rei-Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh dan disertai perekonomian yang miskin sumber daya, dimana sebagian besar penduduk yang tinggi ekonomi pertaniannya berhenti . kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang-bidang non pertanian memang ada, tetapi begitu banyak mempergunakan

modal. Disitu juga ada sektor industri yang aktif dan dinamis, pembangunan terdiri dari pengalokasian kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian yang sumbangannya terhadap output adalah nol atau dapat diabaikan ke sektor industri dimana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian. Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Rei dan Ranis membuat asumsi sebagai berikut:

1. Ada ekonomi dua muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg dan sektor industri yang aktif
2. Output sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh saja
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi)
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap
5. Kegiatan pertanian yang ditandai dengan hasil (return to side) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel
6. Diasumsikan bahwa aproduktivitas marginal buruh adalah nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi pengeluaran pertanian
7. Output sektor industri adalah fungsi modal dan buruh saja
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen
9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk pertanian

Berdasarkan asumsi ini, Reidan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus buruh menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama para penganggur tersamar yang tidak menambah output pertanian dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama, pada tahap kedua pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh, pada tahap ketiga menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan sasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial

2.1.3 Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi suatu wilayah dengan wilayah lain. Sebetulnya sangat sulit meletakkan posisi ilmu ekonomi regional dalam kaitannya dengan ilmu lain, terutama dengan ilmu bumi ekonomi (*economic geography*). Hal inilah yang menyebabkan banyak buku ilmu ekonomi tidak memberikan definisi tentang ilmu tersebut. Ilmu bumi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang yang berlaku umum. Prinsip-prinsip ini yang dipakai dalam membuat kebijakan pengaturan penggunaan ruang wilayah yang efektif dan efisien berdasarkan tujuan umum yang hendak dicapai.

Hal-hal yang dibahas dalam ilmu bumi ekonomi, antara lain mengenai teori lokasi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ilmu ekonomi regional termasuk salah satu cabang yang baru dari ilmu ekonomi. Walter Isard adalah orang pertama yang dianggap dapat memberi wujud (landasan yang kompak) atas ilmu ekonomi regional, IER baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di yang berjudul *Location and Space Economics* pada tahun 1956. Walter Isard adalah orang yang pertama memberi kerangka landasan tentang apa saja yang dikategorikan ke dalam Regional Science, yang pada dasarnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang memiliki potensi yang berbeda. Ahli ekonomi menganggap hasil karya Walter Isard masuk kategori ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi ini baru masuk ke Indonesia pada awal tahun 1970-an karena pemerintah menyadari pentingnya pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian dari cara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Artinya, pemerintah mulai menyadari bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh dibuat seragam untuk semua daerah, padahal kondisi dan potensi daerah itu tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Tujuan ilmu ekonomi regional sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Tujuan utama kebijakan ekonomi adalah (1) *full*

employment, (2) *economic growth* dan (3) *price stability*. Uraian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menciptakan *full employment* atau setidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri/status bagi yang bekerja.
2. Adanya *economic growth*, karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.
3. Terciptanya *price stability* untuk menciptakan rasa aman/tenang dalam perasaan masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa waswas, misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilai riil atau manfaat berkurang di kemudian hari.

Ada di antara tujuan ekonomi yang tidak mungkin dilakukan daerah (permintaan daerah) apabila daerah itu bekerja sendiri untuk menstabilkan tingkat harga. Namun, apabila daerah itu dapat memenuhi tujuan pertama dan kedua, hal itu turut membantu pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan ketiga. Namun di lain sisi, daerah karena wilayahnya yang lebih sempit dapat membuat kebijakan yang lebih bersifat spasial sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih baik ketimbang oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang bisa diatur di daerah secara lebih baik, yang merupakan tujuan pokok tambahan yaitu terjaganya kelestarian lingkungan hidup, pemerataan pembangunan

dalam wilayah, penetapan sektor unggulan wilayah, membuat keterkaitan antarsektor yang lebih serasi dalam wilayah sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan, dan pemenuhan kebutuhan pangan wilayah.

Manfaat ilmu ekonomi regional dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat makro dan manfaat mikro. Manfaat makro dapat dikemukakan ditinjau dari sudut pemerintah pusat masing-masing wilayah memiliki potensi wilayah yang berbeda, dari sudut potensi masing-masing wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dan bisa dimanfaatkan untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Dari sudut tingkat pendapatan, masing-masing wilayah memiliki tingkat pendapatan yang berbeda, wilayah dengan tingkat pendapatan rendah memiliki MPC (*marginal propensity to consume*) yang tinggi, hal ini bisa digunakan untuk meningkatkan efek pengganda (*multiplier effect*) dari pengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan manfaat mikro, ilmu ekonomi regional membantu perencana wilayah dalam menentukan dibagian wilayah mana suatu kegiatan/proyek itu sebaiknya di bangun, tetapi tidak sampai menunjuk lokasi konkret dari proyek tersebut. Dengan demikian, mungkin ada yang mempertanyakan apa manfaat IER, karena tidak mampu langsung menunjuk lokasi. Seorang perencana wilayah berhadapan dengan wilayah yang begitu luas. Apabila langsung ingin mendapat jawaban dimana site-nya, ia harus melakukan survey terhadap keseluruhan wilayah. Hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar, IER memiliki alat analisis yang bisa menunjukkan bagian wilayah mana kegiatan seperti itu memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, bagian

wilayah yang perlu di survey secara rinci di persempit untuk menghemat waktu dan biaya.

Harry W. Richardson (terj. Paul Sihotang, 1997) mulai membicarakan ekonomi regional dengan lebih dahulu membahas teori untuk wilayah yang bersifat homogen kemudian dilanjutkan dengan membahas wilayah nodal. Dalam membahas daerah homogen juga dibicarakan berbagai teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah dikutip dari teori ekonomi umum dengan modifikasi seperlunya agar lebih pas untuk membahas ekonomi wilayah. Ada pula teori yang dikembangkan khusus dalam ilmu ekonomi regional, seperti teori basis ekspor dan kaitan ekonomi antar wilayah. Dalam pembahasan daerah nodal, sebagian besar menggunakan materi yang dicakup dalam teori lokasi. Teori lokasi dikembangkan oleh para ahli ilmu bumi ekonomi namun jangan di lupakan bahwa teori lokasi pada mulanya dibangun oleh para ekonomi kemudian dikembangkan oleh para *geographer* dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip ekonomi.

Edgar M. Hoover (terj. Aditiawan Chandra, 1977) umumnya menggunakan pandangan teori ekonomi umum yang digunakan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah dan hubungan ekonomi antar wilayah.

Avrom Bendavid (1974) memulai dengan materi yang umumnya tercakup dalam teori ekonomi makro seperti teori nilai tambah dan analisis input-output yang diterapkan untuk ekonomi wilayah dan kemudian dilanjutkan dengan teori yang khusus dikembangkan dalam ilmu ekonomi regional seperti analisis *shift-share* dan teori basis ekspor.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia) pada tahun 1996 yang kemudian berlanjut setiap tahun. Inti semua laporan ini yang dimulai tahun 1990 adalah pembuatan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) (Todaro & Smith, 2011). Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar kualitas hidup mencakup:

1. Umur panjang dan Sehat

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup . perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang

digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP yaitu angka yang tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan, dalam hal ini indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. Kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentukan IPM. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya adalah 0. Nilai 100

menggambarkan kondisi 100% atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya

3. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup yang layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indikator ini juga dipengaruhi lebih pengetahuan serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga menghasilkan output baik berupa barang maupun jasa sebagai pendapatan, kemudian pendapatan yang ada menciptakan pengeluaran atau konsumsi. Pengeluaran perkapita memberikan gambaran tingkat daya beli PPP (*Purchasing Power Parity*) masyarakat dan sebagai salah satu komponen yang digunakan dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus di hitung indeksinya, formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = x = \frac{X(i) - x(\text{min})}{X(\text{maks}) - X(\text{min})} \dots \dots \dots (2.4)$$

Keterangan: (i) = Komponen IPM ke-i

(min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke-i

(maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain

yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), kedua IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, ketiga bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Desa (DAU)(www.ipm.bps.go.id).

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah
2. $60 \leq IPM \leq 70$: IPM sedang
3. $70 \leq IPM \leq 80$: IPM tinggi
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi

IPM yang lebih kecil maka dikategorikan sebagai wilayah dengan IPM rendah. Untuk IPM bersekitar antara 60 sampai 70 maka dikategorikan sebagai wilayah dengan IPM sedang. Akan tetapi, jika IPM bersekitar 70 sampai dengan 80 dikategorikan termasuk IPM tinggi. Sedangkan, untuk yang memiliki IPM yang 80 keatas maka wilayah tersebut termasuk memiliki IPM yang sangat tinggi (www.ipm.bps.go.id).

B. Indeks Pembangunan Desa (IPD)

Indeks pembangunan desa merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil pendataan Potensi Desa (podes) yang

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada Mei 2018. Melalui komponen penyusunannya, IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup lima dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan mandiri. Desa yang mandiri dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera. Pelaksanaannya diatur dalam RPJMN 2015-2019 yang merupakan desa menjadi sasaran kemajuan wilayah. Tujuannya untuk, (1) memetakan kondisi desa di Indonesia berdasarkan tingkat pengembangannya, (2) menetapkan target pembangunan dalam 5 tahun kedepan yang harus dicapai secara bersama-sama oleh para pelaku pembangunan desa, (3) memotret kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan di desa. Mewujudkan amanah tersebut, diperlukan ukuran yang diwujudkan dalam Indeks Pembangunan Desa (IPD). Melalui IPD, pembangunan desa target RPJMN 2015-2019 mengamanahkan berkurangnya desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, serta peningkatan desa mandiri sebanyak 2.000 desa. Atas dasar tersebut maka desa diklasifikasikan berdasarkan IPD menjadi Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di seluruh provinsi di Indonesia disertai dengan informasi untuk masing-masing dimensi dan indikator penyusunnya.

Sumber data pengukuran IPD memerlukan dua sumber data yaitu daftar desa dan data desa yang digunakan pada penghitungan IPD 2018 bersumber

dari hasil pendataan podes 2018 yang dilakukan secara sensus di seluruh wilayah administrasi terkecil setingkat desa di Indonesia. Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks. Pengukuran tingkat kemajuan pembangunan desa diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas tersebut meskipun perlu di upayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis pengukurannya. Dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan sebagai alat ukur konsep pembangunan desa perlu disusun secara teliti sehingga secara komposit akan mampu menggambarkan tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan desa yang di potret pada suatu waktu. Dimensi Indeks Pembangunan Desa terbagi menjadi 5 bagian, yaitu

1. Pelayanan Dasar

Dimensi pelayanan dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA serta ketersediaan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti Rumah sakit, Rumah sakit bersalin, Puskesmas/Pustu, tempat praktek dokter, Poliklinik/Balai pengobatan, tempat praktek bidan, Poskesdes, Polindes, dan Apotek.

2. Kondisi Infrastruktur

Dimensi kondisi infrastruktur mewakili kebutuhan dasar, prasaranam pengembangan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/transportasi. Variabel-variabelnya penyusunannya mencakup (1) ketersediaan infrastruktur ekonomi

seperti pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan serta bank, (2) infrastruktur energi seperti listrik, penerangan jalan dan bahan bakar untuk memasak, (3) ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar, (4) ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.

3. Dimensi Aksesibilitas/Transportasi

Dimensi ini memiliki kekhususan dan prioritas pengembangan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabel penyusunnya meliputi, (1) ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti listrik dan kualitas jalan, (2) aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum serta (3) aksesibilitas transportasi seperti waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer ke kantor bupati

4. Dimensi Pelayanan Umum

Dimensi pelayanan umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat. Variabel-variabel penyusunnya mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti penanganan kejadian luar biasa dan penanganan gizi buruk, serta ketersediaan fasilitas olahraga.

5. Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah

Dimensi ini mewakili indikasi kinerja pemerintah desa yang merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan pemerintah untuk

pelayanan bagi warga. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti kelengkapan pemerintah desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa serta kualitas sumber daya manusia

C. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pengakuan dan penghormatan negara kepada desa yang disertai dengan redistribusi sumber daya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat UU Nomor 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Indeks Desa Membangun lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa karena mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi, dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan.

Dalam konteks tipologi desa, Indeks Desa membangun mengklasifikasikan desa dalam lima status yaitu, (1) Desa sangat tertinggal, (2) Desa tertinggal, (3) Desa berkembang, (4) Desa maju dan (5) Desa Mandiri. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini strata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi pembagian Indeks Desa membangun dapat dibagi ke beberapa hal seperti, (i) Desa sangat tertinggal: $< 0,491$; (ii) Desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (iii) Desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (iv) Desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; (v) Desa mandiri: $> 0,815$. Tipologi tersebut sejalan dengan Permendes No.6 Tahun

2016 yang mengatur peta pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu:

1. Indeks Ketahanan Sosial
2. Indeks Ketahanan Ekonomi
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensinya serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2 Regulasi

2.2.1 Blue Economy

Terminologi *blue economy* merupakan salah satu konsep pembangunan terbaru dengan mengandalkan laut dan perairan yang berlandaskan pada tiga pilar terintegrasi yaitu ekosistem, ekonomi dan sosial. Istilah *blue economy* tersebut telah diangkat dalam berbagai kerja sama internasional, seperti pada pertemuan tingkat *Senior Office Meeting (SOM)*

for the Asia Pacific Economics Cooperation (APEC). Konsep tersebut adalah konsep pengembangan yang membidik tiga kepentingan, yakni pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penyehatan lingkungan (Ilena, 2014).

Gunter Pauli (2010) mendefinisikan *blue economy* adalah sebuah model bisnis yang bekerja menciptakan nilai tambah dengan mencuri cara ekosistem alam bekerja. Beberapa cirinya adalah *zero waste*, menggunakan energi terbarukan, menggunakan teknologi yang rendah energi, inovatif dan yang terpenting dalam segi ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja baru. *Blue economy* dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan secara keseluruhan, sehingga sumber daya laut yang diolah akan dimanfaatkan secara optimal sebagai *mainstream* pembangunan ekonomi nasional.

Sutono (2013) menjelaskan integrasi konsep *blue economy* berkaitan langsung dengan industrialisasi dan minapolitan industrialisasi akan mempengaruhi percepatan nilai tambah. Hasil dari industrialisasi akan memunculkan sebuah sentra industri yang kemudian disebut sebagai industrialisasi sektor hulu. Jika dikembangkan dengan manajemen pemasaran yang akan menjadi industrialisasi hilir dan selanjutnya dapat dipasarkan di pasar dalam negeri hingga pasar internasional.

2.2.2 Blue Economy Development Framework

Banyak negara pesisir dan pulau dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah ke bawah, di mana lautan mewakili wilayah yuridiksi yang signifikan

dan sebagai sumber peluang. Di negara-negara tersebut inovasi dan pertumbuhan di sektor pesisir, kelautan dan maritim dapat menghasilkan pangan, energi, transportasi di antara produk dan layanan lainnya serta berfungsi sebagai landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Diversifikasi ekonomi negara-negara di luar kegiatan berbasis lahan dan di sepanjang pantai mereka sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan pertumbuhan yang cerdas, berkelanjutan dan inklusif secara global. Di Eropa, ekonomi biru mewakili sekitar 5,4 juta pekerjaan dan menghasilkan nilai tambah bruto hamoir €500 miliar per tahun

Tabel 2.1 Komponen Ekonomi Biru

Jenis kegiatan	Layanan laut	Industri	Pemicu pertumbuhan
Panen hidup	Makanan laut	Perikanan	Ketahanan pangan
		Akuakultur	Permintaan protein
	Bioteknologi kelautan	Farmasi, bahan kimia	R&D untuk perawatan kesehatan dan industri
Ekstraksi sumber daya non hayati, generasi baru sumber daya	Mineral	Penambangan dasar laut	Permintaan mineral
	Energi Air Tawar	Minyak dan gas	Permintaan alternatif sumber energi Kebutuhan air bersih
		Deselinasi	
Perdagangan dan berdagang di dalam dan sekitar lautan	Transportasi dan Perdagangan	Pengiriman	Pertumbuhan perdagangan lintas laut dan peraturan internasional
		Infrastruktur dan layanan pelabuhan	
	Pariwisata dan rekreasi	Pariwisata	Pertumbuhan pariwisata global
Pertumbuhan penduduk		Urbanisasi pesisir Peraturan domestik	

Respons terhadap kesehatan laut	Pemantauan dan pengawasan laut	Teknologi dan R&D	R&D dalam teknologi kelautan
	Penyerapan karbon	Karbon biru	Pertumbuhan di pesisir dan kegiatan perlindungan dan konservasi laut
	Perlindungan pesisir	Perlindungan dan restorasi habitat	
	Pembuangan limbah	Asimilasi nutrisi dan limbah	

Sumber: AMCOECC Blue Economy

Pertumbuhan ekonomi biru dimungkinkan di sejumlah bidang terutama perikanan budidaya, budidaya lau, wisata pesisir, bioteknologi kelautan dan energi laut. Sementara beberapa dari sektor ini akan membutuhkan sedikit dorongan dan tata kelola tambahan serta perencanaan yang lebih banyak dan lebih baik untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengembalikan hasil yang lebih berkelanjutan, reformasi tata kelola yang ambisius didukung oleh *World Bank*.

Sejumlah besar negara-negara pesisir dan kepulauan yang sering berkembang bergantung pada pariwisata dan perikanan sebagai bagian penting dari produk domestik bruto dan pendapatan public mereka. Akuakultur di proyeksikan akan terus berkembang pesat jika dilakukan secara berkelanjutan serta dapat berfungsi sebagai sumber pangan utama dan landasan ekonom biru. Kemajuan dalam produksi rumput laut menjanjikan untuk menggantikan tepung ikan dan pakan ternak dengan bahan tanaman yang di produksi dengan polusi yang lebih sedikit. Pada sektor pariwisata, khususnya yang berbasis alam juga menyediakan jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir. Pariwisata pesisir adalah komponen kunci dari ekonomi negara, nilai pariwisata

berbasis alam diperkirakan akan meningkat dari waktu ke waktu karena pasokan asset alam murni menurun sementara permintaan meningkat seiring dengan meningkatnya PDB.

Potensi untuk menumbuhkan ekonomi biru dibatasi oleh serangkaian tantangan. Untuk sebagian besar sejarah manusia, ekosistem perairan telah dilihat dan diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak terbatas dan sebagian besar gudang limbah yang bebas biaya. Namun, sumber daya ini jauh dari tak terbatas dan kami semakin melihat dampak dari pendekatan ini. Antarmuka pesisir yang sempit mengalami kelebihan permintaan oleh banyak sektor, dan semakin terpengaruh oleh perubahan iklim. Meningkatnya permintaan, lembaga tata kelola yang tidak efektif, insentif ekonomi yang tidak memadai, kemajuan teknologi, dan perangkat manajemen yang tidak memadai telah menyebabkan persaingan antar pengguna yang tidak diatur atau tidak diatur secara efisien. Hal ini pada gilirannya telah mengakibatkan penggunaan yang berlebihan, dan dalam beberapa kasus perubahan yang tidak dapat diubah, dari sumber daya perairan dan wilayah pesisir yang berharga. Dalam ruang yang semakin kompetitif ini, kepentingan mereka yang paling bergantung dan rentan (misalnya nelayan skala kecil) sering terpinggirkan.

Upaya untuk mengatasi tantang ini sebagian besar dilakukan sedikit demi sedikit tanpa strategi yang komprehensif, misalnya tata kelola perikanan; meningkatkan pelabuhan; upaya sampah laut). Bahkan ketika satu kebijakan sectoral mencapai beberapa keberhasilan, hasil ini sering dirusak oleh eksternalitas dari kegiatan di sektor lain. Seringkali, misalnya, upaya pengelolaan wilayah pesisir, atau dukungan kepada nelayan pesisir, dirusak oleh penambangan pasir yang tidak terkendali, pelabuhan yang lokasinya tidak tepat atau tambak budidaya

atau pengembangan pariwisata yang tidak diatur. Di wilayah pesisir, penurunan habitat hutan bakau akibat penebangan kayu, kenaikan permukaan laut, dan perubahan sedimen dan muatan polutan dari daerah aliran sungai yang dikombinasikan dengan reklamasi lahan untuk pertanian atau infrastruktur berdampak negatif pada perikanan dengan mengurangi atau menurunkan habitat pemijahan dan mencari makan. Hilangnya hutan bakau, misalnya, mengancam keuntungan dari hasil panen makanan laut yang melebihi US\$4 miliar per tahun. Di Belize, daerah yang kaya bakau menghasilkan rata-rata 71 persen lebih banyak biomassa ikan daripada daerah yang sedikit bakau.

Pendekatan yang lebih sistematis, berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang prioritas yang ditetapkan secara nasional, konteks sosial dan basis sumber daya, dapat memandu pertumbuhan biru yang berkelanjutan dan inklusif. Negara semakin menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pengetahuan tentang karakteristik biofisik, daya dukung, sinergi atau pertukaran antar sektor untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari berbagai kegiatan. Perencanaan tata ruang laut dan pesisir dan pengawasan maritim terpadu diperlukan untuk memberi pihak berwenang, bisnis, dan masyarakat gambaran yang lebih baik tentang apa yang terjadi di ruang unik ini. Pemetaan digital ruang laut dan pesisir serta aset alam dapat menjadi dasar bagi analisis dan perencanaan lintas sektor untuk mencegah konflik dan menghindari eksternalitas. Demikian pula, ilmu pengetahuan yang berkembang tentang penilaian stok terbatas data dapat memberikan informasi penting yang diperlukan untuk pengelolaan perikanan yang lebih baik. Di tempat-tempat seperti Afrika Selatan dan Indonesia, teknologi seluler

sedang diuji untuk mengumpulkan data yang sebelumnya tidak tersedia, misalnya tentang pendaratan perikanan dan kesehatan stok ikan.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dapat meningkatkan perlindungan sumber daya pesisir dan dekat pantai sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaannya. Zona pesisir adalah salah satu wilayah yang paling produktif di dunia, menawarkan berbagai habitat berharga dan jasa ekosistem yang selalu menarik manusia dan aktivitas manusia. Zona pesisir juga merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan bahaya alam. Risiko termasuk banjir, erosi, kenaikan permukaan laut serta peristiwa cuaca ekstrem. Dampak ini jauh jangkauannya dan sudah mengubah kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Tidak seperti pendekatan sektoral yang dapat menyebabkan keputusan yang terputus-putus, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan peluang yang hilang, pengelolaan zona pesisir terpadu (ICZM) berupaya mengoordinasikan penerapan berbagai kebijakan yang memengaruhi zona pesisir dan kegiatan maritim. ICZM adalah proses berulang yang mencakup berbagai pendekatan, mulai dari pemetaan, delineasi dan demarkasi garis bahaya dan sel sedimen pantai, hingga peningkatan kapasitas lembaga-lembaga dan masyarakat untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang menumbuhkan ekonomi biru dalam daya dukung basis sumber daya alamnya.

Menumbuhkan ekonomi biru juga membutuhkan penilaian sumber daya laut, tidak hanya sumber daya hayati laut kurang diukur dan dipahami, mereka juga jarang dihargai dengan benar. Berinvestasi dalam tata kelola yang lebih baik akan menciptakan jalur peluang yang dapat diinvestasikan untuk menumbuhkan ekonomi biru dengan cara yang menguntungkan ekonomi nasional dan komunitas

lokal, sekaligus melindungi sumber daya untuk pertumbuhan di masa depan. Tata kelola yang efektif merupakan kondisi penting untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan yang berkelanjutan, dan memastikan ketahanan keanekaragaman hayati dan ekosistem, yang pada gilirannya berkontribusi untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai guncangan, termasuk perubahan iklim. Tata kelola yang efektif juga akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi investasi sektor swasta yang bertanggung jawab di seluruh rantai nilai dengan mengurangi risiko dan memberikan insentif untuk inovasi. Terakhir, tata kelola yang efektif akan meningkatkan kontribusi perikanan, akuakultur, dan budidaya laut terhadap ekonomi makro, yang akan membantu meningkatkan visibilitas sektor ini dan akibatnya alokasi sumber daya. Peningkatan tata kelola harus mencakup fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Analisis dan hasil upaya pembangunan perikanan di seluruh dunia telah menunjukkan bahwa ketika komunitas lokal dan nelayan memiliki suara dalam menetapkan pedoman kebijakan dan pengelolaan aturan ini kemungkinan besar akan diikuti dan menciptakan perubahan yang lama. Memberdayakan masyarakat lokal juga berarti memperjelas hak penguasaan dan hak akses sumber daya tetapi agar efektif ini harus disertai dengan kapasitas dan sumber daya yang jelas.

Meningkatkan infrastruktur dan akses pasar juga dapat menciptakan hasil yang lebih berkelanjutan serta bermanfaat untuk masyarakat miskin. Membangun permintaan pasar terhadap makanan laut dapat menciptakan insentif untuk praktik yang baik dan mendorong peluang investasi baru terkait dengan perikanan dan budidaya yang dikelola secara berkelanjutan. Permintaan pembeli untuk makanan

laut yang berkelanjutan di Eropa Barat dan Amerika Utara telah mendorong perubahan substansial dalam perikanan besar yang memasok pasar ini. Dengan tata kelola yang lebih baik dan insentif tentu akan menyelaraskan modal alam dengan modal investasi, keuangan dapat bertanggung jawab yang mengamankan pengembalian dan juga berkontribusi secara signifikan untuk membangun ekonomi. *World Bank* menawarkan untuk menyediakan modal, menyelenggarakan layanan dan bantuan teknis yang diperlukan untuk membuka potensi ekosistem perairan yang dikelola secara berkelanjutan dan menumbuhkan ekonomi biru.

World Bank membantu pemerintah mengevaluasi potensi kontribusi ekonomi dari investasi dalam tata kelola perikanan dan budidaya yang lebih baik, bank dunia juga membantu memikirkan kembali adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pendekatan dua arah. Program Global Perikanan (*Profish*) dan dana perwalian multi-dono yang ditempatkan di bank memperkuat tawaran *World Bank Group* dengan mendukung perikanan dan budidaya yang lebih baik, *profish* berfokus pada peningkatan kelestarian lingkungan, kesejahteraan manusia, dan kinerja ekonomi di dunia perikanan dan akuakultur dengan focus pada kesejahteraan masyarakat miskin di komunitas perikanan dan budidaya di negara berkembang. Hingga saat ini, investasi *profish* sebesar US\$4,5 juta dalam penelitian, analisis dan dukungan teknis telah menghasilkan US\$1 miliar dalam bentuk pinjaman bank dunia, dalam menciptakan *Allfish* yang memanfaatkan US\$1,5 juta dari fasilitas lingkungan global menjadi US\$8,5 juta dari investasi ke sektor swasta ke dalam rantai pasokan makanan laut yang berkelanjutan dan memfasilitasi investasi IFC sebesar US\$10 juta dalam akuakultur dengan pengembalian investasi sebesar 727%.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Karina Fitria Apriliani (2014), Analisis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal Dalam Upaya Mewujudkan Blue Economy	Deskriptif Kuantitatif	Produksi perikanan, Pemasaran hasil produksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sebelas indikator konsep <i>Blue Economy</i> , sembilan diantaranya terkonfirmasi, sedangkan dua lainnya dinyatakan tidak terkonfirmasi. Dengan demikian disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi wilayah pesisir di Desa teridentifikasi berbasis konsep <i>blue economy</i>
2	Windah Chusnot Chotimah (2013), Identifikasi Kegiatan Ekonomi Wilayah Pesisir Melalui Konsep Blue Economy	Deskriptif Kualitatif	Indikator konsep Blue Economy, dan sektor industri	Hasil penelitian ini adalah prioritas dari seluruh program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan wilayah pesisir Kendal dilihat dari potensi wisata, perikanan dan kelautan, industri dan perdagangan.
3	Chandra Pratama (2020) <i>Sustainable Cities and Communities</i> Dalam Perubahan Sosial	Deskriptif Kualitatif	Sosial ekonomi masyarakat, dan kegiatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi sosial dengan adanya

	<p>Ekonomi Masyarakat Pesisir di Pulau Lae-lae</p>		<p>pembangunan</p>	<p>pembangunan proyek reklamasi yang berlokasi dipesisir kota Makassar kondisi sosial masyarakat pulau Lae-lae tidak terlalu terganggu dengan adanya kerjasama pemerintah dan pihak CPI, meskipun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. segi ekonomi masyarakat mengeluhkan kondisi ekonomi mereka yang semakin berkurang dengan adanya proyek reklamasi CPI. dari segi lingkungan telah ada perbaikan tanggul yang rusak akibat proses pembangunan yang dilakukan oleh pihak CPI tetapi masyarakat mengharapkan pemerintah dan pihak swasta agar lebih memperhatikan kondisi laut agar tetap terjaga karena laut adalah satusatunya sumber kehidupan mereka yang tinggal di daerah</p>
--	--	--	--------------------	--

				pesisir.
4	Tapriadi (2021), Analisis Evaluasi Kebijakan Dana Desa dan Potensi Ekonomi Pesisir di Pantai Barat	Kuantitatif Kualitatif	Dana desa, potensi ekonomi desa, anggaran pendapatan desa, pengelolaan dana desa	Hasil penelitian ini adalah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepala desa dikelola langsung untuk membangun desa yang lebih maju. Pengalokasian dana desa untuk pembangunan ekonomi sudah menjadi prioritas utama. Masih minimnya kesadaran pemerintah desa tentang proses pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, tata tertib dan disiplin anggaran
5	Mira, Maulana dan elly (2014), Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah	Deskriptif Kualitatif	Penerapan prinsip blue economy pada usaha di wilayah pesisir	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga usaha perikanan dan kelautan yang telah menerapkan prinsip-prinsip blue economy di lokasi penelitian, yaitu: usaha longyam, polikultur, dan usaha pengolahan kulit ikan menjadi kerupuk. Untuk lebih meningkatkan

				tingkat penerapan prinsip blue economy pada ketiga usaha tersebut, perlu dukungan pemerintah baik berupa sarana maupun prasarana yang lebih baik dengan disertai upaya pendampingan yang lebih intensif.
--	--	--	--	--

2.4 Tahapan Penelitian

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi Potensi Ekonomi dalam mempengaruhi konsep *Blue Economy* yaitu (1) Kemiskinan, (2) Kurangnya Pendidikan, (3) Kesehatan Lingkungan. Ketiga variabel tersebut mempengaruhi tingkat kualitas hidup secara parsial.

2.4.1 Kerangka Analisis Penelitian

Melakukan analisis deskriptif tentang perkembangan potensi ekonomi wilayah pesisir dalam mencapai konsep Blue Economy di Kabupaten Langkat

Melakukan estimasi terhadap indikator-indikator yang berpengaruh pada Indeks Desa Membangun (IDM)

Mengidentifikasi Blueprint sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan agar tepat sasaran

2.4.2 Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesa

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu terdapat hubungan positif dan signifikan antara Indeks Ketahanan Sosial pada dimensi Kesehatan (K), Indeks Ketahanan Ekonomi pada dimensi Akses Perbankan dan Kredit Keterbukaan Wilayah (APK) , dan Indeks Ketahanan Lingkungan pada dimensi Bencana Alam (BA) terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya penelitian termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan metode penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat disamping mengukur kekuatan hubungan (Gujarati, 2013).

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan dengan menggunakan data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan adalah panel data yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section*, data yang lebih dari satu dan *timeseries* data yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Data yang diteliti adalah IKS, IKE dan IKL di keseluruhan Kecamatan Brandan Barat pada tahun 2019 sampai 2021 yang dipublikasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI).

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat di sesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian

ini adalah: Indeks Desa Membangun (IDM), Kesehatan (K), Akses Perbankan dan Kredit Keterbukaan Wilayah (APK) dan Bencana Alam (BA), sehingga definisi operasional dari penelitian ini adalah:

TABEL 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai indeks komposit tingkat kemajuan desa dalam satuan persen	Kementerian Desa PDTT www.kemendes.go.id
Sarana Kesehatan (SK)	Instrumen dalam Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yaitu dimensi kesehatan pada indikator IDM dalam satuan persen	Kementerian Desa PDTT www.kemendes.go.id
Panjang Jalan (PJ)	Instrumen dalam Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yaitu indikator IDM dalam satuan Km	Kementerian Desa PDTT www.kemendes.go.id
Tanggap Bencana (TB)	Dimensi dalam Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yaitu indikator IDM dalam satuan persen	Kementerian Desa PDTT www.kemendes.go.id

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data Indeks Desa Membangun di Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat pada tahun 2019-2021 yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu Juni 2022 sampai Agustus 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala *numerik* (angka), yang dibedakan menjadi *interval* dengan data *rasio*. Data *interval* adalah data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Sedangkan data *rasio* adalah data yang diukur dengan suatu proporsi (Gujarati, 2013)

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI) dan data dalam bentuk buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Henke & Reitsh (Gujarati, 2013) pengumpulan data umumnya berasal dari data internal atau eksternal dan data primer atau data sekunder. Data *internal* berasal dari organisasi tersebut ataupun data *eksternal* yang berasal dari luar organisasi. Sedangkan data primer biasanya diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Di lain pihak, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website-website* resmi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI) dengan objek penelitian seluruh Kecamatan Brandan Barat di Kabupaten Langkat dalam kurun waktu selama 3 tahun (2019-2021).

3.6 Teknik Analisis Tujuan Penelitian

3.6.1 Analisis Ekonomi Deskriptif Perkembangan Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Dalam Mencapai *Blue Economy* di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

Metode analisis deksriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisis observasi dengan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkemabangan potensi ekonomi wilayah pesisir dalam mencapai *Blue Economy* di Kabupaten Langkat.

3.6.2 Analisis Model Ekonometrika

A. Model Estimasi

Penelitian ini mengenai pengaruh potensi ekonomi wilayah pesisir terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan objek penelitian seluruh Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan dalam kurun waktu dari tahun 2019 sampai 2021. Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

$$IDM_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot SK_{rt} + \alpha_2 \cdot PJ_{rt} + \alpha_3 \cdot TB_{rt} + \epsilon_{rt} \dots \dots \dots (3-1)$$

Dimana: IDM_{rt} = Indeks Desa Membangun pada tahun t
 α_0 = Konstanta pada tahun t
 SK_{rt} = Sarana Kesehatan pada tahun t
 PJ_{rt} = Panjang Jalan pada tahun t
 TB_{rt} = Tanggap Bencana pada tahun t
 ϵ_{rt} = Error term pada tahun t
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Parameter dari setiap variabel bebas pada tahun t

Setelah model penelitian di estimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

B. Metode Estimasi

Penelitian ini mengenai mengenai capaian Indeks Desa Membangun (IDM) terhadap pengembangan potensi ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara. Metode OLS (*Ordinary Least Square*) mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat OLS yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika. Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linier dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut,

1. Nilai rata-rata disturbance tern $= 0$
2. Tidak terdapat korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance tern $COV (\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
3. Sifat *homocedasticity* dari disturbance tern $Var (\epsilon_i) = \sigma^2$
4. *Covariance* antar ϵ_i dari setiap variabel bebas (x) $= 0$ setiap variabel bebas (x) $= 0$
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang di uji secara tepat telah dispesifikasikan atau di formulasikan.

6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan tertentu antara sesamanya
7. Jika model berganda yang di estimasi melalui OLS memenuhi suatu asumsi (asumsi *gauss-morkov*) maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linier unbiased estimator*)(Gujarati, 2013)

C. Tahapan Analisis

1. Penaksiran

a) Koefisien Korelasi (R)

Koefisien Korelasi adalah nilai yang ditunjukkan kuat atau tdiaknya suatu hubungan linier antar variabel Indeks Desa Membangun (IDM), Sarana Kesehatan, Panjang Jalan dan Tanggap Bencana. Hubungan linier antar dua variabel biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai $+$ (positif)maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan SK, PJ, TB akan bersamaaan dengan peningkatan IDM dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai $-$ (negatif) artinya korelasi antara kedua variabel tersebut berlawanan. Penurunan nilai SK, PJ, dan TB akan bersamaan dengan penurunan IDM.

b) Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Gujarati (Gujarati, 2013) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted* R^2 yang dirumuskan:

$$Adjusted R^2 = 1 - R^2 \left(\frac{n-1}{n-k} \right) \dots \dots \dots (3-2)$$

Dimana : R^2 = Koefisien determinasi

N = jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

2. Pengujian (Test Diagnostic)

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh K, APK, BA secara individual terhadap IDM. Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Hipotesa

$H_0 : \alpha_1 = 0$ (K, APK, BA tidak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IDM)

$H_0 : \alpha_1 \neq 0$ (K, APK, BA berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IDM)

b) Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Gujarati, 2013). Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pada model ekonometrik menunjukkan apakah DD, PDRB, dan BD secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel IPM.

1. Hipotesa

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$ (DD, PDB, KM, BN secara bersama-sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

$H_a : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 \neq 0$ (DD, PDB, KM, BN secara bersama-sama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap IPM)

c) Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai *estimator* yang diharapkan dapat memenuhi sifat *estimator* OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu (1) tidak ada masalah antara hubungan variabel independent dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas), (2) varian variabel yang konstan, (3) tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan obeservasi berikutnya (tidak ada autokolerasi). Pada bagian ini akan dibahas suatu pelanggaran asumsi klasik yang sering terjadi yakni multikolinearitas, heterokedasitas dan autokloerasi.

a. Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada linier baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2013). Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxiliary regression* untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi auxiliary maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas

b. Heterokedastitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak "*reliable*" atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji *White*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2013). Dimanapengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared* lebih

besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak acak. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2013).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila d_j dan d_u adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4 - d_u$ maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2013).

d) Uji Hausman (Pemilihan Model Regresi)

Uji yang digunakan untuk menentukan model regresi pada data panel yaitu *Fixed Effect* atau *Random Effect*, maka selanjutnya yang dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan, pengujian ini disebut dengan Uji Hausman. Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan digunakan. Pengujian Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-squares sebagai berikut:

$$m = q' \text{ Var } (q') - 1 q'$$

Statistik uji hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H_0 ditolak dengan model yang tepat adalah model *fixed effect*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *random effect*.

1. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Efek tetap disini dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*). Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya, digunakan variabel semu (*dummy*). Oleh karena itu, model ini sering disebut juga dengan *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

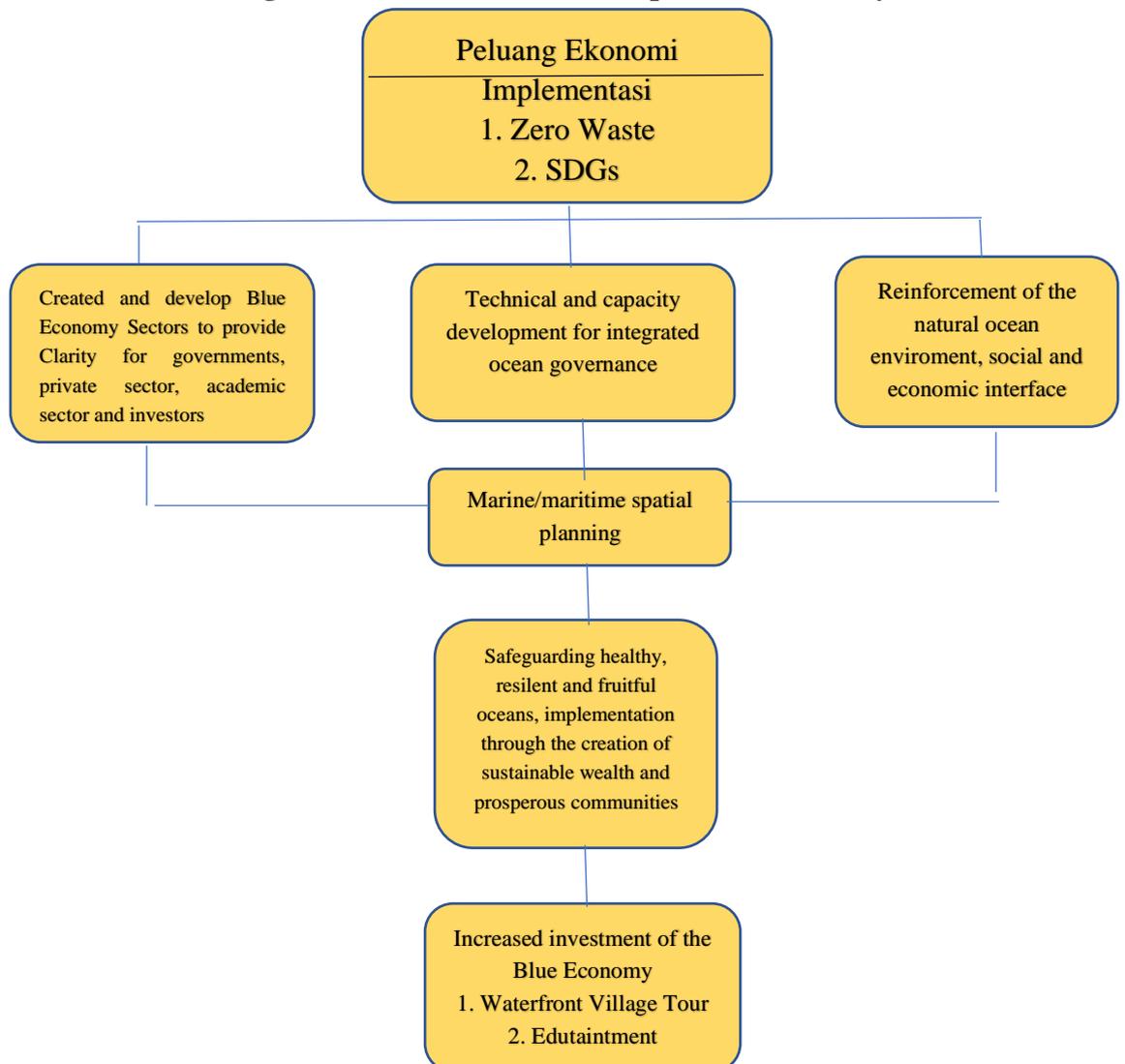
2. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antarobjek. Namun untuk menganalisis metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.

3.7. Tahapan Blue Print

Blue Print adalah rancangan, penyusunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi, komunitas atau lembaga secara berkesinambungan. Dengan adanya blue print setiap kegiatan akan memiliki kesesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan, karena dalam blue print terdapat suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan.

Tabel 3.7.1
Kerangka Blue Print Dalam Mencapai Blue Economy



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

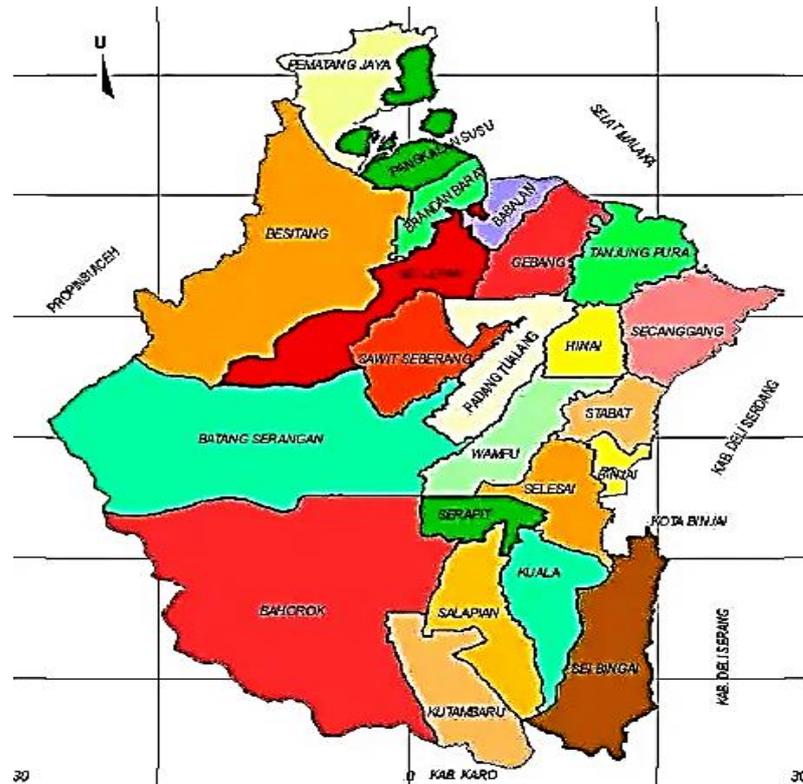
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara Geografis Kabupaten Langkat berada pada $3^{\circ}14'00''$ – $4^{\circ}13'00''$ Lintang Utara, $97^{\circ}52'00''$ – $98^{\circ} 45'00''$ Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas $\pm 6.263,29$ Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan. Area Kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- Utara : berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka
- Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Karo
- Barat : berbatasan dengan Provinsi Aceh
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai

Seperti daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut : Musim Kemarau (Februari s/d Agustus) dan Musim Hujan (September s/d Januari). Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius – 30 derajat celcius.



Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat menempati area seluas $\pm 6.263,29$ Km² yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 desa serta 37 Kelurahan Definitif. Berdasarkan luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah Kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 Km² atau 17,59%. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Binjai dengan luas 42,05 km² atau 0,67% dari total luas wilayah Kabupaten Langkat yang dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase(%)
1	Bahorok	1101.83	17.59
2	Sirapit	98.50	1.57
3	Salapian	221.73	3.54
4	Kutambaru	236.84	3.78
5	Sei Bingai	333.17	5.32
6	Kuala	206.23	3.29
7	Selesai	167.73	2.68
8	Binjai	42.50	0.68

9	Stabat	108.85	1.74
10	Wampu	194.21	3.10
11	Batang Serangan	899.93	14.36
12	Sawit Seberang	209.10	3.34
13	Padang Tualang	221.14	3.53
14	Hinai	105.26	1.68
15	Secanggang	231.19	3.69
16	Tanjung Pura	179.61	2.87
17	Gebang	178.49	2.85
18	Babalan	76.41	1.22
19	Sei Lapan	280.68	4.48
20	Brandan Barat	89.80	1.43
21	Besitang	720.74	11.51
22	Pangkalan Susu	151.35	2.42
23	Pematang Jaya	209.00	3.34
Langkat		6263.74	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Langkat Tahun 2021 (www.bps.go.id)

4.1.2 Kondisi Pemerintahan

Tabel 4.2

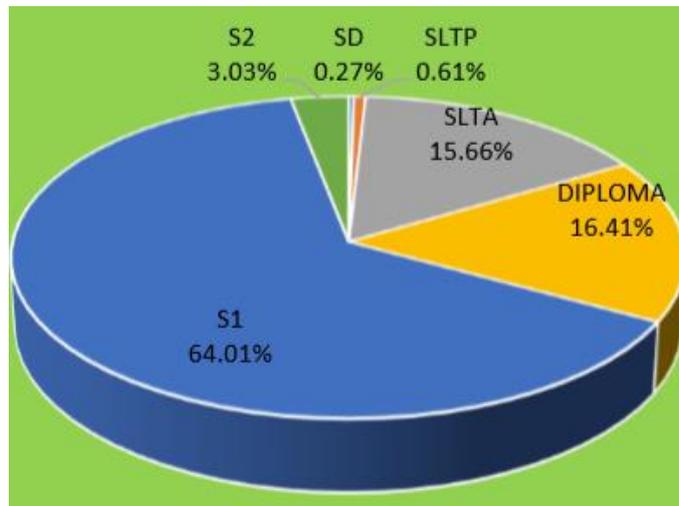
Statistik Pemerintahan Kabupaten Langkat

Wilayah Administrasi	2019	2020	2021
Kecamatan	23	23	23
Desa	240	240	240
Kelurahan	37	37	37
Jumlah PNS	2019	2020	2021
Golongan I	47	40	33
Golongan II	1 656	1 548	1 356
Golongan III	5 222	4 888	4 657
Golongan IV	3 309	3 221	3 118
Total	10 309	9 697	9 164

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.1 diatas ada 2 kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak, yaitu Bahorok dan Tanjung Pura. Masing-masing terdiri dari 19 desa/kelurahan. Sedangkan yang memiliki desa/kelurahan paling sedikit ada 3 kecamatan yaitu Binjai. Sawit Seberang dan Brandan Barat masing-masing terdiri dari 7 desa/kelurahan. Dilihat berdasarkan golongan, pada tahun 2021 jumlah pegawai golongan I sebanyak 33 orang atau 0,36%, golongan II sebanyak 1.356

atau 14,8%, golongan III sebanyak 4.657 orang atau 50,82% dan golongan IV sebanyak 3.118 orang atau 34,02%.



Gambar 4.2
Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Langkat (%) Tahun 2021

Menurut Gambar 4.2 menunjukkan adanya peningkatan kualitas PNS dari sisi pendidikan yaitu semakin berkurang jumlah pegawai yang berpendidikan SMA ke bawah, sementara jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi (diploma ke atas) semakin meningkat walaupun secara jumlah S1 mendominasi sebanyak 64.01%.

Anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2019-2024 berjumlah 50 orang yaitu terdiri dari 42 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Ada beberapa jenis keputusan DPRD antara lain peraturan daerah, keputusan DPRD, pernyataan pendapat, resolusi, kesimpulan rapat, keputusan pimpinan, keputusan panitia musyawarah, memorandum, dan pendapatan panitia anggaran. Adapun keputusan DPRD adalah jenis keputusan yang paling banyak dilakukan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 33. Jenis kegiatan DPRD yang paling banyak dilakukan oleh DPRD Kabupaten Langkat adalah kunjungan kerja sebanyak 160 dan yang paling sedikit adalah sidang panitia khusus sebanyak 2, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada sidang istimewa dan sidang khusus yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Langkat.

Tabel 4.3
Realisasi Pendapatan Kabupaten Langkat 2019-2021

Kegiatan	2019	2020	2021
Anggaran Pendapatan (Milyar Rp)	2 361,51	2 000,79	1 904,96
PAD (Milyar Rp)	167,52	168,84	120,3
Pendaoatan Transfer (Milyar Rp)	1 868,44	1 623,32	1 736,32
Bagi Hasil Pajak	141,67	113,13	146,74
Bagi Hasil Bukan Pajak	8,28	6,14	6,19
DAU (Milyar Rp)	1 229,43	1 099,66	1 081,98
DAK (milyar Rp)	353,47	319,00	207,51
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Milyar Rp)	325,55	208,62	48,35

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

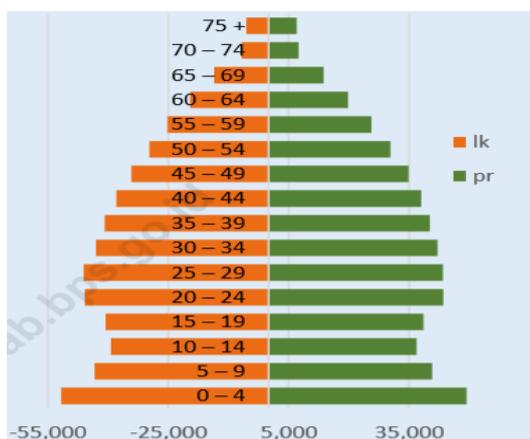
Menurut Tabel 4.3 diatas pada tahun 2021, realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Langkat mencapai 1.904,96 milyar rupiah atau menurun sebesar 4,79% dibanding tahun 2020. Sebagian besar anggaran pendapatan Kabupaten Langkat berasal dari pendapatan transfer yaitu sebesar 1.736,32 milyar rupiah (91,15%). Sebagian besar pendapatan transfer berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), selebihnya dari Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Anggaran belanja pemerintah Kabupaten Langkat mencapai 1.901,96 milyar rupiah terdiri dari belanja operasi sebesar 76,62% dan belanja modal sebesar 5,27%, sisanya transfer bantuan keuangan. Stabat merupakan kecamatan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah Otonom terkecil pada tahun 2021 di Kabupaten Langkat sebesar Rp1.753.248.416,00 atau 71,56%.

4.1.3 Kondisi Demografi

A. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Langkat didominasi oleh penduduk muda/dewasa atau bisa dibbilang didominasi oleh generasi Z dan milenial. Generasi Z adalah generasi yang

lahir pada tahun 1997-2012, perkiraan usia sekarang 10-25 tahun. Generasi milenial lahir tahun 1981-1996 perkiraan usia sekarang 26-41 tahun.



Gambar 4.3
Piramida Penduduk Kabupaten Langkat (jiwa), 2021

Dapat dilihat dari gambar 4.3 diatas proporsi generasi z sebanyak 23,65% dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 24,71% dari total populasi Kabupaten Langkat. Kedua generasi ini termasuk ke dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.4
Indikator Kependudukan Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (jiwa)	1 041 775	1 030 202	1 034 519
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,62	0,61	0,42
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	166	165	165
Sex ratio (L/P) (%)	101,4	102,2	102,3
Jumlah Rumah Tangga	256 025	257 178	253 766
Rata-rata ART (jiwa/ruta)	4,07	4,00	4,08
Persentase penduduk menurut kel.umur			
0-14 tahun	29,68	25,53	25,24
15-64 tahun	65,35	69,52	69,52
65+ tahun	4,97	4,95	5,23

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Dapat dilihat pada tabel 4.4 selama tahun 2020-2021 tingkat pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 0,42%, dilihat pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Langkat yaitu sebanyak 1.034.519 jiwa. Kepadatan penduduk pada

tahun 2021 yaitu sebanyak 165 jiwa/km² dengan nilai sex ratio yang memiliki makna bahwa di setiap 100 penduduk terdapat 105 penduduk laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini dapat terlihat dari sex ratio yang nilainya sebesar 102,3.

B. Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Langkat mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2021, sedangkan upah minimum kabupaten (UMK) tidak mengalami perubahan yakni sebesar 2,71 juta rupiah.

Tabel 4.5

Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
TPAK (%)	68,82	69,92	69,12
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,28	7,02	5,12
Bekerja (%)	65,18	65,01	94,88
UMK (000 Rp)	2 498	2 711	2 711
UMP (000 Rp)	2 303	2 499	2 499
Bekerja di sektor Agrikultur (%)	42,67	40,19	39,12
Bekerja di sektor Manufaktur (%)	16,45	21,31	19,77
Bekerja di sektor barang dan jasa (%)	40,88	38,51	41,11

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 dan Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.5 diatas dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) ada 69,12% penduduk Langkat tahun 2021 termasuk dalam angkatan kerja. Sektor jasa-jasa mendominasi pasar kerja di Kabupaten Langkat sebesar 41,11% pada tahun 2021 yang diikuti dengan sektor pertanian sebesar 39,12%. Sementara pekerja manufaktur sebanyak 19,77%. UMK langkat pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yakni 2.711 rupiah. Upah Minimum Provinsi (UMP) juga dengan tahun 2020 yakni sebesar 2.499 ribu rupiah.

TPT Kabupaten Langkat 2021 sebesar 5,12% menurun dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah pengangguran yang cukup signifikan di daerah Kabupaten Langkat.

4.1.4 Kondisi Sosial

A. Pendidikan

Upaya pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Langkat terus dilakukan baik dengan penyediaan/peningkatan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru PNS dan guru honorer yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sekolah setiap tingkatan pendidikan maupun mutu/kualitasnya

Tabel 4.6

APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Langkat Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2020	2021	2020	2021
SD/MI/Sederajat	98,64	99,74	110,83	110,41
SMP/MTs/Sederajat	78,97	81,65	90,17	88,47
SMA/SMK/MA/Sederajat	65,31	77,98	102,91	101,43
Perguruan Tinggi	8,96	9,69	7,94	6,91

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.6 jenjang pendidikan pada tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD adalah sebesar 99,74% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 110,41% untuk jenjang SMP Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 81,65% dan untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 88,47%. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sebesar 77,98% untuk Angka Partisipasi Murni (APM) dan 101,43% untuk Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk perguruan tinggi, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 9,69% dan untuk Angka

Partisipasi Kasar yaitu 6,91%. Pada tahun 2021, angka buta huruf paling tinggi pada kelompok umur 65 tahun ke atas yaitu sebanyak 7,99%.

B. Kesehatan

Tabel 4.7

Statistik Tenaga Kesehatan Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Dokter	40,27	49,76	43,78
Bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya	59,73	50,24	55,7
Dukun	0,00	0,00	0,53
Angka Harapan Hidup	68,59	68,80	68,97
Angka Kesakitan (%)	12,06	14,62	9,12

Sumber: Statkesra Provinsi Sumatera Utara 2021 dan IPM 2021 (www.bps.go.id)

Dapat dilihat pada Tabel 4.7 diatas persentase tertinggi penolong kelahiran di Kabupaten Langkat dilakukan oleh Bidan dan tenaga kesehatan lainnya yakni mencapai 55,7%, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, balita yang proses kelahirannya ditolong oleh dokter mencapai 43,78% menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 4.8

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Langkat Tahun 2020-2021

Tahun	Rumah Sakit Umum	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik	Apotik
2020	7	-	32	1 308	43	55
2021	7	-	35	1 308	38	58

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.8 sarana kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat banyak untuk menunjang perbaikan kualitas hidup. Peningkatan sarana dan prasarana maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus diupayakan oleh pemerintah. Menurut tabel 4.5 banyaknya fasilitas kesehatan tahun 2021 di Kabupaten Langkat untuk Rumah Sakit Umum sebanyak 7 unit, Puskesmas

meningkat menjadi 35 unit, sementara itu Posyandu tetap 1 308 unit, Klinik menjadi 38 unit, Apotek meningkat menjadi 58 unit dan Rumah Sakit bersalin sudah tidak ada lagi karena dialihkan ke Rumah Sakit Umum.

C. Infrastruktur Jalan

Hubungan darat antar kecamatan dapat melalui jalur jalan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya yang menjadi penghubung antar kecamatan maupun desa. Banyak hutan yang dimanfaatkan untuk pembukaan jalan baru sehingga memudahkan transportasi dari desa ke ibukota kecamatan. Pada tahun 2021, panjang jalan mencapai 1.561.3 km dengan kondisi baik sampai rusak berat dan permukaan yang diaspal sampai berupa tanah.

Tabel 4.9

**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Langkat (km)
2019-2021**

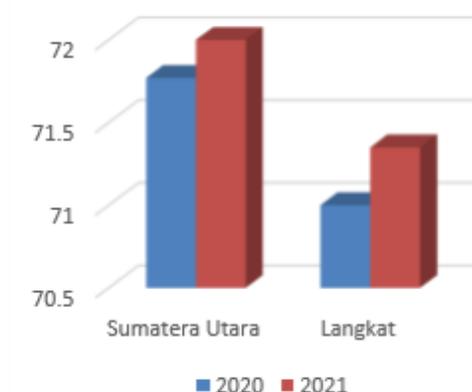
Kondisi Jalan	2019	2020	2021
Baik	388 850	811 560	657 772
Sedang	393 440	54 000	273 445
Rusak	698 350	1 200	451 264
Rusak Berat	80 670	694 540	178 869
Jumlah	1 561 300	1 561 300	1 561 300

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Dilihat dari Tabel 4.9 di atas jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain. Dilihat dari kondisinya, jalan di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mayoritas dalam kondisi rusak dengan panjang jalan 451.264 km dan jalan dengan kondisi baik sepanjang 657.772 km.

D. Pembangunan Manusia

Kemajuan pebangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 4.4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat 2020-2021

Pada gambar 4.4 diatas selama periode tahun 2020-2021 angka IPM Kabupaten Langkat meningkat yakni tahun 2020 sebesar 71,00 naik menjadi 71,35 pada tahun 2021. Angka IPM ini sudah berada pada kriteria tinggi, namun pemerintah harus tetap memberi perhatian terhadap pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan dan bukan menjadi beban pembangunan. IPM Kabupaten Langkat menduduki peringkat ke 16 dari 25 Kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara.

E. Kemiskinan

Tabel 4.10
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	103 080	101 870	106 590
Penduduk Miskin (%)	9,91	9,73	10,12

IPM	70,76	71,00	71,35
-----	-------	-------	-------

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Berdasarkan Tabel 4.10 penduduk miskin di Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 9,73% pada tahun 2020 naik menjadi 10,12% pada tahun 2021.

4.1.5 Kondisi Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami peningkatan sebesar 3,08%. Tingkat produktivitas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Langkat menduduki peringkat ketiga di provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.11

Jumlah Nilai Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Langkat

Produk Domestik Regional Bruto	Tahun		
	2019	2020	2021
PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha	42.515,18	43.208,00	46.301,20
Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran	100,00	100,00	100,00
PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran	29.597.772,36	29.343.355,98	30.247.338,87
PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran	42.515.176,42	43.207.997,58	46.301.203,75
Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan	5,07	-	3,08
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha	100,00	100,00	100,00
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha	29.597,77	29.343,26	30.247,39
Laju Implisit PDRB menurut pengeluaran	2,51	1,50	2,51
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,07	-0,86
Laju indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha	-	-	-

Indeks implisit PDRB menurut lapangan usaha	143,64	-	-
Indeks perkembangan PDRB seri 2010 ADHB menurut lapangan usaha	291,58	-	-
Indeks perkembangan PDRB seri 2010 ADHK menurut lapangan usaha	181,39	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.11 diatas pada tahun 2021 PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Langkat sebesar 46.301,20 milyar rupiah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 43.208,00 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Langkat sebesar 30.247.338,87 milyar rupiah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 29.343.255,98 milyar rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Langkat menunjukkan pergerakan menurun dari 5,07% pada tahun 2019 menjadi -0,86% pada tahun 2020.

B. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menunjukkan besarnya kemampuan masing-masing kategori ekonomi dalam menciptakan nilai tambah, sekaligus menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi barang dan jasa masing-masing kategori ekonomi.

Tabel 4.12

Peranan PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2019-2021

Lapangan Usaha	Tahun		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,74	39,57	40,30
Pertambangan dan Penggalian	9,54	9,22	9,31
Industri Pengolahan	15,79	15,89	16,02
Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,20	0,20
Pengadaan air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04
Konstruksi	7,63	7,42	7,34
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,29	11,19	10,98

Transportasi dan Pergudangan	2,43	2,23	2,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,15	2,03
Informasi dan Komunikasi	1,04	1,14	1,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,92	1,92
Real Estat	3,06	3,08	2,96
Jasa Perusahaan	0,60	0,58	0,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	3,48	3,24
Jasa Pendidikan	1,15	1,18	1,14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,52	0,49
Jasa Lainnya	0,22	0,21	0,20
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

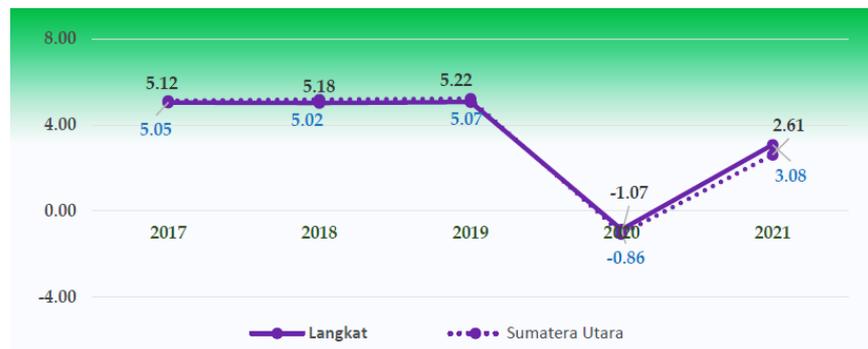
Berdasarkan Tabel 4.12 diatas sumbangan terbesar tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 40,30%, diikuti dengan industri pengolahan 16,02% dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,98%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing dibawah 10%. Kontribusi lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terhadap PDRB masing-masing sebesar 0,20% dan 0,40%.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Langkat pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, laju pertumbuhan PDRB Langkat tahun 2021 sebesar 3,08% sedangkan pada tahun 2020 sebesar -0,86%.

Ada 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dari 17 lapangan usaha yang ada. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi negatif tertinggi yaitu sebesar -0,55%, disusul dengan lapangan usaha jasa perusahaan dengan pertumbuhan sebesar -0,15%. Sedangkan 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan yang positif tertinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 5,39%, pengadaan

air n pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,42% serta pertambahan dan penggalian sebesar 4,18%.



Gambar 4.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Langkat dan PDRB Sumatera Utara, 2017-2021 (%)

Dilihat dari gambar 4.5 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat mengalami perubahan pola pertumbuhan yang berbeda dengan Sumatera Utara yaitu mengalami pertumbuhan yang melambat dari tahun 2017 ke tahun 2018, mengalami akselerasi pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kontraksi, sepanjang tahun 2017 sampai 2019, pertumbuhan ekonomi Langkat berada di atas Sumatera Utara . pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Langkat meningkat sebesar 3,08% sedangkan Sumatera Utara meningkat sebesar 2,61%.

D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Kabupaten Langkat sebesar 43% dari Kota Medan. Dari perbandingan antar Kabupaten/Kota terpilih, PDRB per kapita Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar 44,76 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Serdang bedagai yang mencapai 45,94 juta rupiah. Berdasarkan PDRB per kapita terlihat ketimpangan yang sangat tinggi, PDRB total

atas dasar harga berlaku tertinggi se Sumatera Utara tercatat di Kota Medan yang mencapai 254.721,32 milyar rupiah pada 2021, sementara Kabupaten Langkat mencapai 46.301,2 milyar rupiah.



Gambar 4.6

PDRB per Kapita Kabupaten Langkat ADHB dan ADHK 2010, 2017-2021 (ribu rupiah)

Dapat dilihat dari gambar 4.6 PDRB per kapita Kabupaten Langkat atas adasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 36,01 juta rupiah dan meningkat menjadi 44,76 juta rupiah pada tahun 2021. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, sementara itu jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2017-2021 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2021, PDRB per kapita Langkat tumbuh sebesar 4,32%, sedangkan tahun 2021 tumbuh sebesar 2,51%.

E. Gini Ratio

Pada Maret 2021 gini ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,314, tidak terjadi perubahan gini ratio pada Maret 2021 terhadap September 2020. Pada Maret 2021. Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 21,78%, artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,26% dan di daerah pedesaan angkanya tercatat sebesar 24,65% yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

Pola pengeluaran penduduk Kabupaten Langkat periode 2019-2021 lebih besar digunakan untuk konsumsi makanan dibandingkan dengan konsumsi non makanan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), kontribusi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan bukan makanan selama periode 2019-2021 tidak mengalami perubahan yang berarti.

Tabel 4.13
Statistik Gini Ratio per Kapita Kabupaten Langkat

Uraian	2019	2020	2021
Pengeluaran Perkapita sebulan (Rp)	860 723	876 791	936 925
• Makanan	499 495	494 844	557 130
• Non makanan	361 228	381 947	379 795
Golongan Pengeluaran per Kapita sebulan (%)	100.00	100.00	100.00
• <200 000	-	-	-
• 200 000 – 299 999	0,17	0,19	0,03
• 300 000 – 499 999	16,74	9,96	4,14
• Lebih dari 500 000	83,09	89,85	95,83

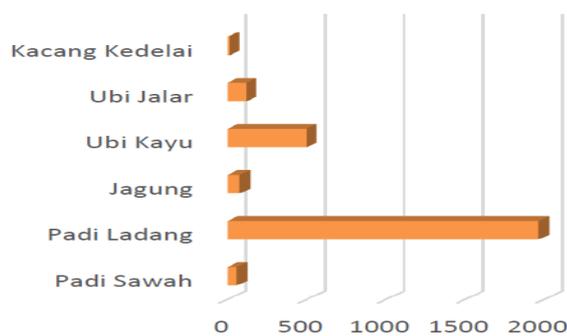
Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.13 di atas tahun 2021 pengeluaran makanan dan bukan makanan masing-masing sebesar 59,46% dan 40,54%. Penduduk yang golongan pengeluaran per kapita sebulan yang banyak di Kabupaten Langkat adalah golongan pengeluaran di atas Rp500.000 atau sebesar 95,83%, tidak ada lagi penduduk di Kabupaten Langkat dengan golongan pengeluaran per kapita sebulan dibawah Rp200.000.

4.1.6 Kondisi Sumber Daya Alam (SDA)

A. Pertanian

Kategori pertanian terdiri dari sub kategori tanaman pangan, perkebunan dan peternakan serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu). Keseluruhan komoditas di atas masuk kedalam sub kategori tanaman semusim dan tahunan memberikan kontribusi sebesar 22,65%.



Gambar 4.7
Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Langkat 2020 (Kw/Ha)

Dapat dilihat pada gambar 4.7 di atas sub kategori tanaman pangan mencakup padi, palawija dan hortikultura. Produktivitas tanaman pangan pada tahun 2020 yang tertinggi adalah tanaman ubi kayu yaitu 498,18 kw/ha sedangkan yang terendah adalah tanaman kacang tanah yaitu sebesar 12,15 kw/ha. Kategori pertanian merupakan kategori yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Langkat tahun 2021 mencapai 40,30%.

Tabel 4.14

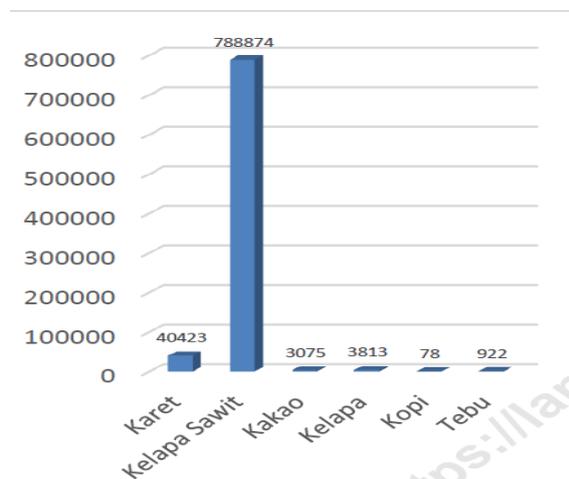
Populasi Peternakan (ekor) di Kabupaten Langkat 2019-2021

Populasi Ternak (ekor)	2019	2020	2021
Sapi potong	201 193	218 246	220 992
Kerbau	2 463	2 788	2 605
Kuda	28	18	17
Kambing	234 589	227 609	196 956

Domba	365 414	377 826	379 267
Babi	23 073	12 872	14 019
Ayam	10 255 737	10 602 559	10 444 703
Itik	260 320	269 311	261 449

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 4.14 diatas populasi ternaksapi potong, babi dan domba mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selama kurun waktu 2020-2021 populasi ternak besar meningkat sebesar 1,16%, unggas menurun sebesar 1,52% sedangkan ternak kecil berkurang sebesar 4,54%. Tanaman perkebunan yang banyak ditanam di Kabupaten Langkat adalah karet, kelapa sawit, kakao, tebu, kelapa dan kopi.



Gambar 4.8
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Langkat (Ton) 2021

Menurut gambar 4.7 diatas Kelapa Sawit merupakan tanaman perkebunan terluas dengan luas tanam mencapai 48.732 hektar dan produksi mencapai 788.874 ton. Karet juga merupakan tanaman yang banyak ditanami dengan luas tanam sebanyak 40.751 hektar dan produksi 40.423 ton.

B. Kehutanan

Wilayah Kabupaten Langkat meliputi kawasan hutan lindung seluas ±266.232 Ha (42,51%), kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas ±213.985 Ha, kawasan timur

laut seluas ± 9.520 Ha, kawasan hutan penyangga seluas ± 7.600 Ha, kawasan Hutan Bakau seluas ± 20.200 dan kawasan lainnya ± 14.927 Ha (BPS Kab. Langkat, 2014). Di Kabupaten Langkat, banyak terjadi alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, sebanyak 366 hektar hutan lindung di alih fungsikan secara illegal menjadi perkebunan oleh perusahaan swasta tertentu (kompas, 2019).

Tabel 4.15

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota (Ha) 2020

Kabupaten/Kota	Tahun SK 2018					Jumlah Luas Hutan dan Perairan
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat di Koservasi	
Nias	24 978,38	0	3 363,40	0	0	28 341,86
Mandailing Natal	130 394,39	72 448,60	146 628,67	13 245,00	19 876,73	382 593,39
Tapanuli Selatan	134 413,90	13 714,39	82 990,30	44 528,51	0	275 593,39
Tapanuli Tengah	59 359,56	0	37 278,14	4 163,58	0	100 801,28
Tapanuli Utara	123 375,67	2 018,90	48 957,18	46 508,88	0	220 760,62
Toba	61 032,19	21 284,81	10 724,30	9 719,41	386,76	103 147,56
Labuhan Batu	18 123,78	0	358,90	14 573,64	0	33 055,97
Asahan	45 731,98	45,28	775,99	8 297,41	24 840,65	79 691,32
Simalungun	23 459,26	1 279,28	9 497,32	68 327,64	0	102 563,50
Dairi	53 621,28	267,70	30 323,64	13 567,43	0	97 980,05
Karo	63 504,51	22 738,88	9 218,91	6 624,05	0	102 086,35
Deli Serdang	8 716,72	21 770,20	3 063,83	26176,67	0	59 700,43
Langkat	5 372,80	212 021,86	39 146,38	24 805,51	0	281 349,52

Nias Selatan	72 541,88	8 211,57	21 512,50	72 320,96	0	174 587,91
Humbang Hasundutan	55 939,23	415,98	14 080,92	56 241,23	0	126 677,37
Pakpak Barat	43 429,72	5 862,10	46 355,88	11 394,48	0	107 042,19
Samosir	53 199,53	0	1,86	17 608,07	0	70 809,46
Serdang Bedagai	5 375,24	0	64,86	4 248,74	0	9 688,84
Batu Bara	1 964,88	0	1 693,23	0	0	3 658,11
Padang Lawas Utara	87 992,95	5 308,05	35 105,28	82 074,70	0	210 480,98
Labuhan Batu Selatan	7 175,30	30 563,93	38 896,19	95 988,73	1 696,37	207 699,12
Labuhan Batu Utara	41 144,83	2 100,42	3 749,34	28 800,96	2 470,59	44 296,61
Nias Utara	25 104,55	898,93	37 475,95	20 237,13	25 032,50	124 789,25
Nias Barat	9 770,11	0	10 060,87	4 679,50	4 146,12	43 991,04
Sibolga	204,01	0	3 638,22	0	519,22	204,01
Tanjung Balai	0	0	0	0	0	0
Pematang Siantar	0	0	0	0	0	0
Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0
Medan	0	0	0	0	0	0
Binjai	0	0	0	0	0	0
Padang Sidempuan	0	0	0	724,53	0	724,53
Gunung Sitoli	2 854,61	0	0	0	61,60	2 916,21
Sumatera Utara	1199 336,15	420 949,84	634 935,06	674 856,32	79 030,44	2 995 284,67

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 4.15 diatas luas kawasan hutan lindung Kabupaten Langkat sebesar 5 372,80 Ha, suaka alam dan pelestarian alam sebesar 212 021,82 Ha, hutan dengan produksi terbatas sebesar 39 146,38, hutan dengan produksi yang tetap sebesar 24 805,51, jumlah luas hutan dan perairan di Kabupaten Langkat sebesar 281 349,52 Ha. Kabupaten Langkat tidak memiliki hutan dengan produksi yang dapat di konservasi. Kabupaten Langkat memiliki luas hutan mangrove yang paling dominan di Provinsi Sumatera Utara yakni 50.650,93 Ha dan menempati urutan pertama lahan hutan mangrove paling rusak di Sumatera Utara yakni seluas

13.526 ha (republika.co) atau sekitar 25%. Sedangkan yang ada dalam kondisi sedang ada 23.564 Ha dan dalam proses rehabilitasi seluas 4.415 ha, hutan mangrove dengan kondisi rusak dan di rehabilitasi di Kabupaten Langkat ada di desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat.

C. Perikanan

Perikanan menjadi sektor paling unggul di Indonesia karena kondisi geografis Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya melimpah di bidang perikanan. Kekayaan alam yang besar di bidang kelautan seharusnya berdampak positif bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir khususnya nelayan.



Gambar 4.9
Persentase Nelayan di Kabupaten Langkat 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat yang berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan sebanyak 17.618 orang. Sebanyak 83,8% merupakan nelayan laut, 3,98% penangkap ikan sungai, 8,75% petani ikan tambak dan sisanya merupakan petani ikan kolam dan budidaya mina padi. Kabupaten Langkat memiliki laut yang luas dan menyebar di beberapa Kecamatan seperti Tanjung Pura, Sei Lapan, Gebang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Pematang Jaya, Besitang dan Secanggang.

Tabel 4.16

**Produksi Ikan Menurut Jenis Penangkapan dan Produksi Benih Ikan/ Udang
di Kabupaten Langkat 2021**

Uraian Komodit	Satuan	Produksi
I. Produksi Ikan		58 099,34
A. Perikanan Tangkap		33 139,89
1. Penangkapan Ikan Laut		33 088,44
a. Ikan Laut	Ton	33 088,44
b. Hasil Laut Lainnya	Ton	-
2. Penangkapan Ikan Perairan Umum		51,46
a. Ikan Darat (sungai/rawa)	Ton	51,46
B. Perikanan Budidaya		24 959,45
1. Budi Daya Laut (Keramba Jaring Apung)	Ton	109,07
2. Budi Daya Air Payau (tambak/keramba)	Ton	24 231,06
3. Budi Daya Air Tawar (Kolam)	Ton	422,52
4. Budi Daya Sawah	Ton	-
5. Budi Daya Perairan Umum (Keramba)	Ton	196,79
II. Produksi Benih Ikan/Udang		
A. Benih/Benur Udang		11 000 000,00
1. Udang Windu (PI. 10-15)	Ekor	5 000 000,00
2. Udang Vaname (PI.10-15)	Ekor	6 000 000,00
3. Udang Galah (PI. 10015)	Ekor	-
B. Benih Ikan		4 050 000,00
1. Mas (Uk. 105 cm)	Ekor	500 000,00
2. Tawes (Uk. 1-5 cm)	Ekor	-
3. Nila (Uk.1-5 cm)	Ekor	1 350 000,00
4. Gurame (Uk. 1-5 cm)	Ekor	200 000,00
5. Lele Dumbo (Uk. 1-5 cm)	Ekor	2 000 000,00

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Dapat dilihat pada tabel 4.16 produksi perikanan di Kabupaten Langkat yang paling banyak yaitu pada hasil penangkapan ikan laut yakni sebanyak 33.088,44 ton, sedangkan perikanan budidaya yang paling banyak yaitu produksi

perikanan budi daya air payau sebanyak 24.231,06 ton. Sementara itu produksi benih udang terbanyak yaitu produksi udang vaname 6.000.000 ekor dan produksi benih ikan yaitu ikan lele dumbo sebanyak 2.000.000 ekor.

4.2. Melakukan Analisis Deskriptif Tentang Perkembangan Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Dalam Mencapai Konsep *Blue Economy* di Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari perkebunan sawit, peternakan maupun perikanan. Apalagi Kabupaten Langkat memiliki potensi ladang gas baru, termasuk juga kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah ini maupun juga daerah ini maupun juga daerah lainnya sehingga jika dibangun kawasan industri akan banyak mendatangkan investor. Kabupaten Langkat mempunyai mayoritas penduduknya bermata pencarian bidang pertanian, perkebunan dan perikanan tentunya harus mampu menjadikan bidang ini sebagai bidang unggulan. Dengan kebijakan investasi yang tepat, Kabupaten Langkat dapat mengatasi tantangan pembangunan potensi sumber daya alam dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor tersebut.

Potensi ekonomi Kabupaten Langkat sebagian besar terletak pada produksi pertanian, kehutanan dan perikananannya. Produksi lainnya termasuk tanaman pangan, perkebunan dan pertanian lainnya, industri pengolahan serta jasa. Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan hasil pertanian dan perikanan yang sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Langkat.

Tabel 4.17
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan.

Uraian	2019	2020	2021
Nilai PDRB			
ADHB	16 471,77	17 095,45	18 658,42
ADHK 2010	12 737,61	12 872,40	13 359,53
Proporsi terhadap total PDRB (%-ADHB)	38,74	39,57	40,30
Pertumbuhan (%-ADHK 2010)	5,69	1,06	3,78
a. pertanian, peternakan, perburuan dan jasa Pertanian	6,17	1,30	4,42
b. kehutanan dan penebangan kayu	0,03	2,81	-0,24
c. perikanan	0,15	-3,01	-5,40

Sumber: PDRB Kabupaten Langkat 2021 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 4.17 diatas pada tahun 2021, nilai PDRB ADHB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 18,66 triliun rupiah, sedangkan nilai PDRB ADHK 2010 mencapai 13,36 triliun rupiah. Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB total sebesar 40,30%, meningkat dari tahun lalu yaitu 39,57%. Selanjutnya, laju pertumbuhannya mengalami percepatan dari 1,06% tahun 2020 menjadi 3,78% pada tahun 2021. Sub lapangan usaha tanaman perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap lapangan usaha pertanian yaitu tercatat sebesar 56,21% dari seluruh nilai tambah pertanian, diikuti oleh sub lapangan usaha peternakan, tanaman pangan dan perikanan yaitu sebesar 18,50% dan 6,27% secara berurutan.

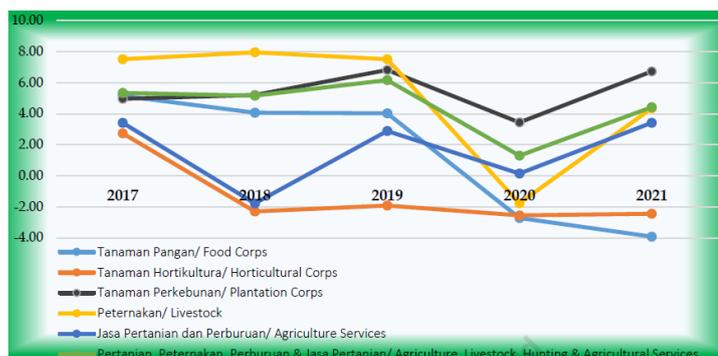
Tabel 4.18

Peranan Sublapangan Usaha terhadap PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 2019-2021 (%)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	90,53	90,90	91,97
a. Tanaman Pangan	15,83	15,40	13,43
b. Tanaman Hortikultura	3,32	3,18	2,85
c. Tanaman Perkebunan	51,26	52,68	56,21
d. Peternakan	19,16	18,69	18,50
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,96	0,95	0,97
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,84	1,89	1,76
3. Perikanan	7,63	7,21	6,27
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100.00	100.00	100.00

Sumber: PDRB Kabupaten Langkat 2021 (www.bps.go.id)

Menurut tabel 4.18 diatas pada tahun 2021, sublapangan usaha hortikultura dan kehutanan mengalami kontraksi. Sub lapangan usaha lainnya mengalami percepatan. Sublapangan usaha perkebunan sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB lapangan usaha pertanian mengalami percepatan dari sebesar 3,55% tahun 2020 menjadi 6,87% pada tahun 2021. Namun, sublapangan ini mencapai pertumbuhan tertinggi dibanding sub lapangan usaha lainnya. Sublapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu mengalami percepatan sebesar 1,89% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 1,76% pada tahun 2021. Sub lapangan usaha perikanan mengalami percepatan sebesar 7,21% tahun 2020 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 6,72%.



Gambar 4.10
Laju Pertumbuhan Sublapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 2017-2021 (%)

Dapat dilihat pada gambar diatas sublapangan usaha peternakan mengalami pertumbuhan positif 4,35% pada tahun 2021, sedangkan sublapangan usaha perikanan mengalami perlambatan dari sebesar -3,01% pada tahun 2020 menjadi -5,40% pada tahun 2021. Kabupaten Langkat memiliki potensi perikanan yang sangat besar mulai dari 10.000 Ha potensi tambak, 40.000 keramba budidaya ikan laut, 1.000 Ha budidaya air tawar, mempunyai produk ikan olahan 307,48 ton, produksi perikanan tangkap sebanyak 33.139 ton dengan jumlah nelayan sebanyak 19.292 jiwa serta memiliki 7.841 unit armada kapal penangkapan ikan.

Tabel 4.19

Produksi Perikanan Tambak Kabupaten Langkat Tahun 2020

Jenis Tambak	Volume Produksi	Nilai Produksi
Tambak Intensif	4.829.240	420.303.840.000
Tambak Sederhana	675.540	40.532.400.000
Tambak Semi Intensif	323.880	41.391.640.000

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP (www.kkp.go.id)

Pada tabel 4.19 telah diketahui ada 3 jenis tambak di Kabupaten Langkat yang menghasilkan sumber daya perikanan. Produksi tambak yang paling banyak yaitu Tambak intensif. Di wilayah pesisir Kabupaten Langkat terdapat masyarakat yang bermata pencaharian nelayan dan bekerja sebagai pembudidaya ikan. Produksi tambak dari masing-masing jenisnya cenderung fluktuatif. Agar ada nilai

tambah pada ikan, hasil tambak biasanya diolah kembali untuk dijadikan makanan. Dengan demikian akan semakin mendukung dan mengembangkan industri rumah tangga yang ada di sekitar wilayah pesisir.

Namun data tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi tambaknya fluktuatif atau naik turun. Hal ini berarti dalam pengelolaan tambak harus ditingkatkan lagi agar bisa mempertahankan jumlah ataupun kualitas yang dihasilkan dari tambak tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Langkat harus terus focus untuk pengembangan beberapa komoditi perikanan budidaya karena telah berhasil memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penyediaan perikanan untuk kebutuhan warga di daerah. Maka dari itu sebanyak 7.000 orang nelayan yang berada di Sembilan kecamatan pesisir pantai timur sudah diasuransikan melalui asuransi nelayan dan asuransi pembudidaya.

Kabupaten Langkat juga memiliki potensi hutan mangrove seluas 50.650,93 Ha dengan menempati urutan pertama lahan hutan mangrove paling rusak di Sumatera Utara seluas 13.526 Ha yang berada di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat, Desa Lubuk Kertang. Sedangkan yang berada dalam kondisi sedang sedang ada 23.564 Ha dan dalam proses rehabilitasi ada seluas 4.415 Ha. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan maka kebutuhan akan lahan semakin meningkat pula. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas konversi lahan mangrove.

Tabel 4.20

Jumlah Luas Hutan Mangrove di Kabupaten Langkat 1989-2019 (Ha)

Kecamatan	1989	1999	2009	2019
Babalan	1.954.8657	992.8168143	440.5948	854.9788
Besitang	1,418.8031	704.8458215	968.9599	563.5068

Brandan Barat	3,160.3869	1603.118014	2,255.7780	2.647.5011
Gebang	4,090.0903	229,427.2781	3,748.3098	3,100.5593
Pangkalan Susu	7,926.6856	622,931.5626	8,449.6702	8,198.2898
Pematan Jaya	467.1628	884,3756.837	1,076.9004	1,013.8851
Secanggang	7,871.3481	5548.901592	7,342.9616	7,171.4829
Sei Lapan	121.9560	161.6180848	93.2799	93,2799
Tanjung Pura	9,297.0651	8205.71223	5,593.0268	5,068,5564
Total Luas	36,308.3636	26,624,98	29,939,815	28,702,0402

Sumber: Mangrove Forest Cover Journal 2019

Pada tabel 4.20 diatas dapat dilihat bahwa jumlah luas tutupan mangrove di 9 kecamatan di Kabupaten Langkat, Kecamatan dengan luasan terbesar ada di Kecamatan Pangkalan Susu dan jumlah yang paling terkecil luasannya adalah hutan mangrove di Kecamatan Sei Lapan, tingkat perubahan luasan lahan mangrove selama 30 tahun terjadi di rentang tahun 1989-1999. Faktor utama dari kondisi perubahan tutupan luasan mangrove adalah konversi kawasan hutan mangrove yang terjadi di seluruh kecamatan. Kondisi penurunan luasan tutupan mangrove dipengaruhi faktor dominan berupa penggunaan lahan untuk kegiatan pertambakan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit.

Dari luasan data tersebut dapat dilihat bahwa selama 1989-1999 telah terjadi penurunan luasan lahan mangrove di Kabupaten Langkat sebesar 9.666,23 ha, tingginya antusias masyarakat pesisir dalam memperoleh pendapatan ekonomi yang lebih dari hasil melaut, kegiatan budidaya tambak udang dan bandeng menjadi kegiatan usaha warga dengan membuka lahan mangrove untuk dibuat lubang tambak sehingga kondisi ini menjadi pemicu berkurangnya luasan tutupan mangrove (Pratama et al., 2016). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yakni pada rentan tahun 1989-1999 Kabupaten Langkat menjadi kegiatan pertambakan sebagai sumber ekonomi baru dan peristiwa ini terjadi hampir disemua kecamatan,

hal ini dikarenakan tingkat pendapatan dari hasil udang, kepiting sangkak dan bandeng mencapai keuntungan yang lebih stabil dan efektif dari segi waktu, hanya saja kondisi ini memperburuk lingkungan karena efek industri tambak yang tidak ramah lingkungan dan cemaran hasil sampingan tambak merusak ekosistem mangrove. Berdasarkan pemaparan hasil pembandingan antara tahun 1989-2019 terjadi penurunan luasan mangrove yang cukup berarti pada Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa selama 30 tahun terakhir 1989-2019 telah terjadi perubahan luasan tutupan mangrove yang dipengaruhi oleh dua faktor penting yakni antroposentris dan kondisi alamiah, tahun 1989 jumlah luasan mangrove di Kabupaten Langkat secara umum masih mencapai 36.308,3636 ha, saat pengukuran 2019 luasan lahan telah menjadi 28.702,0402 ha.

Perluasan tanaman sawit telah menghancurkan 75 persen atau 62.800 hektar kawasan pesisir dan kawasan tutupan hutan tersisa hanya 25 persen (Kompas, 30 Jan 2010). Ekspansi kebun sawit menyebabkan perkampungan nelayan jadi rentan terhadap banjir, dan mereka makin sulit mencari ikan dan udang di wilayah tangkapnya sendiri. Konversi lahan besar- besaran itu telah menimbulkan berbagai macam persoalan. Secara ekologis, konversi telah menyebabkan menurunnya fungsi ekologis daerah tersebut. Masyarakat sekitar juga telah merasa termarginalkan karena penguasaan dan akses terhadap wilayah semakin tertutup. Secara ekonomi mereka juga merasa dirugikan karena sumberdaya alam yang menjadi sumber pendapatan mereka, seperti nilai ekonomi mangrove, kepiting bakau, udang, ikan, dll., menjadi berkurang secara signifikan.

Selain itu, pemanfaatan sumber daya yang ada dipesisir tidak hanya melalui hasil perikananannya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata. Karena dengan

adanya wilayah pesisir, maka akan mendorong perkembangan wilayah dan juga pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Langkat. Berikut adalah beberapa wisata pesisir yang ada di Kabupaten Langkat:

1. Getek online, atau rakit bambu berukuran besar untuk wisata susur sungai dengan kapasitas maksimal delapan orang dalam sekali trip. Menikmati pemandangan indah dan tenang yang ditemani olah santapan udang dari hasil budidaya warga sekitar, juga menikmati kelapa segar yang dipetik dan diminum langsung dialokasi, membeli makanan-makanan ringan yang warga sekitar tawarkan. Di wisata yang beralamat di Desa Wisata Pematang Serai, Tanjung Pura ini semua makanan atau minuma itu dapat dipesan secara online.
2. Puncak Akui berada di Desa Perteguhen, Pamah seelier, Kecamatan Sei Bengei, degan konsep *Eco Tourism* yang menyediakan fasilitas camping ground. Kegiatan yang bisa dilakukan di sana ialah trekking hutan, fotografi alam, serta titik pandang matahari terbit.
3. Desa Jering Halus, berlokasi di Kecamatan Secanggang yang menjadi sasaran utama untuk melepas hobi sebagian besar pemancing. Terdapat ribuan hektar hutan bakau dan pemandangan laut lepas yang sangat menakjubkan disekeliling kawasan ini
4. Pantai Kuala Serapuh, berada di Kecamatan Tanjung Pura, juga bertempat di pesisir Perairan Selat Malaka, dengan pesona alam yang indah dan pantai pasing putih yang landai, lebih kurang seluas enam hektar. Tumbuh hutan Cemara hijau yang menjadi habitat berbagai jenis burung, kera dan monyet sebagai latar belakang

pantai ini. Kegiatan volly pantai, memancing, camping, dan lomba layang-layang bisa dilakukan di sana. Ada fasilitas seperti home stay serta sajian makanan ringan khas melayu.

5. Pantai Barawe, dengan hamparan pasir putih yang menghadap ke Selat Malaka cukup indah dan nyaman untuk kegiatan wisata bahari, yang berada di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu. Pantai ini dikenal sebagai pulau penghasil terasi atau belacan.

Jadi, Potensi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Langkat cukup banyak dan bermacam-macam. Mulai dari hasil kelautan dan perikanan yang melimpah, lalu potensi wisata yang berkaitan dengan pesisir. Terdapat banyak industri rumah tangga yang mengolah ikan laut maupun ikan tambak. Pangsa pasar dalam hasil olahan ikannya cukup bagus, karena diperdagangkan di wilayah lokal, luar daerah sampai ke luar negeri juga. Selain terdapat berbagai potensi, wilayah pesisir Kabupaten Langkat juga mempunyai masalah dalam beberapa hal. Diantaranya, masyarakat yang cenderung miskin, lingkungan yang kumuh, sumber daya manusia masih rendah, serta berbagai masalah dalam pemanfaatan sumber daya kelautannya. Dalam mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah membuat beberapa program untuk wilayah pesisir Kabupaten Langkat. Program-program pengembangan wilayah pesisir selalu berkelanjutan setiap tahunnya.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Langkat memiliki banyak strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menghadapi *Blue Economy*. Kebijakan nasional tentang *Blue Economy* telah ditetapkan secara nasional (KKP,2014), namun dalam pelaksanaanya kurang dilakukan sosialisasi secara nyata tentang program *Blue Economy*. Pentingnya pemberdayaan

masyarakat dijalankan sebagai salah satu upaya menghadapi *Blue Economy*, karena pada kriteria ini merupakan langkah awal untuk menerapkan konsep *Blue Economy*. Diberdayakannya masyarakat adalah bekal untuk melaksanakan konsep baru tersebut. Dalam menerapkan *Blue Economy*, harus tercipta sumber daya manusia yang tergali potensinya agar siap dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menjalankan konsep itu secara maksimal. Empat strategi dalam kriteria pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir agar tercipta kelompok masyarakat yang mempunyai potensi serta bisa dipertanggungjawabkan.
2. Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat pesisir bisa lebih mudah untuk melengkapi ataupun memulai usahanya serta lebih terarah.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, hal ini bisa melatih masyarakat agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan secara baik, sehingga ada kesiapan untuk menghadapi *Blue Economy*.

Model sosialisasi yang diharapkan yaitu baik berupa pemaparan konsep *Blue Economy* maupun penerapan secara nyata di lapangan, sehingga nantinya dapat diikuti oleh masyarakat pembudidaya disekitar kawasan pengembangan teknologi yang layak dan prospektif untuk dikembangkan masih sangat kurang dikenal oleh masyarakat (pembudidaya), terutama teknologi (metode budidaya, komoditas unggulan pengembangan, dan penanganan penyakit) untuk mendukung penerapan *Blue Economy*. Berbagai teknologi inovatif yang telah disiapkan oleh Badan Litbang Kelautan dan Perikanan (Anonymous, 2013), bisa menjadi alternatif

pilihan untuk mendukung pelaksanaan *Blue Economy* di wilayah pesisir Kabupaten Langkat.

Penerapan *Blue Economy* di bidang kelautan dan perikanan masih harus diperkaya dengan kebijakan kelautan dan perikanan termasuk didalamnya ketersediaan teknologi yang prospektif, peningkatan sumber daya manusia, dan sosialisasi konsep *Blue Economy*. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan konsep *Blue Economy* semestinya di arahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara seimbang melalui diversifikasi kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan jumlah dan keragaman produk, namun tetap menjamin perlindungan lingkungan dari kerusakan. Dengan memperhatikan strategi pengembangan yang ada tersebut, diharapkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan bisa berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta dapat membawa Indonesia menjadi poros maritim dunia.

4.3 Melakukan Estimasi Terhadap Indikator-Indikator yang Berpengaruh pada Indeks Desa Membangun (IDM)

4.3.1 Hasil Analisis Regresi

Tabel 4.21

Hasil Pengolah Data Model Regresi

Dependent Variable: LOG(IDM)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/25/22 Time: 14:45
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.670758	0.058685	-11.42980	0.0000
LOG(SK)	0.058221	0.016815	3.462353	0.0010
LOG(PJ)	-0.001515	0.014334	-0.105707	0.9161
LOG(BA)	-0.020405	0.007933	-2.572297	0.0124
R-squared	0.243680	Mean dependent var		-0.436775
Adjusted R-squared	0.208773	S.D. dependent var		0.043713
S.E. of regression	0.038883	Akaike info criterion		-3.600281
Sum squared resid	0.098274	Schwarz criterion		-3.470768
Log likelihood	128.2097	Hannan-Quinn criter.		-3.548899
F-statistic	6.980834	Durbin-Watson stat		0.411858
Prob(F-statistic)	0.000383			

Keterangan: *** *Level of Signifikan*, ***1%, **5%

Dari hasil regresi diatas, dari tiga variabel bebasterdapat dua variabel bebas yang signifikan dengan derajat kesalahan 5%. Namun ditemukan masalah secara parsial terdapat variabel yang tidak signifikan dalam hasil diatas yaitu PJ (Panjang Jalan) dan didapati bahwa adjusted R-squarenya bernilai 0,243680 atau 24,36%.

A. Penaksiran

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R Square) menunjukkan proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independent) secara bersama-sama. Berdasarkan dari

model estimasi diatas yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dilihat nilai R^2 sebesar 0,246380 artinya secara bersama-sama variabel Sarana Kesehatan (SK), Panjang Jalan (PJ) dan Bencana Alam (BA) memberikan variasi penjelasan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 24,63%, sedangkan 77% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

2) Korelasi (R)

Dari hasil regres pada model diatas yang sudah ditransformasikan kelogaritma natural, diperoleh R sebesar 0,2474207802 artinya bahwa derajat kerataan antara SK (Sarana Kesehatan), PJ (Panjang Jalan), BA (Bencana Alam) dengan IDM (Indeks Desa Membangun) adalah sebesar 0,2474207802.

Suatu variabel bebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai di atas $\alpha = 5\%$ dan dikatakan signifikan apabila nilai probability dari variabel bebas tersebut lebih kecil dari 5%.

B. Interpretasi Hasil

Dari data yang telah diperoleh, maka model regresinya adalah sebagai berikut.

$$IDM_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1.SK_{rt} + \alpha_2. PJ_{rt} + \alpha_3. TB_{rt} + \epsilon_{rt}$$

Maka interpretasi hasil model pertama sebagai berikut:

$$IDM_{rt} = -0.670758 + (0.058221) SK_{rt} + (-0.001515) PJ_{rt} + (-0.020405) TB_{rt} + \epsilon_{rt}$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh sebuah interpretasi model regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:

- a. Variabel SK (Sarana Kesehatan) mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun, sebab koefisien $\alpha_1 = 0.058221$ artinya apabila SK ditambah sebanyak 1 unit maka akan meningkatkan nilai IDM sebesar 0.05%. Hasil ini ternyata sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika sarana kesehatan meningkat maka akan meningkatkan Indeks Desa Membangun
- b. Variabel PJ (Panjang Jalan) mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Desa Membangun, sebab koefisien $\alpha_2 = -0.001515$ artinya apabila PJ ditambah sebanyak 1 km maka akan meningkatkan nilai IDM sebesar 0,15%. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika panjang jalan meningkat maka akan meningkatkan Indeks Desa Membangun.
- c. Variabel BA (Bencana Alam) mempunyai pengaruh negatif terhadap Indeks Desa Membangun, sebab koefisien $\alpha_3 = -0.020405$ artinya Bencana Alam tidak berpengaruh apa apa dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun.

C. Konstanta dan Intersep

Didalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Desa Membangun (IDM) terdapat nilai konstanta sebesar 0.670758 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat nilai rata-rata Indeks Desa Membangun cenderung meningkat ketika variabel penjelas tetap. Untuk interpretasi hasil regresi independent akan dijelaskan sebagai berikut:

1. SK (Sarana Kesehatan)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel SK adalah 0.05821 dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Desa

Membangun untuk 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat dengan nilai *probability* sebesar 0.0010 ($< \alpha 5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan SK dengan Indeks Desa Membangun adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika SK meningkat sebanyak 1 unit maka Indeks Desa Membangun akan meningkat sebesar 0.05%. Oleh karena itu, variabel SK terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

2. PJ (Panjang Jalan)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel PJ adalah -0.001515 dimana variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Desa Membangun pada 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat dengan nilai *probability* sebesar 0.9161 ($> \alpha 5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara PJ dengan Indeks Desa Membangun untuk 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika PJ meningkat sebesar 1 Km maka Indeks Desa Membangun meningkat sebesar 0,15%. Oleh karena itu, variabel PJ berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Desa Membangun.

3. TB (Tanggap Bencana)

Dari hasil regresi nilai koefisien variabel TB adalah -0.020405 dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun pada 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat dengan nilai *probability* sebesar 0.0124 ($< \alpha 5\%$). Hal ini menunjukkan bahwa terhadap hubungan yang negatif dan signifikan antara TB dengan Indeks Desa Membangun, sehingga dapat dikatakan bahwa jika TB meningkat sebanyak 1 unit maka Indeks Desa Membangun meningkat sebesar 0,02%.

D. Uji Statistik

1) Uji Signifikan Parameter (Uji-T)

Uji-t statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel SK, PJ, dan TB dengan uji autoregressive terhadap nilai Indeks Desa Membangun di 23 Kecamatan di Kabupaten Langkat. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai t tabel yaitu: $df (n) - k = 276 - 4 = 272$, $\alpha = 5\%$ maka nilai t tabel sebesar 1,968724.

2) Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan autoregressive pada model, variabel SK, PJ, TB terhadap nilai Indeks Desa Membangun maka nilai f tabel sebesar 1,650496 (< 15%) sedangkan F hitung adalah sebesar 6.980834. hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

E. Uji Asumsi Klasik

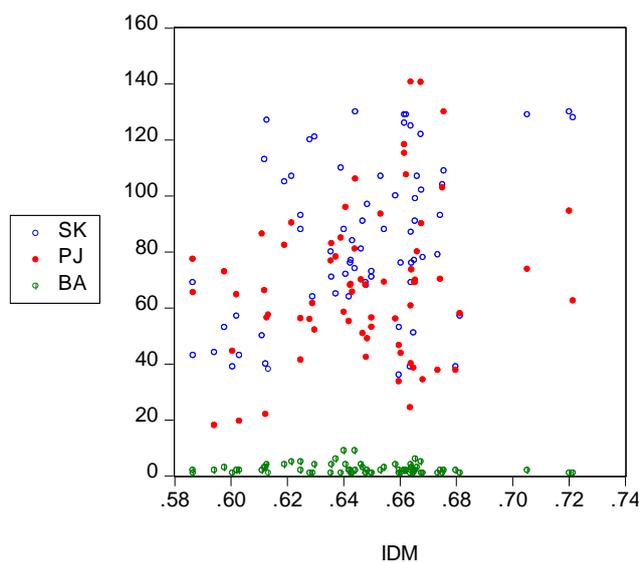
1. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang pertama ataupun yang kedua terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas dan dapat

dilihat dari hasil analisa model tidak ada ditemukan multikolinearitas. Ada variabel dependen yang tidak signifikan terhadap variabel terikat dalam uji parsial.

2. Uji Heterokedastisidas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual dari satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisidas dan jika berbeda disebut tidak heterokedastisidas. Model regresi yang baik adalah terbebas dari heterokedastisidas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisidas, dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisidas sebagai berikut:



Gambar 4.11 Scatterplot Model

Sumber: Eviews 10 dan diolah

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik titik menyebar secara berkelompok secara acak ke atas, samping dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisidas pada model estimasi.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka dilakukan uji statistik Durbin Watson yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh pada model pertama setelah dilakukan pengujian dalam bentuk logaritma natural diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 0.411858 artinya pada model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga model bisa di estimasi melalui variabel bebas yang digambarkan melalui variabel IDM.

4. Uji Haussman

Untuk menentukan model regresi pada data panel maka dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 4.22

Uji Haussman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.788983	3	0.0008

Dari hasil diatas, maka didapat nilai *random effect* sebesar 0.0008. nilai *probabilitynya* < 0.05 maka model yang dipilih adalah *fixed effect*, disimpulkan bahwa *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

4.4 Mengidentifikasi dan Membuat *Blue Print* Sebagai Landasan Dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan Desa Agar Tepat Sasaran Sebagai *Waterfront Village* Untuk Desa Perlis dan Desa Kelantan

Desa Perlis dan Desa Kelantan merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat dan merupakan desa yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera seluas 611 Ha. Untuk sampai ke Desa Perlis dan Desa Kelantan dari kota Pangkalan Brandan (sekitar 42 km dari Stabat), secara geografis Desa Perlis dan Kelantan merupakan desa yang dikelilingi oleh sungai, salah satunya sungai babalan. Desa Perlis mempunyai luas 6,1 km dengan jumlah penduduk 4.624 jiwa, sedangkan Desa Kelantan mempunyai luas 6,3 km dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 1.328 jiwa dengan kepadatan penduduk 211 km². Mayoritas penduduk di Desa Perlis dan Desa Kelantan berprofesi sebagai nelayan mencapai 80%, bekerja sebagai pedagang 3%, wiraswasta 7%, guru 4%, PNS 1%, buruh 3% dan sebagai petani 2%.

Seperti masyarakat lainnya yang tinggal didaerah pesisir, masyarakat nelayan Perlis dan Kelantan mengalami sejumlah masalah antara lain: kemiskinan, kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi yang datang setiap saat. Oleh karena itu rata-rata keluarga nelayan di Desa Perlis dan Kelantan mengharapkan sumber pendapat dari hasil laut, penghasilan lain yaitu pembuatan terasi industri rumahan. Desa Perlis dan Kelantan mempunyai potensi yang sangat luar biasa, apalagi Kecamatan Brandan Barat merupakan daerah eksplorasi PT Pertamina yang pertama di Indonesia, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik miniatur Indonesia. Namun potensi minyak dan gas bumi sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, maka Kilang Pertamina di tutup, penutupan kilang ini

sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagian wilayah Kecamatan Brandan Barat juga merupakan lahan konservasi sumber daya alam TNGL (RPJMD, 2019).

Selain itu Kecamatan Brandan Barat mempunyai potensi untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kawasan perikanan tangkap, khususnya Desa Perlis dan Kelantan. Kecamatan Brandan Barat memiliki unit pengolahan ikan yang terdiri dari pengolahan pengasinan 34 unit, pemindangan 27 unit dan pembuatan terasi 15 unit (BPS,2021). Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 dibangun pos perikanan untuk para nelayan dari Desa Perlis dan Kelantan, namun saat ini kondisinya cukup memprihatinkan (Harian9.com). Hasil tangkapan nelayan Desa Perlis dan Kelantan dewasa ini antara lain gembung, bawal, senangin, kuring, cerebung, kepiting, dan udang. Ikan cerebung merupakan ikan musiman yang identik dengan desa ini, ikan cerebung kering (pakang) telah menjadi komoditi hasil perikanan penduduk desa. Ikan cerebung kering (pakang) ini dikirim sesuai dengan pesanan berbagai daerah seperti Medan, Aceh, Pekanbaru, bahkan di ekspor ke Singapura, Malaysia dan China.

Daerah pesisir pantai tidak terlepas dari adanya ekosistem, Desa Perlis dan Kelantan di tumbuh oleh hutan mangrove yang mempunyai fungsi fisik menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut (abrasi) dan intrusi air laut dan mengolah/daur ulang bahan limbah, fungsi biologis menjadi tempat pembenihan ikan, udang, dan tempat pemijahan beberapa biota air, tempat bersarangnya burung, menjadi habitat alami bagi berbagai jenis biota, fungsi ekonomi sebagai sumber bahan bakar (arang), lokasi pertambakan, tempat pembuatan garam, dan bahan bangunan (Saenger; Salim; Nameen, 2005).

Mangrove di Kecamatan Brandan Barat dapat dijadikan ekowisata menikmati keindahan alam dengan upaya melestarikannya. Namun, sekarang ini hutan mangrove di Desa Perlis dan Kelantan sudah banyak rusak dan memberikan dampak negatif terhadap nelayan karena mengakibatkan biota laut semakin menurun dan ekosistem mangrove semakin hilang. Rusaknya hutan mangrove dikarenakan oleh pengalihan lahan menjadi kebun kelapa sawit, dijadikan lahan pertambakan, permukiman, lahan pabrik dan ekowisata mangrove yang mengakibatkan gangguan kondisi ekologi mangrove maupun siklus rantai makanan yang terputus pada ekologi perairan.

Mengingat besarnya kerugian akibat hilangnya/rusaknya mangrove dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan mangrove sebagai sumber kehidupannya, maka penting dilakukan kegiatan rehabilitasi/restorasi, pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat dan upaya kegiatan yang mendasarkan konsep *Blue Economy*. Besarnya manfaat yang terdapat pada hutan mangrove di Desa Perlis dan Kelantan mengakibatkan hutan ini dieksploitasi secara berlebihan dan mengalami penurunan kualitas lingkungan yang cukup parah, sehingga mengakibatkan berkurangnya luas wilayah hutan mangrove dan juga menurunkan fungsi ekologis yang mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove. Untuk itu perlu adanya *blue print* untuk pembangunan Desa Perlis dan Kelantan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat desa, sebagai pedoman bagi pemerintah, sebagai kemampuan kapasitas pendanaan untuk pembangunan desa, dan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Langkat Kecamatan Brandan Barat.

Dalam membangun suatu daerah tentu perlu adanya identifikasi permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan adalah sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai di masa mendatang dengan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena adanya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan terdapat 5 (lima) masalah pokok, yaitu:

- a) Belum mandirinya desa dan rendahnya partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

Masalah ini disebabkan karena belum optimalnya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial. Pada level outcomes (sasaran), masalah yang terjadi berkaitan dengan belum optimalnya peningkatan kesejahteraan sosial, belum optimalnya pemberdayaan perempuan, belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya lokal, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan,

- b) Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar masih tergolong cukup rendah. Kondisi gizi terutama prevalensi gizi buruk dan stunting masih menjadi perhatian. Pada tahun 2017, prevalensi kekurangan gizi (underweight) dan stunting (pendek dan sangat pendek) sebesar

0,35% dan 4,6%. Akar-akar masalah penyebab masalah pokok ini berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, perpustakaan, kesehatan, dan pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga.

c) Belum signifikannya peningkatan pertumbuhan Ekonomi

Masalah ini terkait dengan potensi ekonomi wilayah pesisir dan sumber daya alam di Kecamatan Brandan Barat yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan dampak ekonomi kepada masyarakat yang dicirikan dengan laju pertumbuhan PDRB. Rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, belum optimalnya kinerja infrastruktur pengairan, belum optimalnya pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan peternakan, rendahnya daya saing perikanan serta belum optimalnya pemberdayaan nelayan

d) Rendahnya kinerja infrastruktur dan tata ruang dalam penciptaan lingkungan hidup berkelanjutan

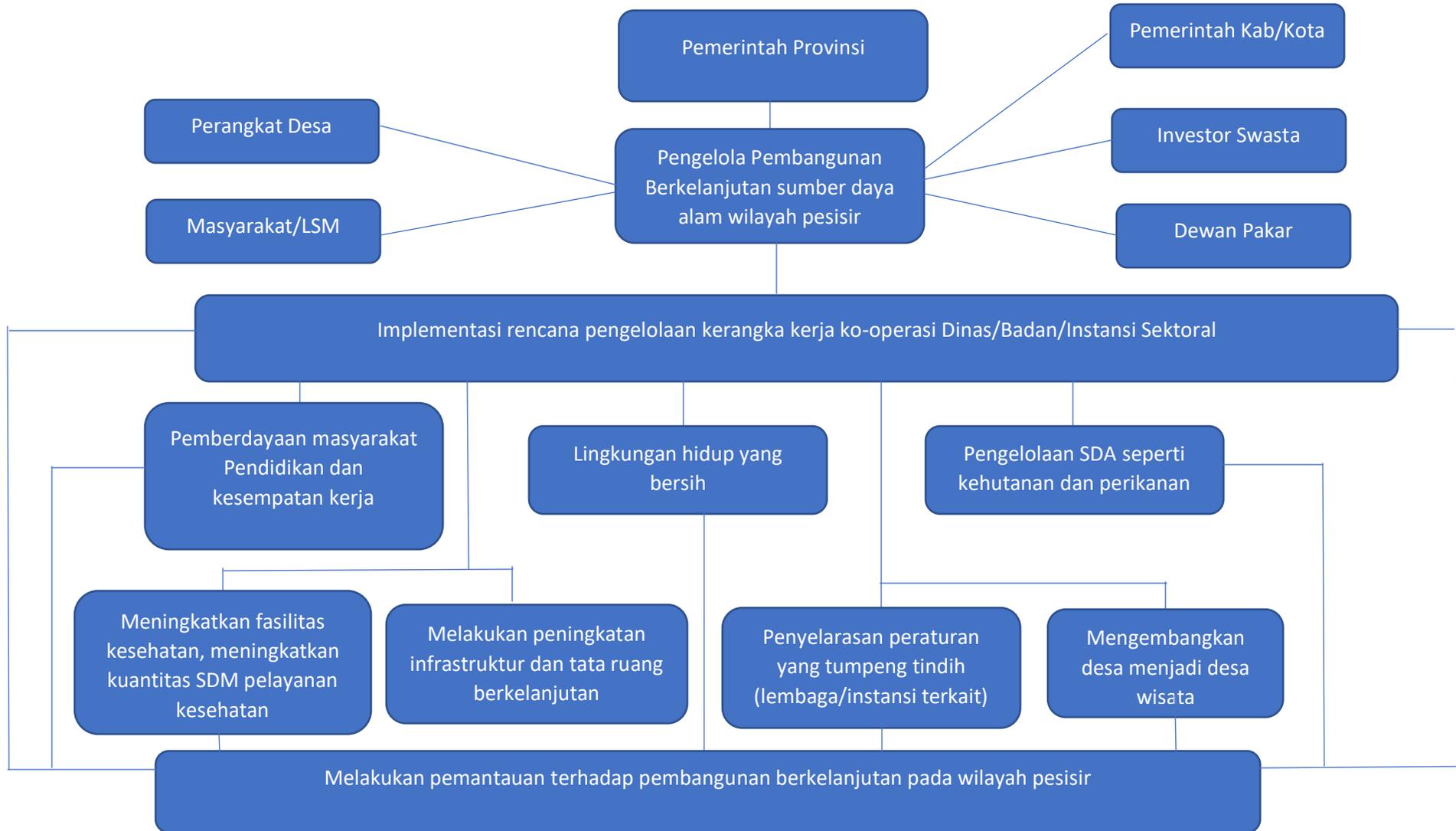
Masalah ini terkait dengan belum optimalnya kinerja infrastruktur dasar maupun strategis di Kecamatan Brandan Barat untuk mendukung kesejahteraan penduduk dan pengembangan wilayah. Pembangunan di Kecamatan Brandan Barat belum merata di seluruh wilayah dan belum mewujudkan struktur ruang wilayah yang diharapkan. Belum keseluruhan wilayah Kecamatan Brandan Barat tercakupi oleh jaringan infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan di Kecamatan Brandan Barat masih belum mendukung aksesibilitas untuk kawasan pariwisata.

e) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dan pelayanan publik yang prima.

Permasalahan-permasalahan ini berkaitan dengan belum terselenggaranya tata kelola pemerintahan berbasis sistem informasi dan teknologi, kelitbangan dan inovasi. Akar-akar masalah penyebab masalah pokok ini berkaitan dengan belum maksimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan, serta penunjang urusan.

Pembangunan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam pesisir diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang agar hidupnya sejahtera. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada, sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan. Pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai (AMDAL, UKL/UPL atau KLHS dalam kebijakan pemanfaatan ruang).

BLUE PRINT PEMBANGUNAN DESA PERLIS DAN KELANTAN



Dari skema blue print pembangunan Desa Perlis dan Kelantan tersebut dapat kita ketahui perlu adanya peran pemerintah provinsi, dan pemerintah kab/kota untuk melakukan pengelolaan pembangunan berkelanjutan sumber daya alam wilayah pesisir dengan mengikutsertakan masyarakat juga perangkat Desa Perlis dan Kelantan, mengikutsertakan dewan pakar yang kompeten seperti IALHI, serta menarik investor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan sumber daya alam wilayah pesisir agar dapat meningkatkan nilai ekonomi di Desa Perlis dan Kelantan.

Para pengelola pembangunan berkelanjutan tersebut menjalankan implementasi pengelolaan rencana pembangunan seperti melakukan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk menjadi masyarakat dan desa sebagai aktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan tidak hanya disentuh melalui pemberdayaan ekonomi, namun dengan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. Pemberdayaan masyarakat diawali dengan peningkatan kegiatan pembangunan di level lingkungan masyarakat, desa/kelurahan, hingga kecamatan dengan aktor pembangunan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kemandirian desa. Misi ini akan dicapai dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi peningkatan status kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan partisipasi pemuda, pengembangan budaya lokal, serta peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah: pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; kepemudaan dan olahraga; kebudayaan; pariwisata; dan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Melakukan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan terhindar dari kemiskinan serta memiliki kesempatan kerja. Selain itu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa juga ditujukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utama pengukuran kualitas sumber daya manusia. Urusan pemerintah daerah yang terkait dengan misi ini adalah pendidikan, kesehatan, mendirikan perpustakaan daerah, dan pengendalian penduduk serta Keluarga Berencana (KB).

Pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Perlis dan Kelantan terkendala oleh belum optimalnya kinerja infrastruktur. Pembangunan infratsruktur di desa saat ini belum dilakukan secara strategis dan memegang prinsip berkelanjutan. Sehingga pembangunan lima tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang maupun yang akan dikembangkan, seperti pariwisata. Sebagai bentuk optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kecamatan Brandan Barat khususnya Desa Perlis dan Kelantan, penataan ruang dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah penurunan kesenjangan wilayah. Misi ini akan dicapai dengan meningkatkan kinerja infrastruktur, penataan

ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi peningkatan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur ekonomi dan permukiman; pengoptimalan pemanfaatan ruang; peningkatan pengawasan kualitas lingkungan hidup, dan penurunan resiko kejadian bencana. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah : pekerjaan umum dan penataan ruang; pertanahan; perhubungan; perumahan dan kawasan permukiman; lingkungan hidup; dan bencana.

Melakukan penyesuaian peraturan hukum untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur implementasi Kebijakan Rencana Program (KRP) secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat di pertanggung jawabkan dan tidak memarginalkan masyarakat sekitarnya. Adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Langkat, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Desa Perlis dan Kelantan memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan pengembangan sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Desa Perlis dan Kelantan. Pengembangan ekonomi lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara

ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah. Tujuan utama pelaksanaan misi ini ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan menurunkan tingkat pengangguran dengan prioritas utama pada pariwisata. Upaya yang dilakukan dalam misi ini ialah meliputi pengembangan pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah, pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui UMKM dan IKM, peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, peningkatan investasi daerah, dan peningkatan partisipasi Angkatan kerja dalam ekonomi lokal. Urusan pemerintahan daerah yang sangat terkait dengan misi ini ialah pariwisata; koperasi dan UMKM; perindustrian; perdagangan; pertanian; pangan; kehutanan; kelautan dan perikanan; tenaga kerja; penanaman modal; dan penunjang urusan (pengelolaan pendapatan daerah).

Desa Perlis dan Kelantan memiliki hutan mangrove yang sangat luas namun tidak dirawat dan sudah banyak lahan mangrove yang dialihfungsikan menjadi pertambakan, perkebunan kelapa sawit, dan ditebang untuk dijadikan rumah. Maka dari itu diperlukan strategi untuk pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. Dengan meminimalisir penebangan mangrove, memberikan perlindungan cagar dan suaka malam, melakukan pemeberdayaan masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran lingkungan, ketaatan hukum dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah pesisir Kabupaten Langkat memiliki banyak potensi sumber daya kelautan dan memiliki strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menghadapi *Blue Economy*. Namun dalam pelaksanaannya kurang dilakukan sosialisasi secara nyata tentang program *Blue Economy*. Maka dari itu sangat penting adanya pemberdayaan masyarakat untuk Kabupaten Langkat sebagai salah satu upaya menghadapi *Blue Economy*. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan konsep *Blue Economy* semestinya di arahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara seimbang melalui diversifikasi kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan jumlah dan keragaman produk, namun tetap menjamin perlindungan lingkungan dari kerusakan.
2. Hasil estimasi model pertama yaitu pengaruh SK, PJ, TB terhadap IDM sebesar sebesar 24,63%, sedangkan 77% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.
3. Secara simultan, variabel SK berpengaruh positif dan signifikan, variabel TB berpengaruh negatif dan signifikan, namun variabel PJ berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM)

4. *Blue print* Desa Perlis dan Kelantan ditujukan agar terciptanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan sektor pariwisata, dan terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

5.2 Saran

1. Program-program untuk wilayah pesisir seharusnya terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, karena hal itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Seharusnya lebih banyak lagi dilakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *Blue Economy*. Hal ini dikarenakan agar masyarakat bisa mengenal *Blue Economy* dan mengetahui apa saja yang perlu dilakukan serta kelemahan dari konsep baru ini.
2. Untuk mengembangkan wilayah pesisir sebaiknya masyarakat juga ikut berperan penting, sehingga akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhiani, K, D. Erfit & Bhakti, A. (2018). Analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di wilayah Sumatera. *Jurnal perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Volume 7, 1-34
- Arabi, Axsel. (2016). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Perlis di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. *Skripsi Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Umsu*.
- Adi, Handoko. Yuliana, Ernik., dkk. (2010). Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir. *Pengelolaan wilayah pesisir dan laut*.
- Adi, Wahyu. Suci, dkk. (2018). Potensi Kesesuaian Mangrove Sebagai Daerah Ekowisata di Dusun Tanjung Tedung Sungai Selan Bangka Belitung. *Jurnal sumber daya perairan*, Volume 12, 65-73
- Ahmad, Basyuni, Moehar, dkk. (2021). Pembibitan dan Restorasi Mangrove di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. *Jurnal Kehutanan*. Volume 179, 75-86
- Arida, Pujani. (2017). Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Analisis Pariwisata*. Volume 17, 1-9
- Blue Economy Development Framework*. 2016. *Worldbank*
www.pubdocs.worldbank.org
- Blue Economy Development Framework For Indonesia's Economic Transformation*. 2021. www.bappenas.go.id
- Boediono. (2009). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Erlangga
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Desa Menurut Pulau Sumatera Tahun 2018. Katalog 11051123: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. Publikasi PDRB Maritim Indonesia Tahun 2016. Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2021. Jakarta: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. Produksi Ikan Menurut Hasil Tangkapan Kabupaten/Kota (ton) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017. Sumut: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Desa Menurut Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Katalog 11051123: BPS www.bps.go.id

- Badan Pusat Statistik. Publikasi Kabupaten Langkat Dalam Angka Tahun 2022. Katalog 11020011213: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022. Katalog 11010021213: BPS www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. Kecamatan Brandan Barat Dalam Angka Tahun 2020. Katalog 11020011213180: BPS www.bps.go.id
- Case, K.E., & Fair, R.C. (2008). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Deininge, K., & Pedrp, O. (2000). *Asset Distribution, Inequality and Growth. The World Bank*, 5-9
- Dhian, Shofia, dkk. (2019). *A Blue Economy for Better Economic Development. Jurnal Blue Economy*. Volume 89, 165-172
- Dwi, Grace, dkk. (2022). Peningkatan Kapabilitas Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 5, 171-178
- E-book Status Indeks Desa Membangun Provinsi-Kabupaten-Kecamatan Tahun 2019. Kementerian Desa www.kemedes.go.id
- E-book Status Indeks Desa Membangun Provinsi-Kabupaten-Kecamatan Tahun 2020. Kementerian Desa www.kemendes.go.id
- E-book Status Indeks Desa Membangun Provinsi-Kabupaten-Kecamatan Tahun 2021. Kementerian Desa www.kemendes.go.id
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu ekonomi Pengantar Makro* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Kasinus
- Gujarati, D. (2003). *Ekonomi Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hutan Mangrove di Brandan Barat Jadi Destinasi Wisata Bahari. 2016. Artikel www.harianSIB.com
- Hermanto, Victoria, Sri, dkk. (2017). *Buku Panduan Pengembangan Wisata Hijau*. Jakarta: Menteri Pariwisata.
- Indeks Desa Membangun (IDM). Kementerian Desa www.kemendes.go.id
- Jhingan, M. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi Mangrove di Indonesia tahun 2021. Jakarta: KKP www.kkp.go.id

Kerusakan Hutan Mangrove Kecamatan Brandan Barat Langkat Semakin Parah Akibat Perambahan Liar. 2020. www.sumutantaranews.com

Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Erlangga

Kuncoro, Mudrajad (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (edisi pertama)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Kurniawan, D. (2009) Kemiskinan di Indonsesia dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Volume 5, 1-19

Mankiw,N, G. (2007). *Macroeconomics*. Jakarta: Erlangga

Nachrowi, N.D., & Usman, H. (2002). *Pengunaan Teknik Ekonometrik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Noh, Junsung., Lee, Ki-Hoon., dkk. (2020). The Blue Economy and the United Nations Sustainable Development Goals. *Jurnal Blue Economy*, Volume 137, 1-7

Nikolas, Loy., dkk. (2019). Jasa Kelautan dan Perikanan Indonesia. *Tata kelola pariwisata maritim Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. www.bappeda.langkatkab.go.id

Rendi, Venita. (2019). Strategi Indonesia Dalam Implementasi Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Hubungan Internasional*. Volume 3, 46-64

Sanusi, B.(2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono. (2011). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta

Subhan, Afifi. (2014). Identifikasi Program *Corporate Social Responsibility* di Pangkalan Brandan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 12, 136-149.

Sustainabele Ocean Economy Country Diagnostic of Indonesia. 2021. <https://www.oecd.org>

Todaro, M,P.,Smith, S,C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (edisi kesebelas). Jakarta: Erlangga.

Yuntha, Slamet, Siddik, dkk. (2016). Identifikasi Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Jurnal Ekowisata*. Volume 1, 31-38

LAMPIRAN

Data Indeks Desa Membangun, Sarana Kesehatan, Panjang Jalan, dan Tanggap Bencana Kabupaten Langkat Sumatera Utara

No	Kecamatan	Tahun	IDM	SK	PJ	BA
1	Bahorok	2019	0.7053	129	73.790	2
2	Bahorok	2020	0.7202	130	94.590	1
3	Bahorok	2021	0.7215	128	62.500	1
4	Sirapit	2019	0.6597	36	33.700	1
5	Sirapit	2020	0.6637	39	24.310	1
6	Sirapit	2021	0.6799	39	37.710	2
7	Salapian	2019	0.6432	84	65.600	1
8	Salapian	2020	0.6642	76	73.620	3
9	Salapian	2021	0.6639	69	60.720	2
10	Kutambaru	2019	0.5977	53	72.950	3
11	Kutambaru	2020	0.6021	57	64.770	2
12	Kutambaru	2021	0.6111	50	86.360	2
13	Sei Bingai	2019	0.6617	126	115.200	2
14	Sei Bingai	2020	0.6752	104	102.920	1
15	Sei Bingai	2021	0.6677	102	90.020	1
16	Kuala	2019	0.6120	113	66.130	3
17	Kuala	2020	0.6191	105	82.300	4
18	Kuala	2021	0.6216	107	90.360	5
19	Selesai	2019	0.6392	110	85.000	1
20	Selesai	2020	0.6533	107	93.470	2
21	Selesai	2021	0.6662	107	79.970	3
22	Binjai	2019	0.6604	76	43.820	1
23	Binjai	2020	0.6481	68	42.320	1
24	Binjai	2021	0.6500	71	53.060	1
25	Stabat	2019	0.6639	125	140.640	4
26	Stabat	2020	0.6675	122	140.570	5
27	Stabat	2021	0.6757	109	129.970	2
28	Wampu	2019	0.6485	97	49.030	2
29	Wampu	2020	0.6585	100	56.040	4
30	Wampu	2021	0.6655	99	69.840	6
31	Batang Serangan	2019	0.5865	69	77.370	2
32	Batang Serangan	2020	0.6290	64	61.520	1
33	Batang Serangan	2021	0.6373	65	78.220	6
34	Sawit Seberang	2019	0.6814	57	58.000	1
35	Sawit Seberang	2020	0.6649	51	38.500	1
36	Sawit Seberang	2021	0.6598	53	46.590	2
37	Padang Tualang	2019	0.6248	88	41.370	2
38	Padang Tualang	2020	0.6356	80	76.760	1
39	Padang Tualang	2021	0.6463	81	70.000	4
40	Hinai	2019	0.6427	77	68.420	1

41	Hinai	2020	0.6479	69	68.140	1
42	Hinai	2021	0.6652	77	69.340	2
43	Secanggang	2019	0.6617	129	118.270	2
44	Secanggang	2020	0.6623	129	107.470	2
45	Secanggang	2021	0.6442	130	105.970	2
46	Tanjung Pura	2019	0.6128	127	56.380	4
47	Tanjung Pura	2020	0.6281	120	55.900	1
48	Tanjung Pura	2021	0.6298	121	52.150	4
49	Gebang	2019	0.6424	76	68.120	2
50	Gebang	2020	0.6420	64	55.130	2
51	Gebang	2021	0.6500	73	56.430	1
52	Babalan	2019	0.6744	93	70.170	2
53	Babalan	2020	0.6545	88	69.170	3
54	Babalan	2021	0.6654	91	69.000	2
55	Sei Lapan	2019	0.6469	91	50.880	3
56	Sei Lapan	2020	0.6248	93	56.180	5
57	Sei Lapan	2021	0.6402	88	58.470	9
58	Brandan Barat	2019	0.5941	44	18.000	2
59	Brandan Barat	2020	0.6030	43	19.480	2
60	Brandan Barat	2021	0.6124	40	21.900	3
61	Besitang	2019	0.6358	71	82.920	4
62	Besitang	2020	0.6408	72	95.920	4
63	Besitang	2021	0.6441	74	81.000	9
64	Pangkalan Susu	2019	0.6640	87	40.060	2
65	Pangkalan Susu	2020	0.6735	79	37.760	1
66	Pangkalan Susu	2021	0.6682	78	34.260	1
67	Pematang Jaya	2019	0.5866	43	65.460	1
68	Pematang Jaya	2020	0.6006	39	44.460	1
69	Pematang Jaya	2021	0.6134	38	57.460	1

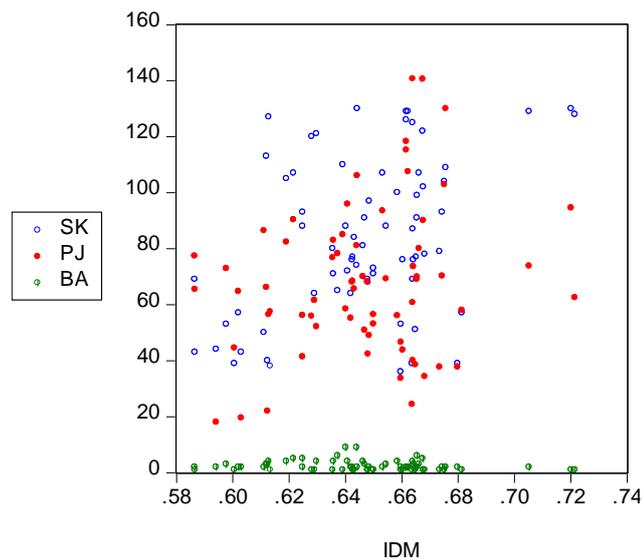
Hasil Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG(IDM)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/25/22 Time: 14:45
 Sample: 2019 2021
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.670758	0.058685	-11.42980	0.0000
LOG(SK)	0.058221	0.016815	3.462353	0.0010
LOG(PJ)	-0.001515	0.014334	-0.105707	0.9161
LOG(BA)	-0.020405	0.007933	-2.572297	0.0124

R-squared	0.243680	Mean dependent var	-0.436775
Adjusted R-squared	0.208773	S.D. dependent var	0.043713
S.E. of regression	0.038883	Akaike info criterion	-3.600281
Sum squared resid	0.098274	Schwarz criterion	-3.470768
Log likelihood	128.2097	Hannan-Quinn criter.	-3.548899
F-statistic	6.980834	Durbin-Watson stat	0.411858
Prob(F-statistic)	0.000383		

Scatterplot Model



Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.788983	3	0.0008

1. DATA PRIBADI		DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
Nama	:	Salsabilla Raihan Daulay	
NPM	:	1805180010	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Medan,03 Juli 2001	
Jenis Kelamin	:	Perempuan	
Agama	:	Islam	
Kewarganegaraan	:	Indonesia	
Anak Ke	:	1 (Pertama) dari 2 (Dua) bersaudara	
Alamat	:	Jl. Besar Delitua, Gg. Kolam No.59	
No. Telepon	:	082277103422	
Email	:	Salsabilla.raihan01@gmail.com	
DATA ORANG TUA			
Nama Ayah	:	Ir. M. Ichsan Daulay	
Nama Ibu	:	Nurhayati Nasution	
Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta	
Pekerjaan Ibu	:	Wiraswasta	
Alamat	:	Jl. Besar Delitua Gg. Kolam No.59	
DATA PENDIDIKAN FORMAL			
1. Tahun 2005-2011	:	SD Swasta YPI Delitua	
2. Tahun 2011-2014	:	SMP Negeri 2 Medan	
3. Tahun 2014-2017	:	SMA Negeri 13 Medan	
4. Tahun 2018,	:	Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
	:	Program Studi Ekonomi Pembangunan (S-1) Universitas Muhammadiyah	
	:	Sumatera Utara	
		Medan, 01 September 2022	
			
		Salsabilla Raihan Daulay	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567, Kode Pos Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : SALSABILLA RAIHAN DAULAY
NPM : 1805180010
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
KONSENTRASI : RISET EKONOMI DAN BISNIS
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS POTENSI EKONOMI WILAYAH PESISIR
BERBASIS KONSEP BLUE ECONOMY DALAM
MEWUJUDKAN SDGs DESA (STUDI KASUS
KECAMATAN BRANDAN BARAT KABUPATEN
LANGKAT)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
21/feb-2022	Bab I, Perinci bagian untuk konsep ekonomi biru (blue eco) dan data yang dibutuhkan untuk mendukung masalah dan tujuan penelitian.	<i>Ju</i>	
16/maret-2022	Bab II, untuk uraian teori harus bersumber pada text buku, jadi tidak boleh dari artikel-artikel karena artikel tidak sampai jadi penelitian terdahulu	<i>Ju</i>	
12/April-2022	teledakan bab II & III dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.	<i>Ju</i>	
22/April-2022	Bab III, banyak yang harus direvisi tentang pembuatan blue print pembangunan desa yang dituliskan di proposal skripsi	<i>Ju</i>	
14/mei-2022	Data untuk analisa kuantitatif dan model ekonometrika estimasi harus direvisi	<i>Ju</i>	
30/mei-2022	Aktin sudah direvisi, Acc untuk lyaui.	<i>Ju</i>	

Medan, ... 30 Mei 2022

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Ekonomi
Pembangunan

Pembimbing
[Signature]

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si

[Signature]

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E, M.Si

MAJLIS FAKULTAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini 21 Juni 2022 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan
 rangkaiannya sebagai berikut :

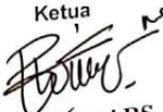
Nama : Salsabilla Raihan Dauly
N.P.M. : 1805180010
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Juli 2001
Alamat Rumah : Jl.Besar Deli Tua Gg.Kolam
Judul Proposal : Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy
 Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat
 Kabupaten Langkat)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Studi kasus harus sesuai dengan rumusan dan tujuan analisis
Bab I	Tambahkan dan perbaiki latar belakang, masukkan dimensi yang membentuk IDM dan tambahkan Data IDM 2018.
Bab II	Perbaiki hipotesis dan kerangka konseptual
Bab III	Perbaiki Model ekonometrika dan diperjelas dan konsultasikan mengenai blue print.
Lainnya	
kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

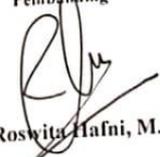
Ketua

 Dr. Prawidya Hariani RS, SE., M.Si.

Pembimbing

 Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si.

Sekretaris

 Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

Pembanding

 Dra. Hj. Roswita Hafni, M.Si.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari **Selasa 21 Juni 2022** menerangkan bahwa:

Nama : Salsabilla Raihan Daulay
 N.P.M. : 1805180010
 Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 03 Juli 2001
 Alamat Rumah : Jl.Besar Deli Tua Gg.Kolam
 JudulProposal : Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy Dalam Mewujudkan SDGs Desa (Studi Kasus Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)

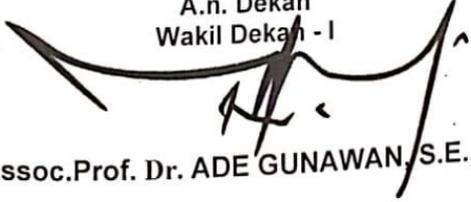
Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing : **Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si**

Medan, 21 Juni 2022

TIM SEMINAR

<p>Ketua</p>  <p>Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.</p>	<p>Sekretaris</p>  <p>Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.</p>
<p>Pembimbing</p>  <p>Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si</p>	<p>Pembanding</p>  <p>Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.</p>

Diketahui / Disetujui
 A.n. Dekan
 Wakil Dekan - I


 Assoc.Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

MAJELIS PENDIRIAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2009/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/11/1/2022

Medan, 11/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salsabilla Raihan Daulay
NPM : 1805180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konentrasi : RISET

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

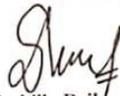
Identifikasi Masalah : 1) Mengidentifikasi kegiatan ekonomi wilayah pesisir di sektor dan non sektor kelautan dan perikanan yang berbasis konsep blue economy
2) Menganalisis karakteristik individu (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan pendapatan) terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
3) Mengetahui dan mengenal perempuan pesisir di Desa Perlis dalam mengoptimalkan kedudukannya yang bukan hanya ibu rumah tangga tetapi mampu membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga

Rencana Judul : ① Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Konsep Blue Economy
2. Analisis Karakteristik Individu Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
3. Peranan Wanita Pesisir Dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga

Objek/Lokasi Penelitian : Studi Kasus Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Salsabilla Raihan Daulay)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2009/JDL/SKR/MAN/FEB/UMSU/11/1/2022

Nama Mahasiswa : Salsabilla Raihan Daulay
NPM : 1805180010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : RISET
Tanggal Pengajuan Judul : 11/1/2022
Nama Dosen Pembimbing^{*)} :
Judul Disetujui^{**)} :
Dr. Pramiyda Hariani, MS
Analisis Potensi Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis
Konsep Blue Economy.

Medan,

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Pramiyda Hariani RS., SE., M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Dr. Pramiyda Hariani RS., SE., M.Si.)

Keterangan

^{*)} Ditua oleh Pimpinan Program Studi

^{**)} Ditua oleh Dosen Pembimbing

Setelah disetujui oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"